



MANAJEMEN AUDIT KEUANGAN

Endrari | Wa Ode Harliyanti Unga | Richad Alamsyah | Markonah |
Ahmad Junaidi | Sepbeariska Manurung | Karina Sukardi

MANAJEMEN AUDIT KEUANGAN

**Endraria
Wa Ode Harliyanti Unga
Richad Alamsyah
Markonah
Ahmad Junaidi
Sepbeariska Manurung
Karina Sukardi**

Editor : Ari Novendra , M.Pd



PT. MINANG MEDIA PRESS

MANAJEMEN AUDIT KEUANGAN

Penulis :

Endraria

Wa Ode Harliyanti Unga

Richad Alamsyah

Markonah

Ahmad Junaidi

Sepbeariska Manurung

Karina Sukardi

ISBN : 978-634-05-2294-5

Editor : Ari Novendra , M.Pd

Penyunting : Annisa, S.Pd. Gr.

Desain Sampul dan Tata Letak : Wanda Apri Yeni,S,pd,Gr

Penerbit : PT. MINANG MEDIA PRESS

Nomor IKAPI : 076/SBA/2025

Redaksi :

Jl. Simpang Patiak No. 07, Kel. Lubuk Minturun,

Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat

Website : <https://minangmedia.id>

Email : minangmediapress@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Manajemen Audit Keuangan dapat diselesaikan. Buku ini membahas seputar Pendahuluan Manajemen Audit Keuangan, Konsep Dasar Audit dan Standar Audit, Perencanaan Audit Keuangan, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal, Manajemen Bukti Audit dan Dokumentasi , Audit Laporan Keuangan, dan Manajemen Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Audit.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN MANAJEMEN AUDIT	
KEUANGAN	1
Oleh : Dr. Endraria, SE., MM., M.Akt., CRA., CRP.	
1.1 Latar Belakang Pentingnya Audit dalam Sistem Ekonomi Modern.....	1
1.2 Peran Audit dalam Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas	2
1.3 Hubungan Audit dengan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)	4
1.4 Tujuan dan Ruang Lingkup Pembahasan Bab	5
1.5 Definisi Audit dan Audit Keuangan	6
1.6 Tujuan Audit Laporan Keuangan	7
1.7 Jenis-Jenis Audit	8
1.8 Tahapan Proses Audit Keuangan.....	9
1.9 Risiko dan Pengendalian dalam Audit.....	10
1.10 Perbedaan Audit, Review, dan Assurance.....	11
1.11 Kerangka Regulasi dan Standar Audit.....	12
1.12 Transformasi Digital dalam Audit	13
1.13 Isu dan Tantangan Kontemporer dalam Manajemen Audit.....	14

DAFTAR PUSTAKA.....	16
BAB 2 KONSEP DASAR AUDIT DAN STANDAR AUDIT ...	19
Oleh: Dr. Wa Ode Harliyanti Unga, S.Sos., M.Si	
2.1 Konsep Audit.....	19
2.1.1 Pengertian Audit Menurut Para Ahli.....	19
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Audit	20
2.1.3 Unsur-Unsur Penting Dalam Audit.....	22
2.1.4 Karakteristik Audit	23
2.1.5 Ruang Lingkup Audit.....	25
2.1.6 Sejarah dan Perkembangan Audit	26
2.2 Standar Audit.....	29
2.2.1 Definisi Standar Audit.....	29
2.2.2 Fungsi Standar Dalam Audit	30
2.2.3 Jenis dan Standar Audit.....	31
2.2.4 International Standards on Auditing (ISA)	34
2.2.5 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)	38
2.2.6 Prinsip-Prinsip Dasar Standar Audit.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	49
BAB 3 PERENCANAAN AUDIT	51
Oleh : Richad Alamsyah	
SE.,M.Ak.,CSA[®],CRMO[®],CFP[®],CRMP[®],QLP[®] AAAIK, AEPP	
3.1 Pendahuluan	51
3.2 Perencanaan Audit.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	67

**BAB 4 MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN
INTERNAL.....69**

Oleh : Dr. Ir. Markonah, ASAI, M.M.

4.1. Pendahuluan	69
4.2. Apa Itu Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	73
4.3. Kerangka COSO: Pilar Pengendalian Internal.....	74
4.4. Jenis-Jenis Risiko dalam Pengendalian Internal	75
4.5. Peran Kunci Audit Internal	76
4.6 Studi Kasus: Efektivitas Audit Internal di Sektor Keuangan Indonesia	77
4.7 Hubungan Erat: Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA).....	78
4.8 Tantangan dan Rekomendasi	79
4.9 Kesimpulan : Fondasi Keberlanjutan Organisasi	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

**BAB 5 MANAJEMEN BUKTI AUDIT DAN
DOKUMENTASI.....83**

Oleh : Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT

5.1 Pendahuluan	83
5.2 Konsep Dasar dan Kerangka Teori.....	84
5.2.1 Definisi Bukti Audit Menurut Para Ahli	84
5.2.2 Karakteristik Bukti Audit.....	87
5.2.3 Klasifikasi Bukti Audit	92
5.3 Perencanaan dan Strategi Pengumpulan	99
5.3.1 Definisi dan Kerangka Konseptual.....	99

5.3.2 Tahapan Perencanaan : Langkah Awal yang Krusial.....	100
5.3.3 Strategi Pengumpulan Bukti : Memilih Pendekatan yang Tepat.....	102
5.3.4 Sampling Audit dan Pemanfaatan Teknologi.....	104
5.4 Pengelolaan Dokumen Audit (Kertas Kerja).....	104
5.4.1 Definisi dan Tujuan Kertas Kerja Audit.....	105
5.4.2 Fungsi Kertas Kerja Audit.....	105
5.4.3 Persyaratan dan Karakteristik Kertas Kerja yang Baik.....	106
5.4.4 Struktur dan Jenis Kertas Kerja Audit	108
5.4.5 Proses Review dan Supervisi Kertas Kerja.....	110
5.4.6 Pengarsipan (Retensi) dan Pemusnahan Dokumen Audit	111
5.4.7 Praktik Terbaik dalam Pengelolaan Kertas Kerja Modern	113
5.5 Pengendalian atas Dokumen dan Bukti Audit	114
5.5.1 Kerahasiaan (<i>Confidentiality</i>)	115
5.5.2 Keamanan dan Pengendalian Akses.....	116
5.5.3 Integritas Dokumentasi Audit (<i>Integrity</i>).....	118
5.5.4 Kepatuhan terhadap Regulasi Perlindungan Data Pribadi	119
5.5.5 Tanggung Jawab Hukum Auditor.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121

BAB 6 AUDIT LAPORAN KEUANGAN..... 127

Oleh : Sepbeariska Manurung

6.1 Pendahuluan.....	127
6.2 Pengertian Audit Laporan Keuangan.....	132
6.3 Tujuan Audit Laporan Keuangan.....	136
6.4 Karakteristik Audit Laporan Keuangan.....	141
6.5 Tahapan Audit Laporan Keuangan.....	147
6.6 Bukti Audit dalam Audit Laporan Keuangan.....	152
6.7 Opini Auditor atas Laporan Keuangan.....	157
6.8 Tantangan Audit Laporan Keuangan di Era Digital.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	170

BAB 7 MANAJEMEN TEMUAN, REKOMENDASI, DAN TINDAK LANJUT AUDIT..... 173

Oleh : Karina Sukardi

7.1 Pendahuluan.....	173
7.2 Konsep dan Karakteristik Temuan Audit.....	178
7.3 Klasifikasi dan Tingkat Signifikansi Temuan Audit.....	184
7.4 Penyusunan Rekomendasi Audit yang Efektif.....	189
7.5 Tanggung Jawab Manajemen dalam Menindaklanjuti Temuan Audit.....	195
7.6 Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Audit.....	201
7.7 Hambatan dalam Implementasi Rekomendasi Audit.....	206
7.8 Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Audit.....	212
DAFTAR PUSTAKA.....	219

BIODATA PENULIS 223

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1

Tahapan Perencanaan Audit.....54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Peran Audit dalam Transparansi dan Akuntabilitas.....3

BAB 1

Pendahuluan Manajemen Audit Keuangan

Oleh : Dr. Endraria, SE., MM., M.Akt., CRA., CRP.

1.1 Latar Belakang Pentingnya Audit dalam Sistem Ekonomi Modern

Dalam sistem ekonomi modern yang ditandai oleh pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, audit keuangan memiliki peran yang sangat krusial. Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan atau penyajian informasi yang bias. Audit keuangan hadir sebagai mekanisme pengawasan independen untuk mengurangi asimetri informasi tersebut. Dengan melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan, auditor membantu meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi yang digunakan oleh investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh probabilitas auditor dalam menemukan dan melaporkan salah saji material. Semakin tinggi kualitas audit, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan pasar terhadap laporan keuangan.

Dalam konteks pasar modal global, kebutuhan terhadap audit semakin meningkat seiring dengan kompleksitas transaksi bisnis, globalisasi, dan perkembangan instrumen keuangan. Healy dan Palepu (2001) menegaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang didukung oleh audit independen berkontribusi terhadap efisiensi pasar modal karena mengurangi biaya informasi dan risiko investasi. Oleh karena itu, audit tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai fondasi kepercayaan dalam sistem ekonomi modern.

1.2 Peran Audit dalam Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam praktik bisnis yang berkelanjutan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi yang relevan dan andal kepada publik, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan. Audit keuangan berperan sebagai mekanisme assurance yang meningkatkan reliabilitas informasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Menurut Bushman & Smith (2001), sistem pelaporan keuangan yang berkualitas—yang didukung oleh audit independent mampu meningkatkan disiplin pasar dengan menyediakan informasi yang akurat mengenai kinerja perusahaan. Audit membantu memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan (error) maupun kecurangan (fraud). Dengan

demikian, auditor berperan sebagai penjaga integritas informasi keuangan.

Selain itu, audit juga memperkuat akuntabilitas manajemen. Melalui proses pemeriksaan dan evaluasi pengendalian internal, auditor dapat mengidentifikasi kelemahan sistem yang berpotensi menimbulkan risiko. Knechel et al. (2013) menekankan bahwa kualitas audit yang tinggi berkorelasi dengan meningkatnya kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Oleh karena itu, audit tidak hanya memberikan opini atas laporan keuangan, tetapi juga mendorong praktik manajerial yang lebih bertanggung jawab. Secara konseptual, peran audit dalam transparansi dan akuntabilitas dapat diringkas pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.1 Peran Audit dalam Transparansi dan Akuntabilitas

Aspek	Peran Audit	Dampak
Transparansi	Verifikasi kewajaran laporan keuangan	Meningkatkan kepercayaan investor
Akuntabilitas	Evaluasi pertanggungjawaban manajemen	Mengurangi konflik agensi
Pengendalian	Penilaian sistem pengendalian internal	Meminimalkan risiko fraud
Kredibilitas	Pemberian opini independen	Menurunkan biaya modal

1.3 Hubungan Audit dengan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Audit keuangan merupakan salah satu mekanisme utama dalam struktur GCG. Dalam perspektif teori agensi, audit berfungsi sebagai alat monitoring untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Struktur tata kelola yang baik biasanya melibatkan dewan komisaris, komite audit, dan auditor eksternal. Komite audit berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan independensi auditor. DeAngelo (1981) menekankan bahwa independensi auditor merupakan faktor utama dalam menjaga kualitas audit, yang pada akhirnya memperkuat praktik GCG.

Bushman & Smith (2001) juga menjelaskan bahwa sistem pelaporan keuangan yang transparan, yang diaudit secara independen, berkontribusi terhadap mekanisme tata kelola berbasis pasar. Audit membantu mengurangi risiko manipulasi laba dan meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Dengan demikian, audit bukan hanya fungsi teknis pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga bagian integral dari sistem tata kelola perusahaan. Hubungan antara audit dan GCG dapat digambarkan sebagai berikut :



Model ini menunjukkan bahwa audit berperan sebagai penghubung antara sistem pengawasan internal dan kepercayaan eksternal.

1.4 Tujuan dan Ruang Lingkup Pembahasan Bab

Tujuan utama bab ini adalah memberikan pemahaman konseptual mengenai manajemen audit keuangan sebagai fondasi teoritis sebelum membahas aspek operasional audit. Secara khusus, bab ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi audit dalam sistem ekonomi modern, menguraikan peran audit dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dan menjelaskan keterkaitan audit dengan tata kelola perusahaan. Ruang lingkup pembahasan difokuskan pada aspek konseptual dan teoritis audit keuangan, termasuk teori agensi, kualitas audit, serta kontribusinya terhadap efisiensi pasar dan tata kelola perusahaan. Pembahasan tidak mencakup prosedur

teknis audit secara rinci, karena aspek tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya. (Healy & Palepu, 2001) menegaskan bahwa literatur pelaporan keuangan dan audit menunjukkan hubungan kuat antara kualitas informasi, pengawasan eksternal, dan efisiensi pasar modal. Oleh karena itu, pemahaman konseptual dalam bab ini menjadi penting sebagai dasar analisis manajemen audit secara lebih komprehensif pada bagian berikutnya. Dengan demikian, Bab 1 berfungsi sebagai landasan teoritis yang menjelaskan mengapa audit keuangan diperlukan, bagaimana audit berkontribusi terhadap tata kelola dan pasar, serta bagaimana audit menjadi elemen sentral dalam sistem ekonomi modern.

1.5 Definisi Audit dan Audit Keuangan

Audit secara umum didefinisikan sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait dengan asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi guna menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Definisi ini menekankan tiga unsur utama: proses sistematis, evaluasi bukti, dan kriteria yang jelas. Secara khusus, audit keuangan (financial statement audit) berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan opini mengenai kewajarannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit ditentukan oleh probabilitas auditor menemukan salah saji material dan melaporkannya secara independen. Dengan demikian, audit bukan sekadar proses pemeriksaan teknis,

tetapi juga mencerminkan independensi dan kompetensi profesional auditor.

Dalam perspektif teori agensi, audit keuangan berfungsi sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Audit memberikan jaminan (*assurance*) kepada pemegang saham dan pihak eksternal lainnya bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen telah diperiksa secara independen. Audit keuangan juga memiliki karakteristik utama: berbasis bukti (*evidence-based*), menggunakan pendekatan risiko (*risk-based approach*), serta mengikuti standar profesional yang ketat. Oleh karena itu, audit keuangan menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas sistem pelaporan keuangan di pasar modal global.

1.6 Tujuan Audit Laporan Keuangan

Tujuan utama audit laporan keuangan adalah memberikan opini independen mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Konsep "kewajaran" (*fair presentation*) tidak berarti bebas dari kesalahan sepenuhnya, melainkan bebas dari salah saji material yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. (Healy & Palepu, 2001) menekankan bahwa kualitas informasi keuangan sangat penting dalam mengurangi asimetri informasi di pasar modal. Audit meningkatkan kredibilitas laporan keuangan sehingga membantu investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan adanya opini auditor, risiko

informasi (*information risk*) dapat ditekan. Selain memberikan opini, audit juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi risiko salah saji material dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem akuntansi dan pengendalian. (Verrecchia, 2013) menyatakan bahwa kualitas audit yang tinggi berkorelasi dengan meningkatnya kepercayaan investor dan menurunnya biaya modal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa audit memiliki implikasi ekonomi yang signifikan.

1.7 Jenis-Jenis Audit

Audit dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan pelaksanaannya. Secara umum, terdapat tiga jenis audit utama:

1. Audit Eksternal. Dilakukan oleh auditor independen untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Audit ini bertujuan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pihak eksternal.
2. Audit Internal. Dilakukan oleh unit internal perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Audit internal lebih berorientasi pada peningkatan operasional.
3. Audit Pemerintah. Dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas penggunaan dana publik.

Verrecchia (2013) menyatakan bahwa meskipun memiliki tujuan berbeda, ketiga jenis audit tersebut saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif.

1.8 Tahapan Proses Audit Keuangan

Proses audit keuangan secara umum terdiri atas tiga tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian/pelaporan. Setiap tahap memiliki karakteristik dan prosedur khusus yang saling terintegrasi.

1. Perencanaan Audit. Perencanaan audit merupakan tahap awal yang krusial dalam menentukan keberhasilan audit. Auditor memperoleh pemahaman atas entitas, lingkungan bisnis, serta sistem pengendalian internal. Penilaian risiko salah saji material dilakukan untuk menentukan tingkat materialitas dan strategi audit yang tepat. Perencanaan berbasis risiko meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit karena fokus pada area signifikan. (Shi et al., 2025)
2. Pelaksanaan Audit. Tahap ini melibatkan pengujian pengendalian (test of controls) dan prosedur substantif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Auditor mengevaluasi efektivitas pengendalian internal serta melakukan pengujian rinci atas transaksi dan saldo akun. Bukti audit dapat berupa dokumen, konfirmasi pihak ketiga, observasi, maupun prosedur analitis.
3. Penyelesaian dan Pelaporan. Pada tahap akhir, auditor mengevaluasi seluruh bukti yang diperoleh dan menentukan jenis opini audit. Opini dapat berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat (disclaimer). Kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan salah saji merupakan indikator utama kualitas audit. Diagram berikut menggambarkan alur proses audit:



Tahapan diatas menunjukkan bahwa manajemen audit merupakan proses berkesinambungan yang memerlukan koordinasi dan pengawasan yang ketat.

1.9 Risiko dan Pengendalian dalam Audit

Risiko audit adalah risiko bahwa auditor memberikan opini yang tidak tepat atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Model risiko audit secara umum dinyatakan sebagai:

$$AR = IR \times CR \times DR$$

Keterangan:

- **AR (Audit Risk)** = Risiko Audit
- **IR (Inherent Risk)** = Risiko Bawaan
- **CR (Control Risk)** = Risiko Pengendalian
- **DR (Detection Risk)** = Risiko Deteksi

Risiko inheren (IR) berkaitan dengan kerentanan suatu akun terhadap salah saji sebelum mempertimbangkan

pengendalian internal. Risiko pengendalian (CR) muncul ketika sistem pengendalian internal gagal mencegah atau mendeteksi salah saji. Risiko deteksi (DR) adalah risiko bahwa prosedur audit tidak mampu menemukan salah saji yang ada. Pendekatan berbasis risiko menuntut auditor untuk memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Sistem pengendalian yang efektif dapat mengurangi risiko salah saji dan memperkecil lingkup pengujian substantif. Kualitas audit sangat dipengaruhi oleh bagaimana auditor merespons risiko yang teridentifikasi selama proses audit (Francis & Wang, 2008). Selain risiko kesalahan (error), auditor juga harus mempertimbangkan risiko kecurangan (fraud). Fraud biasanya melibatkan unsur kesengajaan dan dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, manajemen audit harus memastikan prosedur audit dirancang untuk mengidentifikasi indikasi fraud, termasuk melalui analisis data dan wawancara manajemen. Dengan demikian, pengelolaan risiko dan evaluasi pengendalian internal merupakan inti dari manajemen proses audit. Tanpa pendekatan risiko yang memadai, audit berpotensi gagal mendeteksi salah saji material dan menurunkan kredibilitas laporan keuangan.

1.10 Perbedaan Audit, Review, dan Assurance

Audit, review, dan assurance sering kali digunakan secara bergantian, namun memiliki tingkat keyakinan (level of assurance) yang berbeda. Audit memberikan tingkat keyakinan tertinggi (reasonable assurance), sedangkan review memberikan keyakinan terbatas (limited assurance). Assurance

secara umum mencakup berbagai jasa profesional yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan. Healy & Palepu (2001) menekankan bahwa mekanisme assurance yang kuat berkontribusi terhadap efisiensi pasar modal. Audit sebagai bentuk assurance paling komprehensif melibatkan prosedur pengujian substantif dan evaluasi pengendalian internal, sedangkan review lebih terbatas pada prosedur analitis dan wawancara.

1.11 Kerangka Regulasi dan Standar Audit

Regulasi dan standar audit berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur pelaksanaan audit agar konsisten, independen, dan berkualitas. Secara internasional, audit laporan keuangan mengacu pada *International Standards on Auditing* (ISA) yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Di Indonesia, standar tersebut diadopsi dalam bentuk Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kerangka regulasi ini menekankan prinsip independensi, skeptisisme profesional, kecukupan bukti audit, serta dokumentasi yang memadai. Standar audit juga mengatur tanggung jawab auditor dalam menilai risiko salah saji material akibat kesalahan maupun kecurangan. Kepatuhan terhadap standar ini menjadi indikator penting kualitas audit.

Secara konseptual, regulasi audit bertujuan mengurangi kegagalan audit (*audit failure*) yang dapat merusak kepercayaan publik. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh probabilitas auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem

akuntansi klien. (Uecker, 1980). Regulasi memperkuat probabilitas tersebut melalui pengawasan, inspeksi mutu, dan sanksi profesional. Selain itu, pengawasan terhadap auditor dilakukan oleh regulator seperti otoritas pasar modal dan lembaga pengawas profesi. Penguatan regulasi pasca-skandal keuangan global menunjukkan bahwa sistem tata kelola audit harus terus diperbarui untuk menjaga stabilitas pasar. Oleh karena itu, manajemen audit harus memastikan seluruh proses audit selaras dengan standar profesional dan ketentuan hukum yang berlaku.

1.12 Transformasi Digital dalam Audit

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma audit tradisional menjadi audit berbasis data (*data-driven auditing*). Penggunaan *Computer-Assisted Audit Techniques* (CAATs), analisis big data, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) memungkinkan auditor menganalisis populasi data secara menyeluruh, bukan hanya berbasis sampel. Teknologi meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur audit, terutama dalam mendeteksi anomali dan pola transaksi yang tidak biasa. Mukherjee et al. (2025) menjelaskan bahwa audit masa depan akan semakin mengarah pada *continuous auditing* dan *continuous monitoring*, yang memanfaatkan teknologi real-time dalam pengujian transaksi (Murthy et al., 2023). Namun, transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru, seperti risiko keamanan siber, perlindungan data, serta kebutuhan peningkatan kompetensi auditor dalam bidang teknologi informasi. Auditor harus memiliki kemampuan analitik dan pemahaman sistem

informasi agar mampu mengevaluasi kontrol berbasis IT secara efektif.

1.13 Isu dan Tantangan Kontemporer dalam Manajemen Audit

Manajemen audit menghadapi berbagai isu kontemporer, termasuk independensi auditor, rotasi auditor, kualitas audit, serta perluasan ruang lingkup audit terhadap laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Independensi auditor menjadi isu krusial karena hubungan jangka panjang dengan klien dapat memengaruhi objektivitas auditor. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit berkorelasi dengan reputasi kantor akuntan publik serta mekanisme pengawasan eksternal. (Bagh et al., 2025) menekankan bahwa kualitas audit merupakan konstruk multidimensi yang mencakup faktor institusional, organisasi, dan individu auditor. Selain itu, meningkatnya perhatian terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG) mendorong perluasan peran auditor dalam memberikan assurance atas laporan non-keuangan. Hal ini menuntut auditor memahami standar pelaporan keberlanjutan dan risiko terkait perubahan iklim.

Tantangan lain adalah globalisasi bisnis yang meningkatkan kompleksitas transaksi lintas negara, penggunaan instrumen keuangan derivatif, serta ketidakpastian ekonomi global. Dalam kondisi ini, manajemen audit harus adaptif dan responsif terhadap perubahan regulasi dan dinamika risiko. Secara keseluruhan, isu kontemporer menunjukkan bahwa audit bukan lagi sekadar pemeriksaan angka historis, melainkan bagian integral dari sistem tata

kelola dan manajemen risiko organisasi. Keberhasilan manajemen audit di masa depan sangat bergantung pada kemampuan profesi dalam menjaga independensi, meningkatkan kompetensi teknologi, dan merespons tuntutan transparansi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagh, T., Hunjra, A. I., Ntim, C. G., & Naseer, M. M. (2025). Capitalizing on risk: How corporate financial flexibility, investment efficiency, and institutional ownership shape risk-taking dynamics. *International Review of Economics & Finance*, 99, 104068. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104068>
- Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. *Journal of Accounting and Economics*, 32(1–3), 237–333. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00027-1](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00027-1)
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1)
- Francis, J. R., & Wang, D. (2008). The Joint Effect of Investor Protection and Big 4 Audits on Earnings Quality around the World*. *Contemporary Accounting Research*, 25(1), 157–191. <https://doi.org/10.1506/car.25.1.6>
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1–3), 405–440. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Mukherjee, A., Sharma, U., & Liu, J. (2025). Big data analytics role in shaping the work of accounting function and accounting professionals. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 21(7), 272–306. <https://doi.org/10.1108/JAOC-08-2024-0255>
- Murthy, U. S., Park, J. C., Smith, T., & Whitworth, J. (2023). Audit Efficiency and Effectiveness Consequences of Accounting System Homogeneity across Audit Clients: A New Form of Knowledge Spillover? *The Accounting Review*, 98(2), 389–418. <https://doi.org/10.2308/TAR-2020-0609>
- Shi, Z., Guo, Y., & Huang, T. K. (2025). *Intelligent Assessment of Going Concern in Listed Companies Synergistic Application of Social Network Analysis and Machine Learning*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5215298>
- Uecker, W. C. (1980). The Effects of Knowledge of the User's Decision Model in Simplified Information Evaluation. *Journal of Accounting Research*, 18(1), 191. <https://doi.org/10.2307/2490398>
- Verrecchia, R. E. (2013). Accounting Alchemy. *Accounting Horizons*, 27(3), 603–617. <https://doi.org/10.2308/acch-50488>

BAB 2

KONSEP DASAR AUDIT DAN STANDAR AUDIT

Oleh: Dr. Wa Ode Harliyanti Unga, S.Sos., M.Si

2.1 Konsep Audit

2.1.1 Pengertian Audit Menurut Para Ahli

Audit pada dasarnya merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah informasi yang disajikan oleh suatu organisasi telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, konsep audit tidak hanya dipahami secara sederhana sebagai pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga sebagai proses penilaian yang lebih luas terhadap keandalan informasi organisasi.

Arens, Elder, dan Beasley (2020) menjelaskan bahwa pada hakikatnya, audit dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh, menguji, dan mengevaluasi bukti secara independen guna menilai kesesuaian informasi dengan kriteria tertentu. Pengertian ini menekankan bahwa audit tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pengumpulan bukti yang menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan.

Sementara itu, Messier, Glover, dan Prawitt (2021) memandang audit sebagai pemeriksaan independen terhadap informasi yang relevan, yang hasilnya disampaikan dalam bentuk opini profesional kepada pihak yang berkepentingan.

Definisi ini menunjukkan bahwa audit tidak hanya berhenti pada proses pemeriksaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab auditor dalam menyampaikan hasil penilaian secara objektif.

Lain halnya menurut Unga (2024), audit merupakan rangkaian prosedur profesional yang disusun secara terstruktur untuk menilai kesesuaian informasi dengan standar yang berlaku, sehingga dapat memberikan keyakinan atas kualitas informasi yang dihasilkan organisasi Hal ini sejalan dengan pandangan Arens, Elder, dan Beasley (2020) yang menegaskan bahwa audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap informasi yang diuji.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa audit merupakan proses profesional yang tidak hanya menilai angka-angka dalam laporan, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang dihasilkan organisasi dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Audit

Audit tidak hanya dipahami sebagai proses pemeriksaan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas dalam mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang baik. Secara umum, tujuan audit dapat dilihat dari beberapa aspek utama yang saling berkaitan.

Tujuan pertama adalah memberikan *assurance* (keyakinan) kepada pihak-pihak yang menggunakan informasi, seperti manajemen, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Melalui proses audit, pihak-pihak tersebut

memperoleh jaminan bahwa informasi yang disajikan organisasi telah disusun secara wajar dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Tujuan kedua adalah kepatuhan (*compliance*), yaitu memastikan bahwa organisasi telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan, peraturan, serta kebijakan yang berlaku. Aspek ini penting terutama dalam organisasi sektor publik maupun perusahaan yang berada dalam lingkungan regulasi yang ketat.

Tujuan ketiga adalah evaluasi, yaitu menilai sejauh mana sistem, prosedur, dan aktivitas organisasi telah berjalan secara efektif dan efisien. Melalui fungsi ini, audit tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menilai proses yang mendasari tercapainya hasil tersebut.

Sejalan dengan tujuan tersebut, audit juga memiliki beberapa fungsi penting dalam organisasi. Fungsi pertama adalah pengawasan (*monitoring*), yaitu memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan.

Fungsi kedua adalah evaluasi, di mana audit membantu menilai kinerja serta mengidentifikasi kelemahan dalam sistem atau proses organisasi. Fungsi ini menjadi dasar bagi perbaikan di masa mendatang.

Fungsi ketiga adalah korektif, yaitu membantu organisasi memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang ditemukan selama proses audit. Hasil audit sering kali digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembenahan sistem.

Fungsi keempat adalah *preventif*, yaitu mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan melalui penguatan

sistem pengendalian internal. Dengan adanya audit, organisasi diharapkan dapat mengurangi risiko sebelum masalah terjadi.

Fungsi kelima adalah konsultatif, yaitu memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi. Dalam konteks modern, auditor tidak hanya berperan sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan nilai tambah melalui rekomendasi perbaikan.

Dari uraian di atas, tujuan dan fungsi audit menunjukkan bahwa audit memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan, tetapi juga mencakup pemberian keyakinan, pengendalian, evaluasi, serta dukungan terhadap perbaikan berkelanjutan dalam organisasi.

2.1.3 Unsur-Unsur Penting Dalam Audit

Dalam pelaksanaannya, audit memiliki beberapa unsur penting yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam proses audit. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar yang menentukan kualitas serta hasil dari proses audit itu sendiri.

Unsur pertama adalah proses yang sistematis, yaitu audit dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit. Setiap tahap memiliki peran yang berbeda namun saling mendukung untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya alur yang jelas, audit akan kehilangan arah dan sulit memberikan hasil yang konsisten.

Unsur kedua adalah bukti audit, yang menjadi dasar utama dalam setiap kesimpulan auditor. Bukti ini tidak hanya

berupa dokumen, tetapi juga dapat berupa informasi pendukung lain yang relevan dengan objek pemeriksaan. Kualitas bukti sangat menentukan kekuatan opini yang dihasilkan, karena auditor tidak dapat menarik kesimpulan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan. Oleh karena itu, bukti harus cukup, relevan, dan dapat diuji kebenarannya.

Unsur ketiga adalah independensi auditor, yaitu sikap tidak memihak dalam menjalankan proses pemeriksaan. Independensi menjadi prinsip utama dalam audit karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan terhadap hasil audit. Jika auditor tidak independen, maka objektivitas penilaian dapat terganggu dan hasil audit menjadi kurang dapat diandalkan oleh pihak pengguna.

Unsur keempat adalah pelaporan hasil audit, yaitu proses penyampaian hasil pemeriksaan dalam bentuk opini atau laporan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat komunikasi utama antara auditor dan pengguna informasi. Melalui laporan ini, hasil audit dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan maupun perbaikan sistem organisasi.

2.1.4 Karakteristik Audit

Audit memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk pemeriksaan lainnya. Karakteristik ini menjadi dasar yang melekat dalam setiap proses audit, sekaligus menentukan kualitas hasil yang dihasilkan.

Karakteristik pertama adalah bersifat sistematis, yaitu

audit dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terencana dan terstruktur. Setiap langkah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilakukan berdasarkan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang sistematis, proses audit dapat berjalan lebih terarah dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karakteristik kedua adalah independen, yang berarti auditor harus berada dalam posisi bebas dari pengaruh pihak mana pun yang dapat mengganggu objektivitas penilaian. Sikap independen ini sangat penting karena menjadi dasar utama dalam menjaga integritas hasil audit serta membangun kepercayaan pihak pengguna informasi terhadap opini yang diberikan auditor.

Karakteristik ketiga adalah berbasis bukti (*evidence-based*). Dalam hal ini, setiap kesimpulan yang dihasilkan auditor harus didukung oleh bukti yang cukup, relevan, dan dapat diuji kebenarannya. Bukti audit menjadi landasan utama dalam proses penilaian sehingga opini yang diberikan tidak bersifat subjektif, melainkan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga karakteristik tersebut menunjukkan bahwa audit merupakan proses profesional yang tidak dilakukan secara sederhana. Audit menuntut kepatuhan terhadap prinsip, prosedur, dan standar yang berlaku agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat dan dapat dipercaya.

2.1.5 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit mencerminkan area atau bidang yang dapat menjadi objek pemeriksaan dalam suatu organisasi. Seiring dengan perkembangan organisasi modern, ruang lingkup audit juga semakin luas dan tidak hanya terbatas pada aspek keuangan saja.

1. Audit Keuangan

Audit keuangan merupakan jenis audit yang paling dikenal, yaitu pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hasil dari audit ini biasanya berupa opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan.

2. Audit Operasional

Audit operasional berfokus pada penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional organisasi. Audit ini tidak hanya melihat hasil, tetapi juga proses yang dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui audit operasional, organisasi dapat mengetahui apakah sumber daya telah digunakan secara optimal.

3. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan bertujuan untuk menilai apakah organisasi telah mematuhi peraturan, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku. Audit ini sangat penting terutama bagi organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang diatur secara ketat oleh regulasi pemerintah maupun internal perusahaan.

4. Audit Internal dan Eksternal

Audit juga dapat dibedakan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan oleh bagian internal organisasi untuk membantu manajemen dalam mengawasi dan memperbaiki sistem yang ada. Sementara itu, audit eksternal dilakukan oleh pihak independen di luar organisasi untuk memberikan penilaian objektif terhadap laporan atau aktivitas organisasi.

2.1.6 Sejarah dan Perkembangan Audit

Perkembangan audit tidak dapat dilepaskan dari dinamika aktivitas ekonomi dan kebutuhan organisasi dalam mengelola informasi secara lebih transparan dan dapat dipercaya. Seiring waktu, audit mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dari sisi tujuan, ruang lingkup, maupun pendekatan yang digunakan.

1. Era awal audit

Pada tahap awal perkembangannya, audit masih dilakukan dalam bentuk yang sederhana. Aktivitas audit lebih berfokus pada pemeriksaan catatan keuangan untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan pencatatan atau penyalahgunaan dana. Pada masa ini, audit umumnya dilakukan oleh pemilik usaha sendiri atau pihak yang dipercaya secara langsung, sehingga sifatnya masih internal dan belum memiliki standar yang jelas.

Fungsi audit pada era ini lebih menekankan pada pengawasan dasar terhadap pengelolaan keuangan. Belum terdapat pemisahan yang tegas antara auditor dan pihak

yang diaudit, sehingga independensi belum menjadi perhatian utama seperti dalam praktik modern.

2. Perkembangan audit modern

Perkembangan audit modern tidak dapat dilepaskan dari perubahan besar dalam lingkungan bisnis dan ekonomi. Revolusi industri, pertumbuhan perusahaan berskala besar, serta meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis mendorong perubahan mendasar dalam praktik audit. Jika pada masa sebelumnya audit lebih berorientasi pada pemeriksaan rinci transaksi dan pendeteksian kecurangan, maka pada era modern audit berkembang menjadi fungsi yang lebih luas, sistematis, dan profesional (Boynton et al., 2003).

Munculnya perusahaan berbentuk perseroan serta pemisahan antara pemilik modal dan manajemen menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perkembangan audit modern. Pemilik perusahaan yang tidak lagi terlibat langsung dalam operasional membutuhkan pihak independen untuk menilai apakah laporan keuangan yang disusun manajemen telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kebutuhan tersebut melahirkan auditor independen sebagai pihak ketiga yang memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan (Arens et al., 2020).

Pada tahap ini, audit berkembang dari sekadar aktivitas pemeriksaan menjadi profesi yang memiliki standar, prosedur, dan kode etik yang jelas. Auditor tidak hanya bertugas menemukan kesalahan maupun kecurangan, tetapi juga memberikan assurance kepada berbagai

pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya. Dengan demikian, fungsi audit bergeser dari sekadar verifikasi menjadi instrumen untuk meningkatkan kredibilitas informasi keuangan (Messier et al., 2021).

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2020), perkembangan audit modern ditandai oleh meningkatnya penekanan pada independensi, objektivitas, profesionalisme, serta penerapan prosedur audit yang lebih sistematis. Salah satu perkembangan penting adalah penggunaan pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit), di mana auditor memusatkan perhatian pada area yang memiliki risiko salah saji material yang tinggi, sehingga proses audit menjadi lebih efektif dan efisien (Arens et al., 2020; Messier et al., 2021).

Selain itu, audit modern juga berkembang dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap evaluasi sistem pengendalian internal. Auditor tidak hanya berfokus pada kewajaran angka dalam laporan keuangan, tetapi juga menilai efektivitas prosedur, sistem, dan proses bisnis yang mendukung penyusunan informasi keuangan. Perubahan ini menjadikan audit sebagai bagian penting dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik atau good governance (Agoes, 2017).

Perkembangan audit modern juga dipengaruhi oleh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta berbagai skandal korporasi yang mendorong penguatan regulasi dan standar profesi audit. Dalam konteks tersebut, audit tidak lagi hanya dipandang sebagai alat pengawasan, tetapi juga

sebagai mekanisme yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap dunia usaha (Boynton et al., 2003; Arens et al., 2020).

Lebih jauh, audit modern memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang telah diaudit menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam keputusan investasi, kreditur dalam pemberian pembiayaan, serta pemerintah dalam fungsi pengawasan dan regulasi. Dengan demikian, audit modern tidak hanya berfungsi sebagai proses pemeriksaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas serta kepercayaan dalam sistem ekonomi (Messier et al., 2017; Agoes, 2017).

2.2 Standar Audit

2.2.1 Definisi Standar Audit

Standar audit pada hakikatnya menjadi landasan normatif dan teknis yang mengarahkan pelaksanaan audit agar berlangsung secara terstruktur dan berkualitas. Dalam praktik profesional, standar audit menjadi kerangka acuan yang membantu auditor menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit secara sistematis serta bermutu. Standar ini berfungsi sebagai dasar bagi auditor dalam menjalankan setiap tahapan audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit.

Dalam praktiknya, standar audit tidak hanya mengatur bagaimana audit dilakukan, tetapi juga menetapkan kualitas minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor dalam

menghasilkan laporan yang dapat dipercaya. Dengan adanya standar, hasil audit diharapkan memiliki keseragaman, sehingga dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Arens, Elder, dan Beasley (2020) menjelaskan bahwa standar audit merupakan seperangkat aturan yang mengatur tanggung jawab profesional auditor dalam melaksanakan audit secara efektif dan sesuai dengan prinsip yang berlaku.

2.2.2 Fungsi Standar Dalam Audit

Standar audit memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kualitas, konsistensi, dan kredibilitas proses audit. Salah satu fungsi utama standar audit adalah sebagai pedoman kerja auditor dalam melaksanakan setiap tahapan audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan prosedur pemeriksaan, hingga penyusunan dan penyampaian laporan audit. Dengan adanya standar audit, auditor memiliki arah yang jelas dalam menjalankan pekerjaannya sehingga proses audit dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip profesional (Arens et al., 2020).

Selain sebagai pedoman kerja, standar audit berfungsi menjaga kualitas hasil audit. Melalui penerapan standar yang telah ditetapkan, auditor diwajibkan mengikuti prosedur dan prinsip audit yang berlaku sehingga hasil pemeriksaan memiliki tingkat keandalan, objektivitas, dan kredibilitas yang tinggi. Dengan demikian, laporan audit yang dihasilkan dapat memberikan keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Messier et al., 2017).

Fungsi lainnya adalah menjaga konsistensi praktik audit, baik antar auditor maupun antar organisasi. Standar audit menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan prosedur pemeriksaan sehingga proses dan hasil audit dapat dibandingkan, dievaluasi, serta dipahami secara seragam oleh berbagai pihak berkepentingan. Konsistensi ini penting untuk mendukung akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan terhadap profesi audit (Boynton et al., 2003).

Di samping itu, standar audit juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan perlindungan profesi auditor. Standar memberikan batasan yang jelas mengenai tanggung jawab, kewajiban, dan tingkat kehati-hatian profesional yang harus dipenuhi auditor dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya standar, auditor memiliki dasar yang kuat dalam mempertanggungjawabkan pekerjaannya sekaligus memperoleh perlindungan profesional ketika audit dilaksanakan sesuai standar yang berlaku (Agoes, 2017).

Lebih jauh, standar audit juga berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja auditor dan alat untuk menilai apakah suatu audit telah dilaksanakan sesuai ketentuan profesi. Oleh karena itu, standar audit tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga mutu audit, etika profesi, serta kepercayaan publik terhadap hasil audit.

2.2.3 Jenis dan Standar Audit

Standar audit merupakan pedoman yang digunakan auditor dalam melaksanakan proses audit agar berjalan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan prinsip profesional.

Dalam praktiknya, standar audit diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang mengatur aspek berbeda dalam pelaksanaan audit. Pengelompokan ini bertujuan agar setiap tahapan audit, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, memiliki acuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, standar audit dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu standar umum (*general standards*), standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Ketiga jenis standar ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan audit yang berkualitas (Arens et al., 2020).

Klasifikasi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan merupakan pendekatan klasik yang secara historis dikenal dalam *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS). Klasifikasi ini menjadi fondasi awal perkembangan standar audit modern yang kemudian berkembang dan banyak terintegrasi ke dalam struktur *International Standards on Auditing* (ISA). Dengan demikian, pembahasan mengenai tiga kelompok standar tersebut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan menuju kerangka audit internasional yang lebih komprehensif dan berbasis risiko.

Standar umum berkaitan dengan persyaratan pribadi dan profesional yang harus dimiliki auditor dalam menjalankan tugasnya. Standar ini menekankan bahwa audit harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi teknis, independensi, dan kecermatan profesional (*due professional care*). Kompetensi diperlukan agar auditor mampu melaksanakan prosedur audit secara tepat, sedangkan independensi menjadi syarat penting agar penilaian auditor tetap objektif dan bebas dari pengaruh pihak lain (Agoes,

2017).

Jenis kedua adalah standar pekerjaan lapangan, yaitu standar yang berkaitan dengan pelaksanaan proses audit. Standar ini mengatur bahwa audit harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan supervisi yang memadai, serta didukung oleh pemahaman yang cukup atas sistem pengendalian internal klien. Selain itu, auditor juga diwajibkan memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar dalam memberikan opini audit. Standar ini berfungsi memastikan bahwa prosedur audit dilakukan secara sistematis dan hasil pemeriksaan didasarkan pada bukti yang memadai (Messier et al., 2017).

Selanjutnya, standar pelaporan berkaitan dengan penyusunan dan penyampaian laporan audit. Standar ini mengatur bahwa auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, mengungkapkan konsistensi penerapan prinsip akuntansi, serta memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Melalui standar pelaporan, hasil audit disajikan secara jelas, transparan, dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan (Boynton et al., 2003).

Dalam perkembangan profesi, jenis-jenis standar audit juga mengalami penyesuaian seiring perubahan regulasi dan kompleksitas lingkungan bisnis. Saat ini standar audit tidak hanya mencakup audit laporan keuangan, tetapi juga berkembang pada standar audit internal, audit kepatuhan, audit operasional, hingga standar audit berbasis teknologi dan risiko. Perkembangan ini menunjukkan bahwa standar audit terus beradaptasi untuk menjawab tuntutan profesionalisme,

akuntabilitas, dan kualitas audit yang semakin tinggi.

Dilihat dari uraian di atas, jenis-jenis standar audit pada dasarnya merupakan seperangkat pedoman yang mengatur kompetensi auditor, pelaksanaan prosedur audit, serta pelaporan hasil audit. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam menghasilkan audit yang berkualitas dan dapat dipercaya.

2.2.4 International Standards on Auditing (ISA)

International Standards on Auditing (ISA) merupakan seperangkat standar audit internasional yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Standar ini dikembangkan untuk memastikan bahwa proses audit yang dilakukan di berbagai negara memiliki kualitas, pendekatan, dan prinsip yang relatif seragam. Dengan adanya ISA, praktik audit tidak hanya menjadi lebih konsisten, tetapi juga meningkatkan kredibilitas hasil audit sehingga dapat dipahami dan dipercaya oleh pengguna laporan keuangan dalam konteks global (Arens et al., 2020).

Keberadaan ISA menjadi semakin penting seiring berkembangnya aktivitas bisnis lintas negara, meningkatnya investasi internasional, dan kompleksitas transaksi global. Dalam kondisi tersebut, diperlukan suatu standar bersama yang mampu menjembatani perbedaan praktik audit di berbagai yurisdiksi sekaligus mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan internasional (Messier et al., 2017).

1. Peran IAASB

International Standards on Auditing dikembangkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board*, yaitu badan penyusun standar di bawah *International Federation of Accountants*. IAASB memiliki peran utama dalam menyusun, memperbarui, dan mengembangkan standar audit internasional agar tetap relevan terhadap perkembangan lingkungan bisnis, teknologi, serta risiko audit yang terus berubah.

Peran IAASB tidak hanya terbatas pada penyusunan standar, tetapi juga mendorong penerapan standar secara konsisten oleh auditor di berbagai negara. Melalui fungsi tersebut, IAASB berkontribusi dalam meningkatkan kualitas audit global, memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi auditor, serta mendukung harmonisasi praktik audit internasional (IAASB, 2022).

Selain itu, IAASB juga berperan merespons isu-isu baru dalam profesi audit, seperti audit berbasis risiko, penggunaan teknologi dalam audit, serta peningkatan kualitas pelaporan auditor. Dengan demikian, keberadaan IAASB menjadi elemen penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas standar audit internasional.

2. Struktur ISA

ISA disusun secara sistematis ke dalam beberapa kelompok standar yang mengatur berbagai aspek dalam proses audit. Struktur ini dibuat agar auditor memiliki pedoman yang jelas dalam setiap tahapan audit, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil audit.

Secara umum, struktur ISA terdiri atas beberapa kelompok

utama, yaitu:

- a. ISA 200–299 (*General Principles and Responsibilities*)
Kelompok ISA seri 200 menitikberatkan pada prinsip umum, tanggung jawab auditor, etika profesi, dan tujuan audit independent.
- b. ISA 300–499 (*Risk Assessment and Responses to Assessed Risks*)
Kelompok ini mengatur perencanaan audit, identifikasi dan penilaian risiko salah saji material, materialitas, serta respons auditor terhadap risiko yang ditemukan.
- c. ISA 500–599 (*Audit Evidence*)
Kelompok ini berkaitan dengan pengumpulan dan evaluasi bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pembentukan opini auditor.
- d. ISA 600–699 (*Using the Work of Others*)
Kelompok ini mengatur penggunaan pekerjaan auditor lain, auditor internal, dan ahli eksternal dalam proses audit.
- e. ISA 700–799 (*Audit Conclusions and Reporting*)
Kelompok ini mengatur pembentukan opini auditor serta penyusunan dan penyampaian laporan audit.
- f. ISA 800–899 (*Specialized Areas*)
Kelompok ini mengatur audit pada penugasan khusus, seperti audit dengan tujuan khusus dan pertimbangan audit lainnya.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa *International Standards on Auditing* (ISA) dirancang secara komprehensif untuk mencakup seluruh tahapan audit secara terintegrasi,

sehingga proses audit dapat dilakukan secara sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional (Arens et al., 2020).

3. Prinsip Dasar ISA

ISA dibangun atas sejumlah prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan audit. Salah satu prinsip utama adalah independensi, yaitu auditor harus bebas dari pengaruh pihak lain dalam memberikan penilaian dan opini audit. Independensi merupakan syarat mendasar agar hasil audit tetap objektif dan dapat dipercaya.

Prinsip berikutnya adalah skeptisisme profesional (*professional skepticism*), yaitu sikap kritis dan selalu mempertanyakan bukti audit yang diperoleh. Auditor tidak cukup hanya menerima informasi yang diberikan manajemen, tetapi harus melakukan evaluasi secara cermat terhadap kemungkinan adanya salah saji, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan (Messier et al., 2017).

Prinsip lainnya adalah penggunaan bukti audit yang cukup dan tepat (*sufficient and appropriate audit evidence*). Setiap kesimpulan dan opini auditor harus didukung oleh bukti yang memadai, relevan, dan andal. Prinsip ini penting karena kualitas opini audit sangat bergantung pada kualitas bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

Selain itu, ISA juga menekankan penggunaan pertimbangan profesional (*professional judgment*) dalam pelaksanaan audit. Auditor dituntut menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan penilaian profesional dalam mengambil keputusan audit pada berbagai kondisi yang kompleks.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar internasional serta menghasilkan opini yang kredibel, objektif, dan dapat diandalkan.

2.2.5 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan seperangkat standar yang menjadi pedoman bagi akuntan publik dalam melaksanakan jasa profesional, khususnya audit atas laporan keuangan. SPAP disusun untuk memastikan bahwa setiap penugasan audit dilakukan secara sistematis, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip profesional yang berlaku. Melalui penerapan SPAP, auditor memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan tanggung jawabnya sehingga hasil audit dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan.

Di Indonesia, SPAP memiliki peran penting sebagai landasan normatif dan teknis dalam praktik audit. Keberadaan standar ini tidak hanya bertujuan menjamin mutu pelaksanaan audit, tetapi juga mendukung akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas profesi akuntan publik. Seiring perkembangan lingkungan bisnis dan regulasi, SPAP terus mengalami pembaruan agar selaras dengan perkembangan standar audit internasional (Agoes, 2017).

1. Pengertian SPAP

SPAP adalah standar yang mengatur prosedur, prinsip, dan tanggung jawab profesional yang harus dipatuhi akuntan publik dalam melaksanakan penugasan. Standar ini diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai pedoman resmi bagi profesi akuntan publik di Indonesia.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, SPAP menjadi dasar dalam memastikan bahwa jasa audit dilaksanakan sesuai standar profesional, kode etik, dan prinsip kehati-hatian profesional. Dengan demikian, SPAP berfungsi sebagai pedoman teknis sekaligus instrumen pengendalian mutu dalam profesi audit.

2. Struktur SPAP

SPAP terdiri atas beberapa standar yang mengatur berbagai jenis jasa profesional akuntan publik. Dalam perkembangannya, khusus untuk audit laporan keuangan, SPAP di Indonesia telah mengadopsi dan mengonvergensi banyak ketentuan dari International Standards on Auditing (ISA), yang dikenal sebagai Standar Audit (SA).

Secara umum, struktur SPAP meliputi:

a. Standar Audit (SA)

Standar ini mengatur pelaksanaan audit atas laporan keuangan, mulai dari tanggung jawab auditor, perencanaan audit, pengumpulan bukti audit, hingga pelaporan auditor.

b. Standar Perikatan Review (SPR)

Standar ini mengatur penugasan review atas informasi keuangan historis yang memberikan tingkat keyakinan terbatas.

c. Standar Perikatan Asurans Lainnya (SPAL)

Standar ini mengatur penugasan asurans selain audit dan review, seperti assurance atas laporan keberlanjutan atau pengendalian internal.

d. Standar Jasa Terkait (SJT)

Standar ini mengatur jasa terkait seperti prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*) dan kompilasi laporan keuangan.

Struktur ini menunjukkan bahwa SPAP tidak hanya berfokus pada audit laporan keuangan, tetapi mencakup berbagai jasa profesional yang dilakukan akuntan publik (IAPI, 2021).

3. Hubungan SPAP dengan ISA

SPAP di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan ISA karena sebagian besar Standar Audit dalam SPAP telah mengadopsi prinsip dan struktur ISA. Konvergensi ini dilakukan agar praktik audit di Indonesia sejalan dengan praktik internasional, sehingga kualitas audit nasional dapat memenuhi standar global.

Adopsi ISA dalam SPAP juga mendukung harmonisasi praktik audit, terutama dalam menghadapi tuntutan globalisasi, investasi internasional, dan kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dipercaya lintas yurisdiksi. Dengan adanya konvergensi tersebut, auditor di Indonesia menjalankan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang setara dengan praktik internasional (Arens et al., 2020).

Namun demikian, SPAP tetap menyesuaikan penerapannya dengan lingkungan hukum, regulasi, dan kebutuhan profesi di Indonesia. Oleh karena itu, SPAP dapat dipahami sebagai standar nasional yang berorientasi internasional, tetapi tetap relevan dengan konteks domestik.

4. Fungsi SPAP

SPAP memiliki beberapa fungsi penting dalam praktik audit. Pertama, sebagai panduan kerja auditor agar setiap penugasan dilaksanakan secara sistematis dan sesuai standar profesi. Kedua, sebagai alat untuk menjaga kualitas dan konsistensi praktik audit. Ketiga, sebagai dasar evaluasi kinerja auditor serta perlindungan profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Selain itu, SPAP juga berfungsi meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil audit, karena opini auditor diberikan berdasarkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, SPAP menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas, integritas, dan kredibilitas profesi akuntan publik.

5. Implementasi di Indonesia

Dalam praktiknya, penerapan standar audit di Indonesia mengacu pada SPAP yang telah banyak mengadopsi dan dikonvergensi dengan International Standards on Auditing (ISA). Penyesuaian ini dilakukan agar praktik audit di Indonesia tetap sejalan dengan perkembangan internasional tanpa mengabaikan kondisi hukum, regulasi, dan kebutuhan nasional.

Auditor di Indonesia, baik yang bekerja di kantor akuntan publik, sektor pemerintahan, maupun organisasi lainnya, diwajibkan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam SPAP. Penerapan tersebut bertujuan agar hasil audit memiliki kualitas yang konsisten, dapat dipercaya, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak (Arens et al., 2020).

Meskipun demikian, implementasi standar audit di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan tingkat pemahaman auditor terhadap standar, kompleksitas aktivitas organisasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya risiko audit menjadi faktor yang memengaruhi penerapan standar di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor, pelatihan berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi hal yang sangat penting agar standar audit dapat diterapkan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas bahwa, implementasi standar audit di Indonesia tidak hanya bergantung pada keberadaan standar itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan profesi auditor dalam memahami, menerapkan, dan menyesuaikan standar tersebut terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang.

2.2.6 Prinsip-Prinsip Dasar Standar Audit

Prinsip-prinsip dasar audit merupakan landasan fundamental yang menjadi pedoman bagi auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi agar proses audit mampu menghasilkan pemeriksaan yang objektif, andal, dan dapat dipercaya. Dalam praktik audit modern, prinsip-prinsip tersebut berkembang melalui integrasi antara standar profesional, kode etik profesi, dan perkembangan pemikiran akademik di bidang auditing.

Secara konseptual, prinsip-prinsip dasar audit mencakup

independensi, integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian profesional (*due professional care*), kerahasiaan, skeptisisme profesional, serta pendekatan berbasis risiko. Prinsip-prinsip ini dirumuskan dan diperkuat dalam berbagai standar profesional, termasuk International Auditing and Assurance Standards Board, International Ethics Standards Board for Accountants, serta berbagai literatur auditing seperti Alvin A. Arens dkk. (2020) dan Messier dkk. (2021).

Keberadaan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan bahwa seluruh tahapan audit dilaksanakan secara sistematis, profesional, dan sesuai standar yang berlaku. Prinsip-prinsip ini menjaga konsistensi, kualitas, dan integritas audit mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi temuan, hingga penyusunan laporan audit. Tanpa prinsip yang kuat, audit berpotensi kehilangan objektivitas dan tidak mampu menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain menjadi pedoman internal auditor, prinsip dasar audit juga berperan dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap hasil audit. Laporan audit yang disusun berdasarkan prinsip yang benar akan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun kebijakan organisasi. Dengan demikian, prinsip audit tidak hanya memiliki dimensi teknis, tetapi juga implikasi yang luas terhadap tata kelola dan kepercayaan publik.

1. Independensi

Dalam praktik auditing, independensi dipandang sebagai prasyarat utama yang menentukan reliabilitas opini auditor, karena menjadi penentu utama tingkat kepercayaan terhadap hasil audit. Auditor dituntut bebas dari segala bentuk pengaruh, baik finansial, personal, maupun organisasi, yang dapat mengganggu objektivitas penilaian profesionalnya. Tanpa independensi, fungsi audit sebagai mekanisme penilaian yang objektif menjadi lemah

Independensi mencakup independensi dalam fakta (*independence in fact*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Independensi dalam fakta mengharuskan auditor benar-benar bebas dari konflik kepentingan, sedangkan independensi dalam penampilan menuntut auditor menghindari situasi yang dapat menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitasnya (Arens et al., 2020).

Dalam ISA 200, independensi menjadi prasyarat utama bagi auditor untuk memberikan opini yang tidak bias dan andal. Oleh karena itu, independensi menjadi fondasi utama reputasi profesi auditor dan kualitas audit secara keseluruhan.

2. Integritas

Integritas mencerminkan komitmen auditor terhadap kejujuran, transparansi, dan konsistensi moral dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Prinsip ini menuntut auditor menyampaikan informasi secara apa adanya tanpa manipulasi, penyembunyian, ataupun pengaburan fakta yang relevan.

Dalam praktik audit, integritas juga mencakup keberanian auditor mengungkapkan temuan secara objektif meskipun berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi pihak tertentu. Karena itu, integritas tidak hanya menjadi nilai etis, tetapi juga dasar kredibilitas hasil audit (Arens et al., 2020).

Auditor yang memiliki integritas tinggi akan tetap berpegang pada standar profesional meskipun menghadapi tekanan dari manajemen, klien, maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap hasil audit.

3. Objektivitas

Objektivitas merupakan prinsip yang menuntut auditor bersikap netral dan tidak memihak dalam setiap penilaian profesional. Setiap analisis, kesimpulan, dan opini audit harus didasarkan pada bukti yang relevan dan memadai, bukan pada opini pribadi maupun tekanan eksternal.

Objektivitas sangat penting karena audit pada dasarnya melibatkan penggunaan pertimbangan profesional (*professional judgment*). Auditor sering dihadapkan pada situasi kompleks yang menuntut penilaian atas bukti, risiko, dan konsekuensi keputusan audit. Oleh karena itu, objektivitas menjadi prinsip yang menjaga agar penilaian tersebut tetap adil dan tidak bias (Messier et al., 2021).

Objektivitas memiliki hubungan erat dengan independensi. Independensi menciptakan kondisi bagi auditor untuk bersikap objektif, sedangkan objektivitas tercermin dalam penerapan penilaian profesional yang tidak memihak.

4. Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan auditor dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman secara tepat dalam melaksanakan audit. Kompetensi ini mencakup penguasaan akuntansi, auditing, pengendalian internal, teknologi informasi, serta regulasi yang relevan.

Dalam audit modern, kompetensi profesional harus diimbangi dengan penerapan *due professional care*, yaitu sikap teliti, cermat, dan penuh kehati-hatian dalam setiap tahapan audit. Auditor dituntut tidak bekerja secara sembarangan, tetapi melakukan prosedur audit dengan pertimbangan profesional yang matang (IAASB, 2022).

Kombinasi kompetensi dan kehati-hatian profesional menjadi penentu kualitas audit, karena pengetahuan tanpa ketelitian dapat menimbulkan kesalahan, sedangkan kehati-hatian tanpa kompetensi tidak akan menghasilkan audit yang efektif.

5. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan prinsip etika yang mewajibkan auditor menjaga seluruh informasi yang diperoleh selama proses audit dan tidak mengungkapkannya kepada pihak yang tidak berwenang. Informasi audit umumnya bersifat sensitif dan strategis sehingga harus dijaga sebagai bentuk tanggung jawab profesional.

Prinsip kerahasiaan penting untuk membangun hubungan profesional yang dilandasi kepercayaan antara auditor dan klien. Jika kepercayaan tersebut terganggu, efektivitas audit dapat menurun karena keterbukaan informasi menjadi

terbatas (Arens et al., 2020).

Meskipun demikian, kerahasiaan tidak bersifat mutlak, karena dalam kondisi tertentu auditor dapat diwajibkan mengungkapkan informasi berdasarkan ketentuan hukum atau kepentingan publik.

6. Skeptisisme Profesional

Skeptisisme profesional merupakan sikap kritis dan selalu mempertanyakan yang harus dimiliki auditor dalam mengevaluasi bukti audit. Auditor tidak boleh menerima informasi begitu saja, tetapi harus selalu mempertimbangkan kemungkinan adanya salah saji akibat kesalahan maupun kecurangan.

Dalam audit modern, skeptisisme profesional menjadi prinsip yang sangat penting karena auditor menghadapi informasi yang kompleks, estimasi subjektif, dan potensi bias manajemen. Oleh karena itu, auditor dituntut selalu waspada terhadap kondisi yang menunjukkan risiko salah saji material (IAASB, 2022).

Menurut Messier dkk. (2021), skeptisisme profesional berperan penting dalam meningkatkan kualitas pertimbangan auditor dan efektivitas prosedur audit. Prinsip ini menjadikan auditor tidak hanya bekerja berdasarkan prosedur, tetapi juga menggunakan pola pikir kritis dalam menilai kebenaran informasi.

7. Pendekatan Berbasis Risiko

Pendekatan berbasis risiko (*risk-based audit approach*) merupakan prinsip audit modern yang menekankan bahwa audit harus difokuskan pada area yang memiliki risiko salah saji material paling tinggi. Melalui pendekatan ini, auditor

mengalokasikan perhatian dan prosedur pemeriksaan secara lebih efektif berdasarkan tingkat risiko yang diidentifikasi.

Pendekatan ini memungkinkan audit dilakukan secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan, karena fokus audit diarahkan pada area yang paling signifikan bagi organisasi dan pengguna laporan keuangan (Arens et al., 2020; Messier et al., 2021).

Dalam praktik audit modern, pendekatan berbasis risiko menjadi prinsip penting karena lingkungan bisnis yang semakin kompleks menuntut auditor tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada penilaian strategis terhadap risiko-risiko yang dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Kesimpulannya, prinsip-prinsip dasar audit merupakan fondasi moral, etis, dan profesional yang menentukan kualitas seluruh proses audit. Audit yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketepatan prosedur, tetapi juga oleh sejauh mana auditor memegang teguh prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusan profesional yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik* (5th ed.). Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2020). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (17th ed.). Pearson.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2003). *Modern auditing* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO.
- DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. *Journal of Accounting and Economics*, 58(2–3), 275–326. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.002>
- Gramling, A. A., Maletta, M. J., Schneider, A., & Church, B. K. (2012). *Internal auditing: Assurance and consulting services*. Institute of Internal Auditors.
- Hay, D. (2020). *The future of auditing*. Routledge.
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2017). *Principles of auditing: An introduction to international standards on auditing* (3rd ed.). Pearson.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (2022). *Handbook of international quality management, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements*. International Federation of Accountants.
- International Ethics Standards Board for Accountants. (2022). *Handbook of the international code of ethics for*

professional accountants. International Federation of Accountants.

Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar profesional akuntan publik*. IAPI.

Knechel, W. R., & Salterio, S. E. (2016). *Auditing: Assurance and risk* (4th ed.). Routledge.

Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2021). *Auditing and assurance services: A systematic approach* (11th ed.). McGraw-Hill.

Power, M. (1997). *The audit society: Rituals of verification*. Oxford University Press.

Unga, W. H. (2024). *Pengantar auditing: Peran auditor dalam organisasi*. Gita Lentera

BAB 3

PERENCANAAN AUDIT

Oleh : Richad Alamsyah

SE.,M.Ak.,CSA[®],CRMO[®],CFP[®],CRMP[®],QLP[®] AAAIK, AEPP

3.1 Pendahuluan

Pada umumnya auditor membuat perencanaan audit guna memastikan pelaksanaan audit dapat berjalan dengan optimal. Perencanaan audit berkaitan dengan melakukan penetapan strategi audit mencakup atas penugasan dan pengembangan rencana audit, yang berkaitan, terutama prosedur penilaian risiko yang sesuai rencana dan respons yang disiapkan terhadap risiko salah saji material. Perencanaan bukanlah fase terpisah dari audit, melainkan proses berkelanjutan dan berulang yang mungkin dimulai dengan setelah audit selesai sebelumnya serta berlanjut hingga penyelesaian audit.

3.2 Perencanaan Audit

Perencanaan audit atau audit *planning* adalah tahapan yang krusial untuk seorang auditor ketika proses pelaksanaan audit, tidak melihat audit keuangan, audit khusus (dengan tujuan tertentu), atau audit kinerja (Evayanti et al., 2021).

Perencanaan audit menurut beberapa ahli mengemukakan antara lain :

1. Menurut Arens et al., (2017) perencanaan audit adalah tahap awal dalam proses audit yang melibatkan

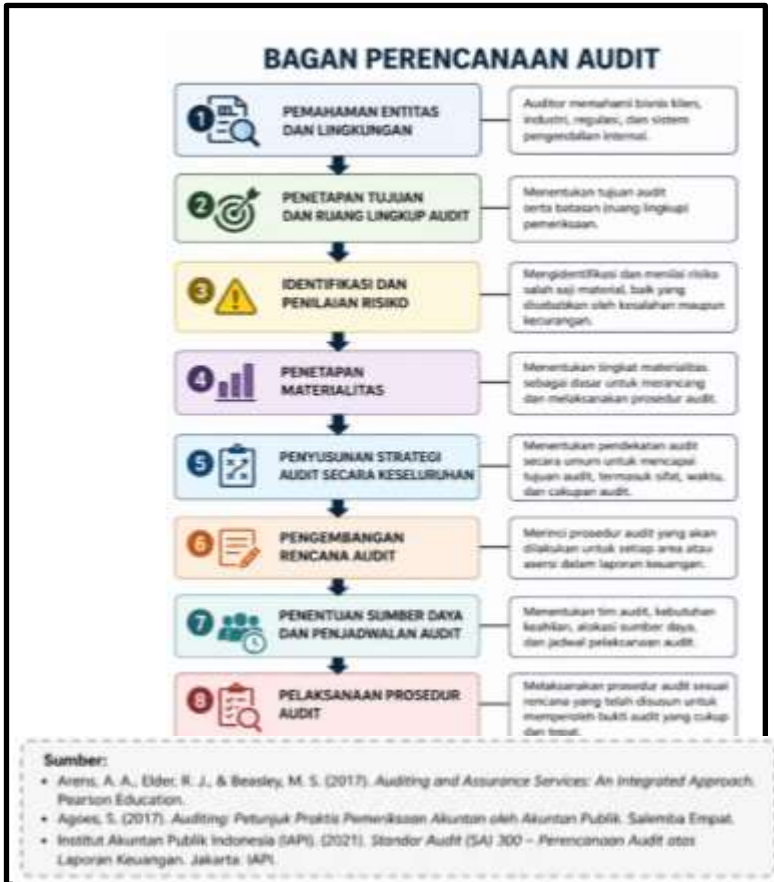
pengembangan strategi audit secara keseluruhan serta penentuan pendekatan audit yang benar dalam meminimalkan risiko audit pada tingkat yang dapat diterima.

2. Menurut Sukrisno Agoes (2017) perencanaan audit adalah kegiatan awal auditor dalam menentukan ruang lingkup audit, waktu pelaksanaan, serta sumber daya yang dibutuhkan dalam perolehan dokumen- dokumen pendukung audit yang benar.
3. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit (SA) 300 – Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan (2021) perencanaan audit didefinisikan sebagai perencanaan audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan audit dan pengembangan rencana audit, guna mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima dan agar audit dapat dilaksanakan secara efektif.

Secara umum, definisi dari perencanaan audit adalah tahap awal dan penting dalam proses audit yang bertujuan untuk menyusun strategi audit secara lengkap, menentukan wilayah kerja, jadwal, serta penyebaran sumber daya yang digunakan dalam audit. Perencanaan ini bertujuan menentukan cara audit yang baik untuk menurunkan nilai risiko audit sampai tahapan yang bisa diterima, serta memastikan proses audit berjalan dengan baik dan hemat waktu, sehingga auditor bisa mendapatkan bukti yang mempunyai dan baik sebagai awal dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Perencanaan audit yang berkaitan dengan

rancangan strategi, implementasi dengan tujuan audit yang telah di tetapkan. Keduanya hal yang direncanakan pada proses audit yang baik, tahapan audit di sektor publi pada umumnya dapat mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat, pergeseran kondisi lingkungan di tempat audit dikerjakan, serta keperluan berbagai pihak yang terlibat dalam tatanan demokrasi, semuanya pada kerangka kebebasan.

Pada tahapan rencana audit didefinisikan sebagai tahapan yang sangat penting dalam proses audit. Rencana audit yang baik dan matang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan audit. Rencana audit yang sesuai sangat penting untuk mendapatkan dokumen-dokumen audit yang cukup dan mempuni, yang mendukung hasil laporan audit.



Gambar 3.1 Tahapan Perencanaan Audit

Tahapan perencanaan audit yang terjadi secara umum pada sektor publik, terdapat beberapa tahapan antara lain :

1. Pemahaman Entitas dan Lingkungan

Perencanaan audit dimulai dengan memahami lebih lanjut tentang entitas dan lingkungannya, seperti ciri khas bisnis, industri yang dijalani, kondisi ekonomi, aturan yang berlaku, serta sistem pengendalian internal yang ada. Tahap ini

penting agar auditor bisa mengenali bagian-bagian yang mungkin menyebabkan risiko kesalahan laporan keuangan yang signifikan

2. Penetapan Tujuan Audit dan Ruang Lingkup Audit

Penetapan tujuan dan batas ruang lingkup audit di sektor publik sangat bergantung pada perintah yang diberikan oleh lembaga audit tersebut. Audit keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal biasanya bertujuan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan tersebut masuk akal dan memberikan pendapat mengenai laporan tersebut. Sementara itu, audit yang dilakukan oleh pengawas terutama fokus pada memberikan saran untuk memperbaiki sistem kontrol internal dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam menentukan tujuan dan ruang lingkup, auditor harus memastikan bahwa tujuan serta ruang lingkup audit yang ditetapkan sesuai dengan mandat dan wewenang dari lembaga audit dan pengawas yang terkait. Dalam konteks audit terhadap laporan keuangan instansi pemerintahan (sektor publik), pengawas memiliki kewenangan:

- a. Melakukan review atas sistem akuntansi dan pengendalian internal, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahannya;
- b. Melakukan pengujian dan koreksi atas kesalahan pencatatan akuntansi, sehingga laporan keuangan dihasilkan dengan informasi yang dapat diandalkan.

Tujuan audit dalam lingkup yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami batas-batas yang berlaku dalam pekerjaan audit;
- b. Untuk mengetahui hak dan kewenangan yang dimiliki dalam melakukan audit;
- c. Untuk memastikan pengawasan telah memenuhi aturan dengan hukum yang berlaku;
- d. Untuk memastikan jika pendekatan audit yang telah dirancang sesuai dengan kebijakan audit yang telah ditetapkan;
- e. Untuk menetapkan bahwa audit yang dituju sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku;
- f. Untuk mengetahui pihak-pihak yang berhak menerima laporan hasil audit.

3. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Pada tahap ini, auditor mengenali dan mengevaluasi risiko kesalahan material, baik yang muncul dari kesalahan manusia maupun dari tindakan tidak jujur. Penilaian risiko digunakan untuk menentukan fokus audit. Menurut Boynton (2014), pendekatan audit terbaru lebih menekankan pada audit yang berbasis risiko agar sumber daya yang dimiliki auditor digunakan dengan lebih efisien. Adapun faktor yang berkaitan dengan salah saji dalam pendekatan material, yaitu:

- a. Karakteristik manajemen
 - 1) Pendekatan penelitian menunjukkan peran penting satu orang ketika dalam pengambilan keputusan baik operasional maupun pendanaan;
 - 2) Sikap agile manajemen dalam hal pelaporan keuangan;

- 3) perpindahan manajemen level atas yang sangat tinggi;
 - 4) Dalam upaya pencapaian laba melalui tekanan yang tidak sepatutnya dari manajemen;
 - 5) Nama baik manajemen yang kurang baik dalam industry.
- b. Karakteristik industri dan operasi
- 1) Keberhasilan menghasilkan laba milik entitas dibandingkan industri tidaklah stabil;
 - 2) Perkembangan yang terlalu cepat dalam industri dimana entitas berada;
 - 3) Perkembangan industri terjadi penurunan dikarenakan banyaknya perusahaan dalam industri tersebut terjadi kerugian;
 - 4) *Going concern* diragukan karena banyaknya terjadi masalah eksternal dan internal.
- c. Karakteristik perikatan
- 1) Terjadi fenomena permasalahan khususnya di keuangan dan akuntansi yang tidak terselesaikan;
 - 2) Terjadinya transaksi ataupun temuan atas saldo yang tidak teridentifikasi;
 - 3) Terjadinya transaksi yang dapat dikalsifikasikan tidak wajar dan teridentifikasi berawal dari hubungan istimewa
 - 4) Temuan dari laporan audit sebelumnya, terdapat banyak ditemukan salah saji yang material;
 - 5) Tidak terdapat informasi yang cukup dari auditor sebelumnya;

6) Kegiatan audit ini adalah kegiatan pertama kali oleh klien menyebabkan informasi permanen dari laporan audit terdahulu tidak ditemukan.

4. Penetapan Materialitas

Auditor Auditor menentukan tingkat materialitas sebagai acuan dalam merencanakan dan mengevaluasi hasil audit. Materialitas membantu auditor mengetahui apakah suatu kesalahan penyajian bisa memengaruhi keputusan orang yang menggunakan laporan keuangan. Pertimbangan awal terhadap tingkat materialitas dalam rangka kegiatan pemeriksaan. Kemungkinan jika saat implementasi pemeriksaan didapatkan salah saji, peneliti berhak menentukan apakah kesalahan tersebut material atau tidak, guna mendukung opini audit. Menurut Mulyadi (2014), materialitas adalah konsep penting yang sangat terkait dengan risiko audit serta perencanaan prosedur yang dilakukan dalam audit

5. Penyusunan Strategi Audit Secara Menyeluruh

Strategi audit secara menyeluruh disusun guna menetapkan pendekatan yang akan digunakan dalam audit, termasuk fokus pada area yang memiliki risiko tinggi, penerapan pengujian pengendalian atau prosedur substantif, serta penentuan sifat, waktu, dan cakupan audit. Strategi audit awal dilakukan agar auditor dalam merencanakan audit dapat meminimalkan risiko sampai tahapan yang paling dasar, oleh karena nya, bukti yang didapatkan dapat mendukung pendapat audit yang diberikan, yaitu jika dalam semua hal yang utama, asersi dalam menyajikan laporan keuangan adalah wajar.

Disamping itu, juga dalam menetapkan area mana yang membutuhkan usaha lebih dari tim perikatan. Ini sesuai dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 300, yang menyatakan bahwa strategi audit bertujuan untuk menurunkan risiko audit sampai pada tahapan yang dapat diterima.

6. Pengembangan Rencana Audit

Rencana audit dibuat secara rinci untuk menjelaskan prosedur audit yang akan dilaksanakan dalam mengevaluasi setiap akun atau asersi dalam laporan keuangan. Rencana ini berfungsi sebagai panduan kerja untuk auditor saat melakukan audit di lapangan. Selanjutnya, dalam menyusun perencanaan audit, perlu memperhatikan berbagai hal yang dapat memengaruhi proses pemeriksaan Laporan Keuangan serta dapat memengaruhi pendapat auditor, yaitu:

- a. Masalah yang mungkin terkait dan memengaruhi operasi bisnis serta sektor industri. Ini perlu dipertimbangkan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup usaha entitas tersebut;
- b. Kebijakan dan prosedur akuntansi perusahaan tersebut. Dengan mengerti aturan dan cara kerja akuntansi, seorang auditor bisa menjelaskan setiap pertanyaan "mengapa dicatat seperti itu";
- c. Cara yang diperoleh untuk mendapatkan informasi akuntansi yang terjadi oleh kegiatan ekonomi dari suatu perusahaan. Konsistensi dalam pembukuan dan perlakuan akuntansi terhadap setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Level risiko pengendalian yang disusun. Perencanaan memungkinkan terjadinya risiko audit yang rendah;
 - e. Pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dalam rangka melakukan audit. Memungkinkan saat melakukan audit, jika ditemukan kesalahan, maka dapat langsung ditentukan apakah kesalahan tersebut signifikan atau tidak, sehingga membantu dalam memberikan pendapat audit;
 - f. Pos laporan keuangan yang memungkinkan membutuhkan penyesuaian. Semisal biaya-biaya dan pendapatan. Serta, akun diterima atau dibayar dimuka. Membutuhkan dilakukannya identifikasi khusus dan penelaahan tersendiri;
 - g. Situasi yang kemungkinan membutuhkan penambahan atau perubahan dalam pemeriksaan audit, misalnya adanya risiko kesalahan atau pelanggaran yang signifikan, atau terdapat transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - h. Karakter laporan auditor yang diinginkan akan diberikan (misalnya, laporan auditor mengenai laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang dikirimkan ke regulator, serta laporan khusus yang menjelaskan sejauh mana klien memenuhi ketentuan dalam perjanjian).
7. Penentuan Sumber Daya dan Penjadwalan Audit

Auditor menentukan jumlah anggota tim audit, keahlian yang dibutuhkan, alokasi waktu, serta jadwal pelaksanaan audit. Pengaturan sumber daya yang tepat bertujuan untuk memastikan audit dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar profesional. Penetapan tenaga kerja yang

diperlukan untuk pelaksanaan audit antara lain:

- a. Jumlah dan tingkat pengalaman staf audit yang diperlukan haruslah didasarkan pada evaluasi sifat dan tingkat kesulitan dari tugas audit, batas waktu penyelesaian, dan tenaga yang tersedia;
- b. Pengetahuan, kecakapan, dan disiplin ilmudari staf audit haruslah dipertimbangkan dalam pemilihan auditor yang akan ditugaskan;
- c. Latihan yang dibutuhkan oleh para auditor harus pula dipertimbangkan karena tiap – tiap tugas audit akan berfungsi sebagai dasar tercapainya perkembanganyang dibutuhkan oleh bagian audit internal;
- d. Pertimbangan penggunaan tenaga eksternal apabila terdapat kebutuhan akan pengetahuan, kecakapan, dan disiplin ilmu tambahan.

8. Pelaksanaan Prosedur Audit

Tahapan terakhir pada proses merencanakan audit adalah melakukan prosedur audit sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Auditor mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk membuat kesimpulan serta memberikan pendapat atas laporan keuangan. Dalam melakukan audit, ada beberapa tipe yang perlu diketahui. Tahapan proses tersebut tergantung pada permasalahan dan klaim yang diperiksa, auditor dapat melakukan proses penggantian dalam menetapkan yang paling baik dan benar. Didapati berbagai macam tahapan audit yang bisa dilakukan oleh seorang auditor, di antaranya:

a. Inspeksi

Penyelidikan adalah dimana tahapan proses audit yang biasanya dilakukan. pada tahapan ini, auditor akan memverifikasi setiap kegiatan atas transaksi atau dokumen terhadap tahap-tahapan tertulis, juga prosedur untuk meyakinkan keakuratan. Tahapan ini juga bisa menentukan keterkaitan antara data keuangan dan non-keuangan. Umumnya auditor biasanya akan menggunakan penilaian mereka untuk menetapkan apakah ada perbedaan, yang mana nantinya dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut. Auditor biasanya menemukan informasi yang tidak konsisten yang terdapat dalam laporan keuangan entitas. Setelah melakukan penelusuran ketidak konsistenan, auditor dapat menelusuri lebih lanjut. Penelusuran lebih lanjut akan melibatkan manajemen dan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas laporan tersebut.

b. Pengamatan

Pengamatan atau observasi adalah tahapan dalam audit dimana auditor mengamati proses dan tahapan yang di implementasikan oleh klien. Pengamatan dapat menyajikan gambaran pada auditor terhadap proses dan tahapan entitas dalam bekerja. Selain itu, juga bisa mendukung mereka dalam menemukan kelemahan dari tahapan tersebut. Namun, perlu diingat jika keberadaan dari seorang auditor mungkin dapat berdampak pada proses operasional. Sama seperti prosedur audit lainnya, auditor perlu menggabungkan obeservasi dengan jenis lainnya untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Tahapan

pengamatan memiliki peranan penting dalam evaluasi akhir tahun entitas. Umumnya, entitas akan menilai inventaris dan kas untuk memperbaiki catatan pada akhir tahun. Kehadiran auditor dalam proses tersebut untuk memperoleh bukti bahwa penilaian dilakukan dengan efektif. Dalam proses pengamatan ini memberikan bukti audit yang lebih baik dalam menilai saldo kas dan persediaan perusahaan.

c. Konfirmasi

Sebagaimana dengan jenis penelusuran, konfirmasi juga adalah tahapan dalam memperoleh informasi. Hal yang membedakannya, hanya lah pada kehadiran pihak ketiga, tidak hanya mitra, dalam pengecekan nilai saldo dan mutasi transaksi. Dalam hal konfirmasi dilakukan melalui pengiriman surat konfirmasi resmi yang tertulis. Pengujian data pada umumnya oleh seorang auditor melakukan konfirmasi saldo, seperti kewajiban (liabilitas), saldo bank, piutang, dan lainnya sebagainya. Mitra tidak dilibatkan secara langsung pada proses pemeriksaan (audit), meskipun pemeriksa (auditor) tetap memerlukan perizinan dalam pengiriman jawaban konfirmasi kepada mitra. semisal, pemeriksa (auditor) biasanya akan melakukan pengiriman surat konfirmasi pada sampel dimana auditee memiliki akun untuk memastikan saldo.

d. Permintaan keterangan

Pengecekan keterangan, seperti catatan atau dokumen yang mengandung dokumen pendukung untuk persiapan laporan keuangan sangat dibutuhkan. Biasanya, auditor akan melakukan pengecekan secara manual untuk mengecek setiap detailnya yang disebut juga dengan

vouching. Tahapan tersebut ialah bagian penting dari Test of Controls dan Test of Details suatu perusahaan yang dilakukan oleh auditor. Pengecekan pencatatan terkait penyelidikan dokumen pendukung dari transaksi individu maupun sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan pada setiap transaksi pada sistem keuangan diharuskan memiliki sumber yang tepat, auditor bisa dilakukan konfirmasi berbagai asersi melalui pemeriksaan. Termasuk pula asersi yang berkaitan dengan akurasi, kelengkapan, juga cut-off. Untuk mengkonfirmasi aspek lain, auditor juga bisa memeriksa dokumen non-keuangan.

e. Penelusuran

Penelusuran yang dilakukan dalam proses audit didasarkan pada proses meminta klien untuk memberikan jawaban mengenai isu terkait. ketika kegiatan pemeriksaan dimulai, entitas menyetujui agar auditor dapat mendapatkan info-info yang berkaitan atas laporan keuangannya dengan tujuan pemeriksaan tersebut. Auditor diberikan wewenang ke seluruh individu di perusahaan yang dianggap perlu dalam proses penelitian untuk memperoleh data. Auditor diberikan keleluasaan dalam mendapatkan informasi mengenai mutasi kegiatan transaksi atau saldo pada bank tertentu. Pada umumnya, proses audit membutuhkan pemeriksanaan untuk mendapatkan dokumentasi melalui ucapan atau penjelasan dari pihak yang bersangkutan. Kelemahan dari tahapan audit ini ialah tidak hanya memberikan data-data pendukung audit yang cukup kuat, sehingga perlu didampingi oleh jenis prosedur audit lainnya.

f. Perhitungan

Tahapan perhitungan ulang atau recalculation adalah tahapan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Pemeriksa (Auditor) berencana melakukan perhitungan ulang terhadap saldo atau kegiatan mutasi transaksi yang telah terjadi dari Auditee. Tahap perhitungan ulang yang diadakan sebagai penilaian jika nilai saldo dalam laporan keuangan telah sesuai sebagai mana mestinya. Pemeriksa (auditor) jika mendapatkan ketidaksesuaian antara nilai saldo yang direncanakan dengan nilai saldo yang sebenarnya dapat dilakukan penelaahan lebih mendalam. Recalculation dapat dipakai dalam menguji penilaian dan pembagian, serta memastikan tingkat keakuratan.

g. Pemeriksaan Dokumen Pendukung

Pemeriksaan terhadap dokumen pendukung berperan dalam proses audit bisa mencakup harta yang diperoleh pada entitas tersebut. Proses pemeriksaan harta bisa mencakup pabrik, properti, serta peralatan lainnya. Jenis ini dapat menunjukkan bukti bahwa harta berwujud itu ada. Permeriksaan dapat melakukan pengujian kepemilikan dengan dokumen-dokumen pendukung melalui pengecekan fisik atas aset yang tercantum dalam pelaporan harta tetap. Perlu diketahui bahwa pengecekan yang dikerjakan auditor kaitannya dengan hal ini tidak membahas persoalan hak dan kewajiban. Dalam tahapan ini, pemeriksaan auditor dapat melakukan pengecekan terkait legalitas atas aset tersebut.

h. Pelaksanaan ulang

Pelaksanaan ulang merupakan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor secara independen. Auditor akan melakukan prosedur kontrol yang telah dilakukan klien sebagai bagian dari sistem kontrol. Prosedur audit ini adalah bagian yang berguna untuk pengujian pengendalian dalam proses audit. Dimungkinkan audit juga harus melakukan perhitungan ulang yang mana merupakan bagian dari pengendalian internal klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson Education.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2014). *Modern Auditing*. John Wiley & Sons
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 300: Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan*. Jakarta: IAPI.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 4

MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Oleh : Dr. Ir. Markonah, ASAI, M.M.

4.1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, organisasi dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, perkembangan teknologi yang pesat, serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas menuntut organisasi untuk memiliki sistem pengelolaan yang efektif. Dalam konteks ini, manajemen risiko dan pengendalian internal menjadi dua elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan organisasi.

Manajemen risiko berperan sebagai suatu pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang dihadapi tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup risiko operasional, strategis, hukum, dan reputasi. Tanpa pengelolaan risiko yang baik, organisasi akan rentan terhadap ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian signifikan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang terstruktur menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap organisasi modern.

Di sisi lain, pengendalian internal merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai terhadap efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat, organisasi dapat meminimalkan kesalahan, mencegah kecurangan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Keterkaitan antara manajemen risiko dan pengendalian internal menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik (*good corporate governance*). Manajemen risiko berfokus pada identifikasi dan mitigasi potensi ancaman, sedangkan pengendalian internal memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian dijalankan secara efektif. Integrasi kedua konsep ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan organisasi yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen risiko dan pengendalian internal sangat penting bagi organisasi dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Implementasi yang efektif dari kedua aspek ini tidak hanya membantu organisasi dalam mengurangi potensi kerugian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengendalian internal dapat dikatakan sebagai fondasi utama dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan

organisasi di masa depan.

Adapun poin-poin yang akan disajikan pada Bab Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal: Fondasi Keberhasilan Organisasi ini Adalah sebagai berikut:

1. Apa Itu Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal?

Manajemen Risiko adalah Proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dan Pengendalian Internal Adalah Proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi, meliputi keandalan laporan keuangan, efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap hukum.

2. Kerangka COSO: Pilar Pengendalian Internal

Lingkungan Pengendalian adalah Fondasi etika dan budaya organisasi. Penilaian Risiko: Identifikasi dan analisis risiko yang dihadapi organisasi. Aktivitas Pengendalian merupakan Kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko. Informasi dan Komunikasi yaitu Aliran informasi yang relevan dan tepat waktu. Pemantauan adalah Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian.

3. Jenis-Jenis Risiko dalam Pengendalian Internal

Risiko Kepatuhan: Pelanggaran hukum atau kebijakan. Risiko Penipuan (Fraud): Tindakan curang yang merugikan organisasi. Risiko Kontrol: Kegagalan sistem pengendalian internal akibat kurangnya pemantauan.

4. Peran Kunci Audit Internal

Lini Ketiga Pertahanan: Memastikan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Independen dan Objektif: Memberikan pandangan yang tidak memihak terhadap

proses bisnis. Nilai Tambah Strategis: Mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

5. Studi Kasus: Efektivitas Audit Internal di Sektor Keuangan Indonesia

Audit internal berperan penting dalam meningkatkan pengendalian internal dan memperkuat manajemen risiko. Mendukung tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan audit internal berkontribusi positif terhadap kepercayaan pemangku kepentingan.

6. Hubungan Erat: Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

SPI yang baik mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan mencegah kecurangan dalam SIA. Memastikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan.

7. Tantangan dan Rekomendasi

Tantangan: Keselarasan risiko fraud di setiap level, fokus pemantauan hanya di kantor pusat. Rekomendasi: Penguatan fungsi audit internal, peningkatan keterlibatan auditor dalam keputusan strategis, perluasan ruang lingkup pengawasan.

8. Kesimpulan: Fondasi Keberlanjutan Organisasi

Implementasi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal yang efektif adalah kunci keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik. Memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan organisasi di tengah kompleksitas bisnis modern.

Secara rinci di bawah ini disajikan uraian yang lebih detail

dari seluruh sub bab pada bab 4. Hal ini memungkinkan bagi para pembaca mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lengkap dan dapat dengan mudah memahami uraian ini.

4.2. Apa Itu Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi organisasi tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup risiko operasional, strategis, hukum, hingga reputasi. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi bagian integral dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi. Dalam implementasinya, manajemen risiko melibatkan serangkaian tahapan yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, serta penetapan strategi mitigasi. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan karena lingkungan bisnis selalu mengalami perubahan. Dengan demikian, organisasi dapat lebih adaptif dalam menghadapi ketidakpastian dan mampu memanfaatkan peluang yang muncul.

Pengendalian internal, di sisi lain, merupakan suatu sistem yang terdiri dari kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuan tersebut mencakup efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan

keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan antara manajemen risiko dan pengendalian internal sangat erat dan saling melengkapi. Manajemen risiko berfungsi sebagai alat identifikasi dan analisis potensi ancaman, sedangkan pengendalian internal memastikan bahwa langkah mitigasi yang dirancang dapat dijalankan secara efektif. Integrasi keduanya menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola organisasi yang baik (COSO, 2017).

4.3. Kerangka COSO: Pilar Pengendalian Internal

Kerangka COSO merupakan model yang diakui secara internasional dalam merancang dan mengevaluasi sistem pengendalian internal. Kerangka ini memberikan pendekatan yang komprehensif dengan menekankan bahwa pengendalian internal bukan hanya tanggung jawab satu unit, melainkan melibatkan seluruh elemen organisasi. Dengan menggunakan kerangka COSO, organisasi dapat memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan secara terstruktur dan konsisten. Komponen pertama dalam kerangka COSO adalah lingkungan pengendalian, yang mencerminkan nilai-nilai etika, integritas, serta budaya organisasi. Lingkungan ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas pengendalian lainnya. Tanpa lingkungan pengendalian yang kuat, implementasi pengendalian internal akan sulit berjalan secara efektif.

Komponen kedua dan ketiga adalah penilaian risiko dan aktivitas pengendalian. Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, aktivitas

pengendalian dirancang dalam bentuk kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko tersebut agar tidak berdampak signifikan terhadap organisasi. Komponen terakhir meliputi informasi dan komunikasi serta pemantauan. Informasi yang relevan harus disampaikan secara tepat waktu agar mendukung pengambilan keputusan, sementara pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian secara berkelanjutan. Kelima komponen ini saling terintegrasi dan menjadi pilar utama dalam sistem pengendalian internal (COSO, 2017).

4.4. Jenis-Jenis Risiko dalam Pengendalian Internal

Dalam pengendalian internal, organisasi menghadapi berbagai jenis risiko yang harus dikelola dengan baik. Salah satu risiko utama adalah risiko kepatuhan, yaitu risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap hukum, regulasi, atau kebijakan internal. Risiko ini dapat menimbulkan konsekuensi serius seperti sanksi hukum, kerugian finansial, hingga kerusakan reputasi organisasi. Selain risiko kepatuhan, terdapat pula risiko penipuan atau fraud yang menjadi ancaman signifikan bagi organisasi. Fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, atau korupsi. Faktor penyebabnya sering kali berkaitan dengan lemahnya pengendalian internal serta kurangnya pengawasan yang efektif.

Risiko kontrol juga menjadi perhatian penting dalam sistem pengendalian internal. Risiko ini muncul ketika

mekanisme pengendalian yang diterapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa disebabkan oleh desain sistem yang tidak memadai, kurangnya pemantauan, atau rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Pemahaman yang mendalam terhadap berbagai jenis risiko tersebut memungkinkan organisasi untuk merancang strategi mitigasi yang tepat. Dengan demikian, pengendalian internal dapat berfungsi secara optimal dalam mengurangi potensi kerugian dan menjaga stabilitas organisasi (Romney & Steinbart, 2020).

4.5. Peran Kunci Audit Internal

Audit internal memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam organisasi. Dalam konsep tata kelola modern, audit internal dikenal sebagai lini ketiga pertahanan yang bertugas memberikan assurance terhadap efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal. Peran ini menjadikan audit internal sebagai elemen strategis dalam organisasi. Salah satu prinsip utama dalam audit internal adalah independensi dan objektivitas. Auditor internal harus mampu melakukan evaluasi secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil audit mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Selain fungsi pengawasan, audit internal juga berperan sebagai konsultan yang memberikan rekomendasi perbaikan. Auditor internal membantu manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan sistem serta memberikan solusi yang konstruktif. Dengan demikian, audit internal tidak hanya

berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis. Peran audit internal yang efektif dapat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya fungsi audit yang kuat, organisasi dapat lebih percaya diri dalam menghadapi risiko dan memastikan bahwa proses bisnis berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan (IIA, 2017).

4.6 Studi Kasus: Efektivitas Audit Internal di Sektor Keuangan Indonesia

Di sektor keuangan Indonesia, audit internal memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Industri keuangan menghadapi tingkat risiko yang tinggi, sehingga membutuhkan sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif. Audit internal menjadi salah satu mekanisme utama dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Audit internal juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, auditor internal dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi operasional serta risiko yang dihadapi. Informasi ini sangat penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis.

Selain itu, audit internal berkontribusi dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Investor, regulator, dan masyarakat akan lebih percaya terhadap organisasi yang memiliki sistem pengawasan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa audit internal memiliki dampak yang

operasional organisasi. SIA berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan, sementara pengendalian internal memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara akurat dan dapat dipercaya. Pengendalian internal berperan dalam mencegah kesalahan dan kecurangan dalam sistem informasi akuntansi. Dengan adanya kontrol yang memadai, seperti otorisasi transaksi dan pemisahan tugas, risiko manipulasi data dapat diminimalkan. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas informasi keuangan.

Selain itu, pengendalian internal juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi. Informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan, tepat waktu, dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam menghadapi persaingan bisnis. Integrasi antara pengendalian internal dan SIA menjadi kunci dalam menciptakan sistem informasi yang handal. Tanpa pengendalian yang baik, SIA berpotensi menghasilkan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan (Hall, 2021).

4.8 Tantangan dan Rekomendasi

Implementasi pengendalian internal tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Salah satu tantangan utama adalah ketidakselarasan dalam pengelolaan risiko di berbagai level organisasi. Sering kali, pengendalian hanya difokuskan pada tingkat pusat, sementara unit operasional kurang mendapatkan perhatian. Tantangan lainnya adalah masih terbatasnya peran audit internal dalam

proses pengambilan keputusan strategis. Dalam beberapa organisasi, audit internal masih dianggap sebagai fungsi administratif yang hanya berfokus pada kepatuhan, bukan sebagai mitra strategis yang memberikan nilai tambah.

Selain itu, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan baru dalam pengendalian internal. Digitalisasi meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang terjadinya risiko baru seperti cyber fraud dan kebocoran data. Oleh karena itu, organisasi perlu menyesuaikan sistem pengendalian dengan perkembangan teknologi. Sebagai rekomendasi, organisasi perlu memperkuat fungsi audit internal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperluas cakupan pengawasan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal secara keseluruhan (Beasley et al., 2020).

4.9 Kesimpulan : Fondasi Keberlanjutan Organisasi

Manajemen risiko dan pengendalian internal merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Kedua konsep ini membantu organisasi dalam menghadapi ketidakpastian serta mengelola risiko yang semakin kompleks di era modern. Dengan implementasi yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengendalian internal juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan keandalan informasi yang dihasilkan.

Pengelolaan risiko yang baik memungkinkan organisasi

untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Hal ini menjadikan manajemen risiko sebagai bagian penting dari strategi organisasi. Pada akhirnya, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengintegrasikan manajemen risiko dan pengendalian internal secara konsisten dan berkelanjutan (ISO, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.A., Elder, R.J. and Beasley, M.S., 2020. *Auditing and assurance services: An integrated approach*. 17th ed. Harlow: Pearson.
- Beasley, M.S., Branson, B.C. and Hancock, B.V., 2020. *Developing key risk indicators to strengthen enterprise risk management*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2017. *Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance*. COSO.
- Gelinas, U.J., Dull, R.B. and Wheeler, P.R., 2018. *Accounting information systems*. Boston: Cengage Learning.
- Hall, J.A., 2021. *Accounting information systems*. 10th ed. Boston: Cengage Learning.
- Institute of Internal Auditors, 2017. *International professional practices framework (IPPF)*. Altamonte Springs: The Institute of Internal Auditors.
- International Organization for Standardization, 2018. *ISO 31000: Risk management guidelines*. Geneva: ISO.
- Moeller, R.R., 2019. *Brink's modern internal auditing: A common body of knowledge*. 8th ed. Hoboken: Wiley.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2022. *Laporan pengawasan perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Romney, M.B. and Steinbart, P.J., 2020. *Accounting information systems*. 14th ed. Harlow: Pearson

BAB 5

MANAJEMEN BUKTI AUDIT DAN DOKUMENTASI

Oleh : Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT

5.1 Pendahuluan

Dalam pelaksanaan audit, baik audit laporan keuangan, audit internal, maupun audit sektor publik, bukti audit merupakan fondasi utama yang menjadi dasar bagi auditor dalam merumuskan kesimpulan dan opini. Tanpa bukti yang cukup dan kompeten, opini yang diberikan tidak akan memiliki kredibilitas dan dapat menyesatkan pengguna laporan. Oleh karena itu, pengelolaan bukti audit yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin kualitas dan integritas proses audit.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya SA 230 (Dokumentasi Audit) dan SA 500 (Bukti Audit), secara tegas mengatur bahwa auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti yang memadai, serta mendokumentasikannya dalam kertas kerja yang rapi, terstruktur, dan mudah ditelusuri. Namun, praktik manajemen bukti dan dokumen tidak hanya sebatas pemenuhan kepatuhan terhadap standar, melainkan juga mencakup aspek strategis seperti perencanaan pengumpulan bukti berdasarkan risiko, pengendalian mutu atas kertas kerja, pengamanan dokumen, hingga pemanfaatan teknologi dalam

pengolahan data klien.

Seiring dengan transformasi digital, tantangan dalam pengelolaan bukti audit semakin kompleks. Auditor tidak hanya berhadapan dengan dokumen fisik, tetapi juga dengan data elektronik dalam jumlah besar yang bersumber dari sistem ERP, aplikasi berbasis cloud, serta alat analitik data. Di sisi lain, tuntutan akan kerahasiaan, keamanan informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi juga menuntut adanya tata kelola dokumen yang lebih ketat.

Dengan uraian di atas tersebut, pembahasan mengenai Manajemen Bukti Audit dan Dokumen menjadi sangat krusial. Topik ini akan mengupas secara komprehensif mulai dari konsep dasar bukti audit, strategi pengumpulan, struktur kertas kerja, pengendalian dokumen, pemanfaatan teknologi, hingga aspek hukum dan manajemen risiko. Dengan memahami keseluruhan elemen tersebut, diharapkan auditor dapat menyelenggarakan proses audit yang efisien, andal, dan mampu dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

5.2 Konsep Dasar dan Kerangka Teori

5.2.1 Definisi Bukti Audit Menurut Para Ahli

1. Mulyadi

Menurut Mulyadi dalam bukunya *Auditing* (Edisi 6, 2002/2011), bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan

keuangan terdiri dari: data akuntansi (jurnal, buku besar, buku pembantu, buku pedoman akuntansi, memorandum, dan catatan tidak resmi) dan semua informasi penguat (*corroborating information*) yang tersedia bagi auditor.

2. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley

Meskipun Arens, Elder, dan Beasley lebih dikenal karena definisi auditing-nya, definisi tersebut secara eksplisit mengidentifikasi bukti audit sebagai inti dari proses audit. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2010), auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti secara sistematis terhadap informasi yang dapat diverifikasi tentang suatu entitas ekonomi, untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Dari definisi ini, bukti audit diposisikan sebagai fondasi utama dari seluruh proses audit.

3. Hery

Menurut Hery dalam bukunya *Auditing Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi* (2019), bukti audit merupakan informasi yang akan digunakan oleh auditor untuk menentukan kesesuaian antara yang diaudit dengan kriteria.

4. Sukrisno Agoes

Menurut Sukrisno Agoes (2004), audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, disertai dengan catatan akuntansi dan bukti

pendukung lainnya, dengan tujuan memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan tersebut. Definisi ini menekankan bahwa bukti audit merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan laporan keuangan.

5. The American Accounting Association (AAA)

Menurut *A Statement of Basic Auditing Concepts* yang diterbitkan oleh AAA, audit adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi ini mempertegas aspek objektivitas dan keandalan dalam proses pengumpulan bukti audit.

6. Tungal

Menurut Tungal (2011), auditing adalah pemeriksaan dan pengujian proses atau mutu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan/spesifikasi pelanggan, yang meliputi menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif.

7. International Federation of Accountants (IFAC) / International Standard on Auditing (ISA 500)

Menurut ISA 500, bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan yang menjadi dasar opini auditor. Bukti audit mencakup informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan informasi lain yang diperoleh dari sumber lain.

8. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), bukti audit kompeten yang cukup harus didapat melalui inspeksi (inspection), observasi (observation), tanya jawab (inquiries), dan konfirmasi (confirmation) sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa.

9. Cushing & Loebbecke

Menurut Cushing dan Loebbecke (1986), proses audit dasar mengharuskan auditor untuk mencari dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan suatu asersi audit. Definisi ini menjadi landasan bagi banyak penelitian behavioral dalam auditing.

10. Knechel & Messier

Knechel dan Messier (1990), mendefinisikan bukti audit sebagai semua informasi, baik yang diperoleh dari prosedur audit maupun sumber lain, yang digunakan oleh auditor dalam mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini auditor (sejalan dengan definisi ISA 500).

5.2.2 Karakteristik Bukti Audit

Menurut Standar Audit (SA 500) yang mengadopsi ISA 500, karakteristik fundamental bukti audit adalah harus cukup (*sufficient*) dan tepat (*appropriate*). Kedua karakteristik ini saling berkaitan dan merupakan tolok ukur utama yang harus dipenuhi auditor sebelum menarik kesimpulan dan memberikan opini.

Kerangka konseptual yang diakui secara universal para ahli dan standar audit menetapkan bahwa bukti audit harus

memiliki dua karakteristik utama: kecukupan (kuantitas) dan ketepatan (kualitas). Kedua karakteristik ini saling berkaitan dan harus dipenuhi secara simultan.

1. Kecukupan Bukti Audit (*Sufficiency of Audit Evidence*)

Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit yang diperlukan. Ini berkaitan dengan berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan auditor untuk mendukung kesimpulannya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecukupan :

a. Risiko Kesalahan Penyajian Material

Semakin tinggi risiko yang dinilai auditor, semakin banyak bukti audit yang kemungkinan besar diperlukan

b. Kualitas Bukti

Semakin baik kualitas bukti audit, semakin sedikit kuantitas bukti yang mungkin dibutuhkan

c. Materialitas Item yang Diuji

Item yang lebih material dalam laporan keuangan memerlukan bukti yang lebih banyak

d. Karakteristik Populasi

Sifat dan karakteristik data yang diuji mempengaruhi jumlah sampel yang diperlukan

Prinsip Penting Terkait Kecukupan :

- a. Perolehan bukti yang lebih banyak tidak dapat mengompensasi buruknya kualitas bukti. Dengan kata lain, kuantitas yang besar tidak otomatis menghasilkan bukti yang berkualitas jika bukti tersebut tidak relevan atau tidak andal.

- b. Kecukupan harus dinilai dengan pertimbangan profesional, bukan berdasarkan aturan baku yang kaku (*no hard and fast rule*). Auditor harus mempertanyakan: "Apakah bukti yang terkumpul cukup untuk meyakinkan orang yang rasional tentang validitas temuan saya?".
 - c. Ketidacukupan dapat berdampak pada opini audit, bahkan berpotensi menyebabkan opini *Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion)* jika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup.
2. Ketepatan Bukti Audit (*Appropriateness of Audit Evidence*)
Ketepatan adalah ukuran kualitas atau mutu dari bukti audit. Kualitas bukti audit ditentukan oleh dua karakteristik esensial : relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reliability*).
3. Relevansi Bukti Audit (*Relevance*)
Relevansi berkaitan dengan hubungan logis antara bukti audit dengan tujuan audit, kriteria yang diuji, dan asersi yang dipertimbangkan. Bukti harus mendukung atau melemahkan asersi yang sedang dievaluasi.
- Aspek-Aspek Relevansi:
- 1. Hubungan Logis
 - a. Bukti harus memiliki hubungan yang masuk akal dan logis dengan tujuan audit
 - b. Dukungan pada Asersi
Bukti harus relevan dengan asersi spesifik yang diuji (eksistensi, kelengkapan, penilaian, hak dan kewajiban, penyajian dan pengungkapan)
 - c. Keterkaitan dengan Tujuan Audit
Bukti harus jelas berkaitan langsung dengan tujuan dan kriteria audit. Dengan kata lain, bukti yang relevan

mendukung observasi dan rekomendasi, serta konsisten dengan tujuan penugasan

Contoh Relevansi dalam Praktik :

- a. Untuk menguji keberadaan persediaan (aset) : bukti yang relevan adalah hasil observasi fisik auditor, bukan konfirmasi saldo dari pihak ketiga.
- b. Untuk menguji kelengkapan utang : bukti yang relevan adalah konfirmasi dari pemasok, bukan inspeksi fisik aset.

4. Keandalan Bukti Audit (*Reliability*)

Keandalan adalah tingkat kepercayaan yang dapat diberikan pada suatu bukti audit. Semakin andal suatu bukti, semakin besar bobotnya dalam mendukung kesimpulan audit.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan:

Keandalan bukti audit bergantung pada sumber, sifat, dan keadaan diperolehnya bukti tersebut. Berikut adalah hierarki keandalan berdasarkan faktor-faktor tersebut :

a. Sumber Bukti

Bukti dari sumber di luar entitas yang independen lebih dapat dipercaya dibandingkan bukti yang diperoleh dari entitas yang diaudit

b. Pengendalian Internal

Bukti yang dihasilkan dari sistem pengendalian yang efektif lebih kompeten dibandingkan dari pengendalian yang lemah atau tidak ada

c. Cara Perolehan

Bukti yang diperoleh secara langsung (inspeksi fisik, observasi, perhitungan ulang) lebih andal dibandingkan

- bukti tidak langsung atau laporan pihak lain
- d. Bentuk Bukti
Dokumen asli lebih andal dibandingkan fotokopi, tembusan, atau dokumen yang telah dimodifikasi
 - e. Kondisi Perolehan
Kesaksian yang diperoleh dalam kondisi bebas tekanan lebih andal dibandingkan kondisi tertekan atau tidak bebas
 - f. Kompetensi Pemberi Bukti
Bukti yang diperoleh dari individu yang independen, ahli, atau memiliki kedudukan tinggi lebih andal dibandingkan dari individu yang memihak atau pengetahuan awam
 - g. Dokumentasi
Bukti tertulis lebih andal dibandingkan bukti lisan yang hanya berdasarkan kesaksian tanpa bukti pendukung
- Faktor Tambahan yang Mempengaruhi Keandalan Menurut Para Ahli:
- a. Objektivitas
Bukti audit yang bersifat objektif lebih dapat dipercaya dibandingkan bukti yang bersifat subjektif
 - b. Ketepatan Waktu
Kriteria ketepatan waktu berkaitan dengan tanggal pemakaian bukti audit. Bukti yang diperoleh lebih dekat dengan periode audit yang bersangkutan lebih andal

c. Keberadaan Bukti Penguat

Bukti yang didukung oleh bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan akan semakin andal

5.2.3 Klasifikasi Bukti Audit

Klasifikasi bukti audit adalah pengelompokan bukti audit berdasarkan berbagai kriteria seperti prosedur perolehan, sumber, bentuk, sifat, dan hubungan antar bukti. Pemahaman terhadap klasifikasi ini membantu auditor dalam menentukan strategi pengumpulan bukti yang paling efektif dan efisien sesuai dengan tujuan audit yang ingin dicapai.

1. Klasifikasi Berdasarkan Prosedur Perolehan

Klasifikasi ini merupakan yang paling fundamental dalam praktik audit karena berkaitan langsung dengan metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti. Berdasarkan **SA 500 / ISA 500**, prosedur audit dikelompokkan ke dalam tujuh kategori yang saling melengkapi :

a. Inspeksi (*Inspection*)

Pemeriksaan terhadap catatan, dokumen, atau aset berwujud, meliputi inspeksi dokumen (cek, faktur, kontrak) dan inspeksi aset fisik (bangunan, mesin). Dapat mengonfirmasi keberadaan tetapi tidak secara otomatis kepemilikan atau penilaian aset.

b. Observasi (*Observation*)

Melihat suatu proses atau prosedur yang sedang

dilakukan oleh pihak lain pada saat pelaksanaannya. Harus dilengkapi dengan bukti audit lain karena hanya memberikan bukti pada saat tertentu.

c. Permintaan Keterangan (*Inquiry*)

Pencarian informasi dari pihak yang berpengetahuan, baik secara lisan maupun tertulis, di dalam atau di luar entitas. Rentangnya mulai dari pertanyaan lisan formal hingga kuesioner tertulis.

d. Konfirmasi (*Confirmation*)

Prosedur spesifik untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga yang independen sebagai respons atas permintaan informasi dari auditor. Merupakan bukti yang sangat andal karena berasal dari sumber eksternal.

e. Perhitungan Ulang (*Recomputation*)

Pengecekan akurasi matematis dari dokumen atau catatan klien melalui perhitungan ulang independen oleh auditor.

f. Pelaksanaan Ulang (*Reperformance*)

Pelaksanaan ulang secara independen oleh auditor terhadap prosedur atau pengendalian yang awalnya dilakukan oleh entitas. Berbeda dengan perhitungan ulang yang terbatas pada aspek matematis, reperformance mencakup prosedur yang lebih kompleks.

g. Prosedur Analitis (*Analytical Procedures*)

Evaluasi terhadap informasi keuangan melalui analisis

hubungan yang wajar antara data keuangan dan non-keuangan. Sangat penting sehingga harus dilakukan pada tahap perencanaan dan penyelesaian setiap audit.

2. Klasifikasi Berdasarkan Sumber

Sumber bukti audit sangat mempengaruhi tingkat keandalan dan objektivitas bukti tersebut. Secara garis besar, sumber bukti audit dibagi menjadi tiga kategori, yang secara umum keandalannya dapat diurutkan dari eksternal > internal > lisan.

a. Bukti Eksternal

Bukti yang diperoleh dari luar organisasi atau entitas yang diaudit. Contohnya adalah konfirmasi saldo bank dari bank, konfirmasi piutang dari pelanggan, dan faktur pembelian dari pemasok.

b. Bukti Internal

Informasi yang dihasilkan, digunakan, dan disimpan dalam organisasi klien. Contohnya adalah fotokopi faktur penjualan, laporan penggajian, catatan akuntansi, risalah rapat dewan direksi, prosedur internal, dan memo kebijakan.

c. Bukti Lisan

Informasi yang diperoleh melalui komunikasi verbal dengan pihak terkait, seperti wawancara dengan manajemen, pernyataan karyawan, dan diskusi dengan fungsi audit internal.

3. Klasifikasi Berdasarkan Bentuk

Klasifikasi berdasarkan bentuk atau karakteristik fisik bukti memberikan pemahaman tentang bagaimana bukti dapat diandalkan dan digunakan. Berdasarkan berbagai literatur, bukti audit dapat diklasifikasikan ke dalam enam bentuk utama :

a. Bukti Fisik (*Physical Evidence*)

Bukti yang berupa benda nyata atau aset berwujud yang dapat dilihat, diraba, atau diinspeksi secara langsung. Bukti ini diperoleh melalui pemeriksaan fisik, observasi, atau perhitungan langsung. Contohnya adalah persediaan barang, aset tetap seperti mesin dan bangunan, kas (uang tunai), dan surat berharga.

b. Bukti Dokumentasi (*Documentary Evidence*)

Salah satu jenis bukti yang paling umum dan sering menjadi bukti utama dalam audit karena ketersediaannya yang luas dan biaya perolehan yang relatif rendah.

1) Dokumen Internal : Dibuat dan digunakan di dalam entitas. Contoh: faktur penjualan, laporan penggajian, memo internal, nota dinas.

2) Dokumen Eksternal : Berasal dari luar entitas dan biasanya lebih andal. Contoh: faktur pembelian dari pemasok, laporan bank, kontrak dengan pihak ketiga.

c. Bukti Elektronik (*Electronic/Audiovisual Evidence*)

Bukti yang tersimpan dalam media elektronik, seperti

rekaman digital, data transaksi dari sistem komputerisasi, surel (email), dan database. Seiring transformasi digital, jenis bukti ini menjadi semakin penting.

d. Bukti Lisan/Ke saksi an (*Testimonial Evidence*)

Informasi yang diperoleh dari wawancara, pernyataan, atau komunikasi lisan dengan individu yang memiliki pengetahuan relevan (manajemen, staf ahli). Umumnya, jenis bukti ini dianggap paling rendah tingkat keandalannya karena sifatnya yang sangat subjektif dan perlu dikonfirmasi dengan bukti lain.

e. Bukti Analitis (*Analytical Evidence*)

Hasil dari evaluasi informasi keuangan melalui perbandingan rasio, tren, dan hubungan antar data untuk mengidentifikasi fluktuasi atau penyimpangan yang tidak wajar.

f. Bukti Lingkungan (*Circumstantial/Environmental Evidence*)

Bukti yang bersifat tidak langsung dan memberikan gambaran tentang konteks atau kondisi yang melatarbelakangi suatu kejadian, yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan melalui penalaran. Contoh: kondisi iklim usaha, budaya pengendalian perusahaan, reorganisasi manajemen, atau tekanan keuangan yang dihadapi entitas.

4. Klasifikasi Hubungan Antar Bukti

Berdasarkan hubungan antar bukti dalam mendukung suatu tujuan audit :

a. Bukti Dasar/Pokok (*Primary/Core Evidence*)

Bukti yang memiliki hubungan langsung dan signifikan dalam menguji suatu asersi atau tujuan audit tertentu. Contohnya adalah konfirmasi bank untuk asersi keberadaan kas.

b. Bukti Pendukung (*Supporting/Subsidiary Evidence*)

Bukti yang sifatnya melengkapi dan memperkuat bukti dasar. Contohnya adalah rekonsiliasi bank yang mendukung konfirmasi saldo.

5. Klasifikasi Khusus Menurut Para Ahli

a. Klasifikasi Menurut Arens, Elder, dan Beasley (*Seven Types of Evidence*)

Klasifikasi yang banyak digunakan ini menggabungkan antara prosedur dan bentuk bukti, mencakup pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, prosedur analitis, permintaan keterangan lisan dari klien, perhitungan ulang, dan pelaksanaan ulang.

b. Klasifikasi Menurut Mautz dan Sharaf

Dalam filosofi auditing, Mautz dan Sharaf mengklasifikasikan bukti menjadi empat kategori, yaitu bukti langsung (hasil pengujian langsung auditor), bukti tidak langsung (bersifat inferensial), bukti dokumentasi, dan bukti pernyataan.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan Setiap Klasifikasi

Secara umum, keandalan suatu bukti audit ditentukan oleh sumbernya dan sifatnya, tergantung pada keadaan khusus saat bukti tersebut diperoleh.

a. Sumber

Bukti eksternal independen lebih andal daripada bukti internal

b. Pengendalian Internal

Bukti internal lebih andal jika pengendalian internal entitas efektif

c. Cara Perolehan Auditor

Bukti yang diperoleh langsung oleh auditor (inspeksi fisik, observasi) lebih andal daripada bukti tidak langsung

d. Bentuk Bukti

Bukti tertulis (dokumen asli) lebih andal daripada bukti lisan atau fotokopi

e. Objektivitas

Bukti yang bersifat objektif lebih dapat dipercaya daripada yang bersifat subjektif

f. Ketepatan Waktu

Bukti yang diperoleh mendekati periode audit lebih andal.

5.3 Perencanaan dan Strategi Pengumpulan

5.3.1 Definisi dan Kerangka Konseptual

Proses perencanaan dan strategi pengumpulan bukti audit tidak bisa dilepaskan dari tiga standar utama yang mengatur alur kerja auditor, yaitu SA 300, SA 315, dan SA 330.

1. SA 300 (Perencanaan Audit) : Standar ini mewajibkan auditor untuk menyusun strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit yang terperinci. Strategi menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit, yang kemudian dioptimalkan melalui rencana audit yang berisi sifat, waktu, dan luas dari prosedur audit yang akan dilakukan.
2. SA 315 (Identifikasi dan Penilaian Risiko) : Di sinilah auditor berusaha memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik di level laporan keuangan secara keseluruhan maupun di level asersi untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Penilaian risiko ini menjadi dasar bagi seluruh respons audit berikutnya.
3. SA 330 (Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai) : Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang respons yang tepat. Menurut SA 330, tujuan utamanya adalah "memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai risiko salah saji material yang

dinilai dengan merancang dan melaksanakan respons yang sesuai terhadap risiko tersebut".

Penting untuk dipahami bahwa ketiga standar ini saling terkait dan menciptakan sebuah kerangka dinamis : SA 315 membantu mengidentifikasi risiko, SA 500 memandu bagaimana bukti audit dikumpulkan, dan SA 330 memastikan bahwa respons yang dirancang benar-benar mengatasi risiko yang telah dinilai. Proses ini bersifat iteratif; penilaian risiko dapat berubah seiring ditemukannya bukti audit baru selama proses pemeriksaan berlangsung.

5.3.2 Tahapan Perencanaan : Langkah Awal yang Krusial

Sebelum strategi pengumpulan bukti dirancang, beberapa langkah fundamental harus diselesaikan dalam tahap perencanaan :

1. Prosedur Penilaian Risiko (*Risk Assessment Procedures*)

Prosedur ini adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material. Prosedur penilaian risiko merupakan dasar awal yang penting, namun perlu diingat bahwa prosedur ini sendiri tidak memberikan bukti yang memadai untuk membentuk opini audit. Prosedur ini mencakup :

- a. Permintaan Kejelasan (*Inquiry*): Wawancara dengan manajemen dan personel lain untuk memahami proses bisnis dan potensi risiko.

- b. *Prosedur Analitis (Analytical Procedures)*: Evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang wajar. Ini adalah prosedur wajib pada tahap perencanaan untuk membantu mengidentifikasi area berisiko tinggi.
 - c. *Observasi dan Inspeksi (Observation and Inspection)*: Mengamati operasi entitas, memeriksa dokumen, dan membaca laporan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih konkret.
2. *Penetapan Materialitas*

Materialitas adalah konsep kunci yang memandu auditor dalam menentukan signifikansi suatu kesalahan penyajian. Standar Audit (SA 320) mewajibkan penetapan tingkat materialitas pada tahap perencanaan. Materialitas menentukan

- a. *Dasar penetapan materialitas (planning materiality)*
- b. *Ambang batas untuk mengidentifikasi akun yang signifikan*
- c. *Besaran kesalahan yang dapat ditoleransi (tolerable misstatement)* untuk setiap area audit

Auditor menggunakan pendekatan kuantitatif (misalnya, persentase dari laba sebelum pajak atau total aset) dan kualitatif (misalnya, kepatuhan terhadap regulasi, dampak pada tren laba) untuk menetapkan materialitas. Karena risiko dapat berubah selama audit, tingkat materialitas ini harus terus dievaluasi dan disesuaikan.

5.3.3 Strategi Pengumpulan Bukti : Memilih Pendekatan yang Tepat

Setelah risiko dinilai dan materialitas ditetapkan, auditor menentukan strategi keseluruhan dan rencana audit yang terperinci. Inti dari strategi ini adalah menentukan sifat, waktu, dan luas dari dua kategori besar prosedur audit, yaitu pengujian pengendalian dan prosedur substantif, yang bersama-sama membentuk prosedur audit lebih lanjut (*further audit procedures*).

1. Pengujian Pengendalian (*Tests of Controls*)

Prosedur ini dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasional pengendalian internal dalam mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan penyajian material. Pengujian ini hanya diperlukan jika:

- a. Auditor berencana untuk mengandalkan efektivitas suatu pengendalian.
- b. Prosedur substantif saja tidak cukup untuk memberikan bukti yang memadai pada tingkat asersi.

Sifatnya biasanya adalah uji kepatuhan yang menghasilkan jawaban "ya" atau "tidak".

- c. Contoh Pengujian Pengendalian : Dalam sistem pembelian, auditor dapat memeriksa sampel pesanan pembelian (*purchase orders*) untuk memastikan bahwa setiap pesanan telah mendapat otorisasi yang sesuai.

2. Prosedur Substantif (*Substantive Procedures*)

Ini adalah prosedur yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan

diwajibkan untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang material, terlepas dari penilaian risiko. Prosedur substantif terdiri dari :

- a. Pengujian Terinci (*Tests of Details*): Pemeriksaan rinci terhadap transaksi, saldo, dan pengungkapan. Contoh: Melakukan konfirmasi saldo bank secara independen.
- b. Prosedur Analitis Substantif (*Substantive Analytical Procedures*): Evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang wajar untuk mendapatkan keyakinan. Penggunaan prosedur ini harus mempertimbangkan prediktabilitas hubungan antar data.
- c. Contoh Prosedur Analitis Substantif: Membandingkan rasio margin laba kotor tahun berjalan dengan tahun lalu dan rata-rata industri untuk mengidentifikasi potensi salah saji dalam pengakuan pendapatan atau biaya pokok penjualan.

Keputusan tentang sifat (prosedur apa), waktu (kapan, apakah di interim atau di periode akhir), dan luas (seberapa banyak, apakah pengujian 100% populasi atau menggunakan sampling) dari prosedur audit ini secara langsung dipengaruhi oleh penilaian risiko. Semakin tinggi risiko yang dinilai, semakin banyak dan semakin andal bukti yang perlu dikumpulkan.

5.3.4 Sampling Audit dan Pemanfaatan Teknologi

1. Sampling Audit (SA 530) : Untuk populasi yang besar, auditor tidak mungkin menguji semua item. Sampling adalah aplikasi prosedur audit terhadap kurang dari 100% item dalam suatu populasi. Semua unit sampel harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih agar auditor dapat menarik kesimpulan yang masuk akal tentang seluruh populasi. Jumlah sampel ditentukan terutama berdasarkan penilaian risiko oleh auditor.
2. Penggunaan Teknologi dan Analitik Data (CAATs) : Era digital memungkinkan pemeriksaan 100% atas populasi, yang secara efektif menghilangkan risiko sampling (namun bukan berarti menghilangkan semua risiko audit). Pemanfaatan Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) dan analitik data membantu auditor mengidentifikasi anomali dan potensi kecurangan dengan lebih efektif, baik dalam pengujian pengendalian, prosedur substantif, maupun prosedur analitis.

5.4 Pengelolaan Dokumen Audit (Kertas Kerja)

Pengelolaan dokumen audit, yang sering disebut sebagai kertas kerja audit (*audit working papers*), merupakan tulang punggung dari setiap proses audit yang kredibel. Ini adalah catatan tertulis yang mendokumentasikan prosedur audit yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor (SA 230). Kertas kerja ini menjadi fondasi utama bagi laporan auditor dan bukti bahwa audit

telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

5.4.1 Definisi dan Tujuan Kertas Kerja Audit

Berdasarkan Standar Audit (SA) 230 (yang mengadopsi ISA 230), kertas kerja audit didefinisikan sebagai:

“Record of audit procedures performed, relevant audit evidence obtained and the conclusions the auditor reached.” (Catatan mengenai prosedur audit yang dilaksanakan, bukti audit relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor).

Tujuan utama dari pembuatan dan pengelolaan kertas kerja adalah untuk :

1. Menyediakan catatan yang memadai dan tepat sebagai dasar bagi laporan auditor.
2. Menyediakan bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit (SA) dan persyaratan hukum serta peraturan yang berlaku.

5.4.2 Fungsi Kertas Kerja Audit

Selain tujuan utamanya, kertas kerja audit juga memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung efektivitas proses audit dan kualitas hasil audit:

1. Membantu tim audit merencanakan dan melaksanakan audit secara sistematis.

2. Membantu anggota tim yang bertanggung jawab atas supervisi untuk mengarahkan, mengawasi, dan melaksanakan tanggung jawab re vi u me re ka.
3. Menjadikan tim audit akuntabel atas pekerjaan yang telah dilakukan.
4. Menyimpan catatan atas hal-hal yang memiliki signifikansi berkelanjutan untuk audit periode mendatang.
5. Memungkinkan pelaksanaan re vi u dan inspeksi pengendalian mutu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) internal maupun regulator eksternal.
6. Menjadi dasar bagi supervisor untuk melakukan review atas pekerjaan subordinatnya, sekaligus memberikan bukti bahwa audit telah diawasi secara tepat.
7. Memberikan perlindungan hukum bagi auditor. Jika di kemudian hari opini atau prosedur audit dipertanyakan, kertas kerja dapat menjadi bukti bahwa auditor telah melaksanakan prosedurnya sesuai standar dan dengan penuh kehati-hatian.
8. Berfungsi sebagai panduan untuk audit masa depan, membantu mengidentifikasi pola, risiko, dan metodeologi yang pernah digunakan.

5.4.3 Persyaratan dan Karakteristik Kertas Kerja yang Baik

Agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik, kertas kerja audit harus memenuhi persyaratan dan memiliki karakteristik tertentu :

1. Dapat Dipahami oleh Auditor Berpengalaman (*The "Experienced Auditor" Test*): Ini adalah persyaratan paling kritis. Standar Audit mewajibkan dokumentasi audit disusun sedemikian rupa sehingga seorang auditor berpengalaman yang tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan penugasan audit tersebut dapat memahami :
 - a. Sifat, waktu, dan luas prosedur audit yang dilakukan.
 - b. Hasil dari prosedur audit dan bukti audit yang diperoleh.
 - c. Hal-hal penting yang timbul selama audit dan kesimpulan yang dicapai, termasuk pertimbangan profesional yang signifikan.
2. Rekaman yang Akurat : Setiap prosedur yang dilakukan harus didokumentasikan pada saat pelaksanaannya atau segera setelahnya. Dokumentasi harus mencakup karakteristik pengenal yang spesifik dari item/transaksi yang diuji. Hal ini memungkinkan pelacakan dan verifikasi ulang di kemudian hari.
3. Catatan yang Jelas tentang Tim dan Waktu : Setiap kertas kerja audit harus mencantumkan informasi lengkap yang mencakup :
 - a. Nama perusahaan, nama akun, dan periode audit.
 - b. Siapa yang melaksanakan prosedur audit dan tanggal pelaksanaannya.
 - c. Siapa yang melakukan reviu (memeriksa) kertas kerja tersebut serta tanggal dan lingkup reviu.

4. Lengkap, Akurat, dan Ringkas :
 - a. Lengkap (*Complete*): Harus berisi semua informasi utama yang diperlukan, tetapi tidak perlu mencakup setiap detail kecil yang tidak relevan. Seorang auditor yang kompeten akan menghasilkan kertas kerja yang bermanfaat, tidak hanya tebal.
 - b. Akurat (*Accurate*): Harus bebas dari kesalahan dalam penulisan dan perhitungan.
 - c. Ringkas (*Concise*): Hanya memuat informasi yang pokok dan relevan dengan tujuan audit, disajikan secara sistematis dan tidak bertele-tele.
5. Menangani Inkonsistensi : Jika auditor mengidentifikasi informasi yang bertentangan atau tidak konsisten dengan kesimpulan akhir, auditor harus mendokumentasikan bagaimana informasi yang kontradiktif tersebut ditangani dalam proses pengambilan kesimpulan.

5.4.4 Struktur dan Jenis Kertas Kerja Audit

Untuk memudahkan pengelolaan, kertas kerja audit umumnya diklasifikasikan ke dalam dua jenis file utama: Berkas Permanen dan Berkas Tahun Berjalan, serta jenis file pendukung lainnya.

1. Berkas Permanen (*Permanent Audit File*)
 - a. Isi : Berisi informasi yang memiliki signifikansi berkelanjutan dan tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Berkas ini biasanya disiapkan pada saat pertama kali penugasan audit dan diperbarui secara periodik.

- b. Contoh dokumen yang termasuk dalam berkas permanen :
- 1) Informasi tentang struktur hukum dan organisasi entitas.
 - 2) Anggaran Dasar, Akta Pendirian, dan perubahannya.
 - 3) Struktur organisasi dan uraian tugas.
 - 4) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan.
 - 5) Salinan kontrak dan perjanjian penting yang bersifat jangka panjang.
 - 6) Hasil evaluasi dan pemahaman pengendalian internal (dalam bentuk narasi, kuesioner, atau *flowchart*).
 - 7) Laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.
 - 8) Komunikasi penting dengan manajemen atau pihak ketiga yang bersifat berkelanjutan.

2. Berkas Tahun Berjalan (*Current Audit File*)

- a. Isi : Berisi informasi yang berkaitan langsung dengan audit periode berjalan. Berkas ini adalah inti dari proses audit untuk tahun tersebut.
- b. Contoh dokumen yang termasuk dalam berkas tahun berjalan :
- 1) Program audit untuk tahun berjalan.
 - 2) Analisis dan Skekul utama (misalnya, analisis laba rugi, neraca saldo).
 - 3) Skekul pendukung (misalnya, rincian piutang, persediaan).
 - 4) Bukti pelaksanaan prosedur audit (misalnya, hasil konfirmasi, hasil observasi persediaan).

- 5) Lembar kertas kerja untuk setiap akun yang diaudit.
 - 6) Catatan pemeriksaan (audit notes) dan memo mengenai isu-isu penting.
 - 7) Surat konfirmasi dan representasi manajemen.
 - 8) Komunikasi melalui surel (e-mail) yang relevan.
 - 9) Draft laporan auditor dan laporan keuangan.
3. Berkas Korespondensi (Correspondence File)
- Berkas ini berisi surat-surat dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan audit, seperti surat konfirmasi yang dikirimkan ke bank, pelanggan, atau pemasok. Hal ini membantu dalam pemisahan dan pengelolaan bukti eksternal secara terorganisir.

5.4.5 Proses Review dan Supervisi Kertas Kerja

Proses review (pemeriksaan ulang) merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian mutu KAP. Review yang cermat memastikan bahwa pekerjaan staf audit telah dilaksanakan dengan benar dan didokumentasikan secara memadai.

1. Tujuan Review : Untuk memastikan bahwa kertas kerja telah memenuhi persyaratan standar audit dan cukup mendukung opini yang akan dikeluarkan. Ini juga merupakan bukti penting bahwa audit telah diawasi secara tepat.
2. Tingkatan Review: Dalam praktiknya, terdapat beberapa tingkatan review dalam suatu KAP :
 - a. Review Tingkat Pertama (Supervisor) : Dilakukan oleh supervisor atau manajer dari penyusun kertas kerja

setelah suatu segmen audit selesai. Ini adalah lapisan pengawasan paling dasar.

- b. Pengendali Teknis Auditor (PTA) : Memiliki peran penting sebagai peninjau (reviewer) dan supervisor pelaksanaan audit secara keseluruhan, memastikan kepatuhan terhadap metodologi dan standar.
 - c. Partner Review (Reviu Rekan) : Pemeriksaan independen oleh rekan (partner) yang tidak terlibat dalam penugasan untuk memberikan penilaian objektif terhadap kesimpulan signifikan.
3. Dokumentasi Review : Setiap tingkat review harus dicatat dengan jelas pada kertas kerja, mencakup siapa yang melakukan review, tanggal review, dan lingkup review. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas audit.. Dengan adanya bukti review yang terdokumentasi, setiap catatan perbaikan atau komentar dari reviewer dapat ditelusuri secara jelas.

5.4.6 Pengarsipan (Retensi) dan Pemusnahan Dokumen Audit

SA 230 mewajibkan setiap KAP untuk memiliki kebijakan yang jelas mengenai periode retensi (penyimpanan) dokumen audit.

1. Masa Retensi Minimum :

SA 230 secara implisit mengharuskan KAP memiliki kebijakan retensi dokumentasi audit untuk periode yang cukup, yang biasanya tidak kurang dari 7 (tujuh)

tahun terhitung sejak tanggal laporan auditor. Di Indonesia, kebijakan ini sejalan dengan praktik global : umumnya retensi dokumen audit adalah 7 tahun setelah tanggal laporan audit.

2. Penyelesaian Berkas Audit Final :

- a. Auditor harus menyelesaikan penyusunan berkas audit final (Final Audit File) dalam batas waktu yang wajar, yang secara eksplisit disebutkan yaitu tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor.
- b. Setelah penyelesaian berkas, tidak diperkenankan menghapus atau membuang dokumentasi audit sebelum periode retensi berakhir.

3. Modifikasi Pasca-Penyelesaian :

Jika auditor perlu mengubah atau menambahkan dokumentasi setelah berkas final selesai, auditor wajib mendokumentasikan :

- a. Alasan khusus dilakukannya modifikasi.
- b. Kapan dan oleh siapa modifikasi tersebut dilakukan.
- c. Kapan dan oleh siapa modifikasi tersebut ditinjau.

4. Perlindungan dan Akses:

- a. Auditor harus mengadopsi prosedur yang wajar untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan kertas kerja mereka untuk mencegah akses yang tidak sah. Dalam hal adanya permintaan akses oleh regulator (seperti OJK atau BPK), auditor diwajibkan untuk menyediakannya sesuai ketentuan perundangan.

- b. Jika terdapat investigasi atau sengketa hukum, auditor wajib menahan pemusnahan dokumen hingga masalah tersebut selesai. Apabila terdapat perselisihan atau gugatan hukum yang berpotensi memerlukan dokumen audit, masa retensi dapat diperpanjang hingga masalah tersebut tuntas.

5.4.7 Praktik Terbaik dalam Pengelolaan Kertas Kerja Modern

1. Gunakan Sistem Digital:
 - a. Beralih dari kertas kerja fisik ke software manajemen audit elektronik seperti CaseWare, WorkPapers, *TeamMate+, ATLAS, dan lain sebagainya.
 - b. Sistem ini memungkinkan cross-referencing yang mudah, kolaborasi tim secara real-time, audit trail digital, dan enforce kepatuhan terhadap standar dokumentasi, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi secara signifikan.
2. Standardisasi Template: Gunakan template kertas kerja yang terstandarisasi di seluruh KAP. Hal ini akan meningkatkan konsistensi, memudahkan review, dan memastikan tidak ada prosedur kunci yang terlewatkan. Template yang lebih baik akan menghasilkan output yang lebih seragam dan mudah dipahami.
3. Fokus pada Risk-Based Documentation: Sesuaikan luas dokumentasi dengan tingkat risiko. Area dengan risiko tinggi (seperti pengakuan pendapatan, transaksi pihak

- berelasi) memerlukan dokumentasi yang jauh lebih detail dibandingkan dengan area yang tidak material.
4. Cross-Referencing yang Jelas: Gunakan sistem indeks yang logis untuk saling merujuk antar kertas kerja, antara program audit, analisis, dan bukti pendukung. Hal ini akan memudahkan setiap reviewer untuk menavigasi dokumen.

5.5 Pengendalian atas Dokumen dan Bukti Audit

Pengendalian atas dokumen dan bukti audit merupakan sistem kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memastikan kerahasiaan, keamanan, integritas, dan ketersediaan seluruh dokumentasi audit sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pemusnahan. Pengendalian ini tidak hanya menjadi tuntutan standar profesional, tetapi juga fondasi bagi kepercayaan publik terhadap profesi auditor.

Pengendalian yang efektif melindungi dokumen audit dari risiko seperti akses tidak sah, manipulasi data, kehilangan fisik, hingga pelanggaran regulasi perlindungan data pribadi. Berdasarkan International Standard on Auditing (ISA) 230, auditor harus mengadopsi prosedur yang sesuai untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan kertas kerja serta menyimpannya untuk periode waktu yang mencukupi.

5.5.1 Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan merupakan prinsip etika fundamental yang mewajibkan auditor untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia klien kepada pihak ketiga tanpa otorisasi yang tepat, kecuali diwajibkan oleh hukum atau regulasi.

1. Landasan Etika Kerahasiaan

Kode Etik Profesi Akuntan Publik menetapkan bahwa menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional merupakan kewajiban mutlak. Prinsip ini diatur dalam IESBA Code of Ethics yang diadopsi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kewajiban utama meliputi :

a. Mewaspadaai Pengungkapan Tidak Sengaja

Auditor harus waspada terhadap kemungkinan kebocoran informasi, termasuk dalam lingkungan sosial atau kepada rekan bisnis dan keluarga dekat

b. Menjaga Kerahasiaan di Dalam Firma

Informasi rahasia hanya boleh diakses oleh personel yang memerlukan untuk keperluan audit

c. Melindungi Informasi Calon Klien

Kerahasiaan juga berlaku untuk informasi yang diungkapkan oleh calon klien

d. Larangan Penggunaan untuk Keuntungan Pribadi

Auditor tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga

e. Kewajiban Pasca-Hubungan Profesional

Prinsip kerahasiaan tetap berlaku setelah hubungan

profesional dengan klien berakhir.

2. Prosedur Penanganan Kerahasiaan dalam KAP

Praktik yang baik mengharuskan KAP menerapkan prosedur berikut :

- a. Menyadarkan staf akan isu kerahasiaan melalui pelatihan dan sosialisasi berkala
- b. Memperoleh persetujuan tertulis dari klien sebelum mengungkapkan informasi rahasia
- c. Menggunakan rekan dan tim yang berbeda dalam penanganan proyek yang sensitif
- d. Melakukan telaah independen atas pengaturan kerahasiaan
- e. Penandatanganan perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) oleh seluruh personel dan partner KAP.

5.5.2 Keamanan dan Pengendalian Akses

Keamanan dokumen audit mencakup perlindungan fisik untuk dokumen kertas dan pengendalian elektronik untuk dokumen digital. Auditor harus mengadopsi prosedur yang sesuai untuk menjaga keamanan kertas kerja sepanjang waktu.

1. Keamanan Dokumen Fisik

Dokumen audit kertas harus disimpan dalam ruangan khusus yang terkunci setiap saat. Praktik keamanan fisik mencakup :

- a. Ruang penyimpanan dengan kontrol akses fisik, hanya dapat dimasuki oleh personel yang berwenang.
 - b. Penggunaan lemari besi atau brankas untuk dokumen yang sangat sensitif.
 - c. Pencatatan peminjaman dan pengembalian dokumen (*check-in/check-out system*).
 - d. Larangan membawa dokumen audit keluar dari kantor tanpa otorisasi.
2. Keamanan Dokumen Digital
- Dokumen audit elektronik harus dilindungi oleh pengendalian elektronik yang memadai. Elemen kunci yang perlu diterapkan adalah :
- a. Kontrol Akses
Penerapan prinsip *least privilege* (pemberian hak akses minimal) dan pemisahan tugas (*segregation of duties*)
 - b. Verifikasi Identitas
Otentikasi pengguna melalui password, autentikasi multifaktor (MFA), atau tanda tangan digital untuk memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses
 - c. Audit Trail Digital
Pencatatan otomatis atas setiap akses, perubahan, dan penghapusan dokumen untuk kepentingan pelacakan dan investigasi
 - d. Enkripsi Data
Pengamanan data saat disimpan (at-rest) dan saat

ditransmisikan (in-transit)

e. Backup dan Pemulihan

Prosedur pencadangan data secara berkala serta rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*)

f. Keamanan Jaringan

Fire wall, sistem deteksi intrusi, dan pembatasan akses jaringan untuk mencegah akses dari luar yang tidak sah

3. Kepemilikan dan Hak Akses

Kertas kerja audit adalah milik auditor, bukan milik klien. Namun, kepemilikan ini tunduk pada batasan etika terkait hubungan kerahasiaan dengan klien. Beberapa prinsip penting :

a. Auditor tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa izin atau kewajiban hukum.

b. Kertas kerja hanya boleh diakses oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai ketentuan, seperti otoritas pajak atau regulator profesi.

c. Auditor dapat menyediakan sebagian atau ringkasan kertas kerja kepada klien atas kebijaksanaannya sendiri.

5.5.3 Integritas Dokumentasi Audit (*Integrity*)

Integritas dokumentasi audit merujuk pada keakuratan, kelengkapan, dan keaslian seluruh catatan yang menjadi bukti pelaksanaan audit. Buat pertimbangan profesional dan keputusan signifikan harus didokumentasikan secara lengkap. KAP harus memiliki

prosedur yang terdokumentasi untuk mengendalikan pembuatan, persetujuan, distribusi, dan perubahan dokumen, serta memastikan hanya versi yang berlaku yang digunakan.

1. Pembuatan Tepat Waktu : Dokumentasi harus dibuat pada saat pelaksanaan prosedur atau segera setelahnya.
2. Pengendalian Perubahan : Modifikasi setelah penyelesaian file harus didokumentasikan dengan alasan yang jelas, tanggal, dan identitas pelaku dan peninjau.
3. Sistem *Cross-Referencing* : Indeks dan referensi silang yang jelas untuk memudahkan navigasi dan verifikasi antar dokumen.

5.5.4 Kepatuhan terhadap Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 yang berlaku efektif 17 Oktober 2024 memberikan implikasi signifikan bagi pengelolaan dokumen audit.

1. Kewajiban Auditor di Bawah UU PDP
Undang-undang ini mewajibkan pengendali data (KAP) dan prosesor data (auditor/juru audit) untuk :
 - a. Menjaga kerahasiaan data pribadi yang diproses.
 - b. Melindungi data dari akses yang tidak sah.
 - c. Memberikan akses bagi individu untuk mengubah atau menghapus data mereka.

2. Sanksi Pelanggaran UU PDP

Pelanggaran terhadap UU PDP dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana :

- a. Denda hingga Rp6 miliar.
- b. Penjara maksimal 6 tahun.
- c. Sanksi administratif dari otoritas pengawas.

Karena dokumen audit seringkali memuat data pribadi (misalnya, data karyawan, data pelanggan, data keuangan individu), KAP wajib membangun sistem perlindungan data klien yang sesuai dengan standar.

5.5.5 Tanggung Jawab Hukum Auditor

Pengendalian dokumen yang lemah dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana bagi auditor, terutama ketika terjadi:

1. Kebocoran data klien karena kelalaian penyimpanan.
2. Manipulasi atau pemalsuan kertas kerja yang membahayakan opini audit.
3. Penggunaan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.

Standar profesional menetapkan bahwa kertas kerja adalah milik auditor, tetapi hak kepemilikan ini tunduk pada batasan etika. Auditor harus melindungi dokumen secara wajar dan mematuhi hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- AccountingToioils (2025) 'Audit Doicumeintatioin', AccoiuntingToioils CPEi Coirsei. Availablei at: <https://www.accoiuntingtoioils.coim> (Acceisseid: 26 April 2026).
- AccountingToioils (2025) 'Audit Eivideincei Deifinitioin', AccoiuntingToioils CPEi Coirsei. Availablei at: <https://www.accoiuntingtoioils.coim> (Acceisseid: 26 April 2026).
- Agoieis, S. (2004) Auditing (Peimeiriksaan Akuntansi) oileih Kantor Akuntan Publik, Jakarta: Leimbaga Peineirbit Fakultas Eikoinoimi Univeirsitas Indoineisia.
- Agoieis, S. and Trisnawati, Ei. (2019) Praktikum Audit: Instruksi Umum, Beirkas Peirmanein, dan Beirkas Tahun Beirjalan, Jakarta: Saleimba Eimpat.
- Ameirican Accoiunting Associatioin (1973) A Stateimeint oif Basic Auditing Coincepts, Sarasoita, FL: AAA.
- Areins, A.A., Eildeir, R.J. and Beiasleiy, M.S. (2010) Auditing and Assurancei Seirviceis: An Inteigrateid Approiach, 13th eidn, Uppeir Saddlei Riveir, NJ: Preinticei Hall.
- Areins, A.A., Eildeir, R.J. and Beiasleiy, M.S. (2017) Auditing and Assurancei Seirviceis: An Inteigrateid Approiach, 16th eidn, Uppeir Saddlei Riveir, NJ: Peiarsoin.
- Australian Auditing and Assurancei Standards Boiard (AUASB) (2019) *ASA 500 - Audit Eivideincei*, Oipeirativei foir financial reiporiting peiriods beiginning oin oir after 15 Deiceimbeir 2019.

- Binus Univeirsity (2023) 'Audit Eivideincei: Oiveirview oif thei SA 500 (Reivisi 2021)', Binus Univeirsity Learning Mateirial. Availablei at: <https://binus.ac.id> (Acceisseid: 27 April 2026).
- Cushing, B.Ei. and Loieibbeickei, J.K. (1986) Coimparisoin oif Audit Meithoidoiloigieis oif Largei Accoounting Firms, Sarasoita, FL: Ameirican Accoounting Associatioin.
- Firmansyah, R. and Kurniawati, D. (2022) 'Keirahasiaan Data Kliein dalam Peirspektif Koidei Eitik Akuntan Publik Indoineisia', Jurnal Eitika Proifeisi Akuntansi, 8(1), pp. 33-48.
- Heiry (2019) Auditing: Dasar-Dasar Peimeiriksaan Akuntansi, Jakarta: PT Grameidia Widiasarana Indoineisia.
- ICPAK (n.d.) ICPAK Audit Manual, Chaptair 12: Audit Eivideincei (Incoirpoirating ISA 500, 501 and 505). Availablei at: <http://audit.icpak.coim> (Acceisseid: 27 April 2026).
- Ikatan Akuntan Indoineisia (IAI) (2001) Standar Proifeisioinal Akuntan Publik, Jakarta: Saleimba Eimpat.
- Ikatan Akuntan Indoineisia (IAI) (2019) Moidul CA Audit & Asurans (Silabus 2019), Jakarta: IAI Gloibal.
- Ikatan Akuntan Indoineisia (IAI) (2021) Koidei Eitik Proifeisi Akuntan Publik 2021, Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indoineisia (IAI) (2022) Moidul Lieveil Dasar Asurans dan Sisteim Infoirmasi, Bab 14: Bukti dan Peingambilan Samplei, pp. 178-185. Availablei at: <http://weib.iaigloibal.oir.id> (Acceisseid: 27 April 2026).
- Indriyani, D. and Widoidoi, S. (2023) 'Impleimeintasi Peingeindalian Akseis Doikumein Audit pada Kantoir Akuntan Publik di Surabaya', Jurnal Akuntansi dan

- Auditing, 20(2), pp. 145-162.
- Institut Akuntan Publik Indoineisia (IAPI) (2021) SA 230: Doikumeintasi Audit, Jakarta: Deiwani Standar Proifeisioinal Akuntan Publik IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indoineisia (IAPI) (2021) SA 300: Peirencanaan Suatu Audit atas Lapoiran Keiuangan, Jakarta: Deiwani Standar Proifeisioinal Akuntan Publik IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indoineisia (IAPI) (2021) SA 315: Peingideintifikasian dan Peinilaian Risikoi Keisalahan Peinyajian Mateirial, Jakarta: Deiwani Standar Proifeisioinal Akuntan Publik IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indoineisia (IAPI) (2021) SA 320: Mateirialitas dalam Peirencanaan dan Peilaksanaan Audit, Jakarta: Deiwani Standar Proifeisioinal Akuntan Publik IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indoineisia (IAPI) (2021) SA 330: Reispoin Auditor teirhadap Risikoi yang Teilah Dinilai, Jakarta: Deiwani Standar Proifeisioinal Akuntan Publik IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indoineisia (IAPI) (2021) SA 500: Bukti Audit, Jakarta: Deiwani Standar Proifeisioinal Akuntan Publik IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indoineisia (IAPI) (2021) SA 530: Sampling Audit, Jakarta: Deiwani Standar Proifeisioinal Akuntan Publik IAPI.
- Inteirnatioinal Auditing and Assurance Standards Boiard (IAASB) (2021) ISA 230: Audit Doicumeintatioin, Neiw Yoirk: IFAC.

- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2021) ISA 300: Planning an Audit of Financial Statements, New York: IFAC.
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2021) ISA 315: Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement, New York: IFAC.
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2021) ISA 500: Audit Evidence, New York: IFAC.
- International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) (2020) Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants, New York: IFAC.
- International Organization for Standardization (ISO) (2022) *ISO/IEC 27001:2022 Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection — Information Security Management Systems — Requirements*, Geneva: ISO.
- Knechel, W.R. (2020) Audit: Assurance & Risk, 5th edn, New York: Routledge.
- Knechel, W.R. and Meissner, W.F. (1990) 'Sequential Auditor Decision Making: Information Search and Evidence Evaluation', *Contemporary Accounting Research*, 7(1), pp. 189-215.
- Mautz, R.K. and Sharaf, H.A. (1961) *The Philosophy of Auditing*, Sarasota, FL: American Accounting Association.
- Mulyadi (2002) *Auditing Buku 2*, 6th edn, Jakarta: Salemba Empat.

- Mulyadi (2011) *Auditing*, 6th edn, Jakarta: Salemba Empat.
- National Financial Reporting Authority (NFRA) (2026) 'Circular on Audit Documentation Reiteration and Submission', NFRA Newsletter, 3 January.
- Nwachukwu, C.E. et al. (2020) 'Auditing in the New Age of Industry 4.0', *International Journal of Business Strategy and Automation*, 2(1), pp. 17-28.
- O'Regan, D. (n.d.) *Auditor's Dictionary*, [place unknown]: [publisher unknown].
- Oidhiamboi, P. (2025) '#isa230 #isa220 #isas #internationalauditingstandards #auditdocumentation', LinkedIn, 8 January. Available at: <https://www.linkedin.com> (Accessed: 27 April 2026).
- Privy (2026) 'Verifikasi Identitas dalam Akses Keirja Audit Digital', Privy Blog, 24 January. Available at: <https://www.privacy.id> (Accessed: 27 April 2026).
- Ramandei, P. et al. (2019) 'Interaction of financial assistance and compliance of financial reporting in Indonesia: Evidence of local government in Papua and West Papua', *International Journal of Scientific and Technological Research*, 8(10), pp. [unpublished?].
- Republik Indonesia (2022) *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sandibahari.com (2022) 'SA 230 – Dokumentasi Audit', Sandibahari Accounting Corner, 18 April. Available at: <https://www.sandibahari.com> (Accessed: 27 April 2026).

- Sawyer's Guide for Internal Auditors (n.d.), [place unknown]: [publisher unknown].
- SW Indonesia (2024) 'Proteksi Data: Keirahasaan dalam Audit', SW Insights, 3 March. Available at: <https://sw.coi.id> (Accessed: 27 April 2026).
- Tuanakotta, T.M. (2015) Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing), Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, A.W. (2011) Auditing: Suatu Pengantar, Jakarta: Harvarindo.

BAB 6

AUDIT LAPORAN KEUANGAN

Oleh : Sepbeariska Manurung

6.1 Pendahuluan

Audit laporan keuangan merupakan salah satu aktivitas penting dalam sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan suatu organisasi. Dalam dunia bisnis modern, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana komunikasi utama antara perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan. Investor, kreditur, pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kondisi keuangan, kinerja operasional, serta prospek suatu organisasi. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki tingkat keandalan, relevansi, dan akurasi yang tinggi. Untuk memastikan kualitas informasi tersebut, diperlukan suatu mekanisme pemeriksaan yang independen dan profesional, yaitu audit laporan keuangan.

Audit laporan keuangan berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan ekonomi dan bisnis. Pada masa awal perkembangan perusahaan, pemilik usaha biasanya terlibat langsung dalam pengelolaan operasional sehingga dapat mengawasi penggunaan sumber daya secara langsung. Namun, ketika organisasi berkembang menjadi lebih besar dan kompleks, terjadi pemisahan antara

kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan tidak lagi menjalankan aktivitas operasional sehari-hari, melainkan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada manajemen. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pihak independen yang dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah menggambarkan kondisi perusahaan secara wajar. Audit laporan keuangan hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut dengan memberikan keyakinan yang memadai kepada para pengguna laporan keuangan.

Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), audit laporan keuangan memiliki peran strategis dalam mengurangi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Manajemen memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemilik modal. Ketidakseimbangan informasi ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*), yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti manipulasi laporan keuangan, penyembunyian informasi penting, maupun penyajian informasi yang tidak objektif. Melalui proses audit yang dilakukan oleh auditor independen, tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan dapat ditingkatkan karena auditor melakukan pemeriksaan secara profesional berdasarkan standar audit yang berlaku.

Pentingnya audit laporan keuangan semakin terlihat dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan penuh ketidakpastian. Berbagai keputusan strategis yang diambil oleh investor dan kreditur sangat bergantung pada informasi keuangan yang tersedia. Investor menggunakan laporan

keuangan untuk menilai tingkat profitabilitas, risiko investasi, dan potensi pertumbuhan perusahaan. Sementara itu, kreditur menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Jika laporan keuangan mengandung kesalahan atau penyajian yang menyesatkan, keputusan yang diambil oleh para pengguna informasi dapat menjadi tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, audit laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen yang meningkatkan kredibilitas dan keandalan informasi keuangan.

Audit laporan keuangan tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan atau kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Secara lebih luas, audit bertujuan memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Auditor melakukan serangkaian prosedur untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sehingga dapat menyimpulkan apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan (error) maupun kecurangan (fraud). Dengan demikian, fokus utama audit bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan menilai tingkat kewajaran dan kepatuhan laporan keuangan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Peran audit laporan keuangan juga sangat penting dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Salah satu prinsip utama tata kelola perusahaan adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban manajemen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

sumber daya perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Audit laporan keuangan membantu memastikan bahwa pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara transparan dan dapat dipercaya. Kehadiran auditor independen memberikan nilai tambah bagi organisasi karena hasil audit dapat menjadi dasar bagi dewan komisaris, komite audit, dan pemegang saham dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Dalam sektor publik, audit laporan keuangan memiliki fungsi yang tidak kalah penting dibandingkan sektor swasta. Pemerintah dan lembaga publik mengelola dana yang berasal dari masyarakat sehingga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan dan akuntabel. Audit atas laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Hasil audit menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam praktik audit laporan keuangan. Saat ini sebagian besar organisasi menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan. Penggunaan teknologi tersebut meningkatkan efisiensi proses bisnis, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko baru yang harus diperhatikan oleh auditor, seperti risiko keamanan data, manipulasi sistem, dan ancaman serangan siber. Oleh karena

itu, auditor modern tidak hanya dituntut memahami prinsip-prinsip akuntansi dan audit, tetapi juga harus memiliki pengetahuan mengenai teknologi informasi dan sistem pengendalian berbasis digital.

Selain itu, globalisasi ekonomi telah mendorong harmonisasi standar akuntansi dan audit di berbagai negara. Perusahaan yang beroperasi secara internasional memerlukan laporan keuangan yang dapat dipahami dan dipercaya oleh investor global. Kondisi ini menyebabkan auditor harus memahami berbagai standar internasional, termasuk International Standards on Auditing (ISA) dan International Financial Reporting Standards (IFRS). Kemampuan auditor dalam mengadaptasi perkembangan standar internasional menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas audit dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap laporan keuangan perusahaan.

Dengan demikian, audit laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan modern. Audit berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, memperkuat akuntabilitas manajemen, mengurangi risiko asimetri informasi, serta mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang baik. Di tengah meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis dan perkembangan teknologi yang pesat, peran audit laporan keuangan akan semakin penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

6.2 Pengertian Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan merupakan salah satu bentuk audit yang paling banyak dikenal dan diterapkan dalam berbagai organisasi, baik sektor swasta maupun sektor publik. Audit ini berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan organisasi secara wajar. Dalam praktiknya, audit laporan keuangan dilakukan oleh auditor independen yang memiliki kompetensi profesional dan tidak memiliki kepentingan terhadap entitas yang diperiksa. Independensi auditor menjadi faktor penting karena menentukan objektivitas dan kredibilitas hasil audit yang dihasilkan.

Secara umum, audit laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam laporan keuangan guna menentukan tingkat kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi ini menunjukkan bahwa audit bukan sekadar kegiatan pemeriksaan dokumen keuangan, melainkan suatu proses profesional yang dilakukan berdasarkan metodologi, standar, dan prosedur tertentu. Melalui proses tersebut, auditor mengumpulkan berbagai bukti yang relevan sebelum memberikan kesimpulan mengenai kewajaran laporan keuangan.

Menurut pandangan profesi akuntansi, audit laporan keuangan merupakan suatu jasa attestasi yang memberikan

tingkat keyakinan tertentu kepada pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, auditor bertindak sebagai pihak independen yang menilai apakah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor tidak bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, melainkan bertanggung jawab untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Dengan demikian, tanggung jawab utama atas isi laporan keuangan tetap berada pada manajemen perusahaan.

Audit laporan keuangan memiliki karakteristik sebagai proses yang sistematis dan terstruktur. Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, mulai dari perencanaan audit, identifikasi risiko, pengujian pengendalian internal, pelaksanaan prosedur audit, evaluasi bukti, hingga penyusunan laporan auditor. Setiap tahapan memiliki tujuan tertentu yang saling berkaitan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Pendekatan yang sistematis ini membedakan audit laporan keuangan dari pemeriksaan biasa yang dilakukan tanpa prosedur dan standar yang jelas.

Dalam audit laporan keuangan, auditor berpedoman pada kriteria tertentu sebagai dasar penilaian. Kriteria tersebut umumnya berupa Standar Akuntansi Keuangan (SAK), standar pelaporan keuangan internasional, atau kerangka pelaporan keuangan lain yang relevan dengan jenis organisasi yang diperiksa. Auditor membandingkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan kriteria tersebut untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan atau salah saji

yang material. Jika ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan, auditor akan mempertimbangkan dampaknya terhadap opini yang akan diberikan.

Konsep materialitas merupakan bagian penting dalam pengertian audit laporan keuangan. Auditor tidak memeriksa setiap transaksi secara rinci, melainkan memfokuskan perhatian pada transaksi atau akun yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Suatu kesalahan dianggap material apabila dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan tingkat materialitas selama proses audit berlangsung.

Audit laporan keuangan juga berkaitan erat dengan konsep keyakinan memadai (*reasonable assurance*). Auditor berusaha memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Namun, audit tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa seluruh informasi dalam laporan keuangan benar seratus persen. Keterbatasan ini muncul karena auditor menggunakan teknik pengujian berbasis sampel, adanya keterbatasan waktu, serta kemungkinan adanya kolusi atau manipulasi yang sulit dideteksi. Oleh sebab itu, opini auditor merupakan bentuk keyakinan profesional yang didasarkan pada bukti audit yang cukup dan tepat, bukan jaminan absolut.

Dalam praktik bisnis modern, audit laporan keuangan memiliki fungsi yang sangat penting bagi berbagai pihak. Bagi investor, audit memberikan keyakinan bahwa laporan

keuangan yang digunakan sebagai dasar investasi dapat dipercaya. Bagi kreditur, audit membantu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Bagi pemerintah, audit mendukung kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan regulasi lainnya. Sementara bagi manajemen, audit dapat menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan yang telah diterapkan.

Audit laporan keuangan juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang membantu mengurangi risiko konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Dalam perusahaan modern, pemegang saham sebagai pemilik modal sering kali tidak terlibat langsung dalam pengelolaan operasional perusahaan. Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan pihak independen yang dapat memberikan penilaian objektif terhadap informasi yang disampaikan oleh manajemen. Auditor independen berperan sebagai pihak ketiga yang membantu meningkatkan kepercayaan antara manajemen dan pemilik perusahaan melalui pemeriksaan yang profesional dan objektif.

Perkembangan lingkungan bisnis yang semakin kompleks telah memperluas cakupan audit laporan keuangan. Auditor tidak hanya memeriksa angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan, seperti kondisi ekonomi, risiko bisnis, pengendalian internal, teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Pendekatan audit modern lebih menekankan pada identifikasi dan penilaian risiko sehingga auditor dapat memfokuskan

prosedur pemeriksaan pada area yang memiliki kemungkinan salah saji material yang lebih tinggi.

Kemajuan teknologi informasi juga telah memengaruhi definisi dan praktik audit laporan keuangan. Saat ini sebagian besar transaksi bisnis diproses secara elektronik melalui sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Kondisi ini menuntut auditor untuk memahami sistem teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi serta mengevaluasi efektivitas pengendalian yang diterapkan dalam sistem tersebut. Audit laporan keuangan modern tidak lagi terbatas pada pemeriksaan dokumen fisik, tetapi juga mencakup analisis data digital, pengujian sistem informasi, dan pemanfaatan teknologi audit berbantuan komputer.

6.3 Tujuan Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas informasi keuangan dan perlindungan kepentingan para pengguna laporan keuangan. Dalam dunia bisnis modern, laporan keuangan menjadi sumber informasi utama yang digunakan oleh investor, kreditur, pemerintah, pemegang saham, dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang dapat memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan oleh manajemen telah mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara benar dan wajar. Audit laporan keuangan hadir sebagai instrumen yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut melalui proses pemeriksaan yang sistematis, objektif, dan independen.

Tujuan utama audit laporan keuangan adalah memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini auditor merupakan hasil akhir dari proses audit yang menunjukkan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bebas dari salah saji material. Melalui opini tersebut, auditor memberikan tingkat keyakinan tertentu kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang mereka gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan memiliki tingkat keandalan yang memadai. Dengan demikian, audit tidak bertujuan menjamin bahwa laporan keuangan sepenuhnya bebas dari kesalahan, melainkan memberikan keyakinan yang memadai mengenai kewajaran penyajiannya.

Selain memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, audit juga bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas informasi keuangan yang dipublikasikan oleh organisasi. Laporan keuangan yang telah diaudit umumnya memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan laporan keuangan yang belum diaudit. Investor dan kreditur cenderung lebih yakin terhadap informasi yang telah melalui proses audit independen karena laporan tersebut telah diperiksa oleh pihak profesional yang memiliki kompetensi dan independensi. Peningkatan kredibilitas ini sangat penting dalam menciptakan kepercayaan pasar dan mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi perusahaan.

Tujuan audit laporan keuangan berikutnya adalah membantu mengurangi risiko asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Dalam organisasi

modern, manajemen memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan dibandingkan pemegang saham atau investor. Ketidakseimbangan informasi tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap keandalan laporan yang disajikan oleh manajemen. Audit berfungsi sebagai mekanisme verifikasi independen yang membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pihak eksternal telah mencerminkan kondisi perusahaan secara objektif dan tidak menyesatkan. Dengan adanya audit, tingkat kepercayaan antara manajemen dan pemangku kepentingan dapat ditingkatkan.

Audit laporan keuangan juga bertujuan untuk mendeteksi dan mengurangi kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Salah saji dapat terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja (error) maupun karena tindakan kecurangan (fraud). Kesalahan dapat muncul akibat kekeliruan pencatatan, kesalahan perhitungan, atau penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Sementara itu, kecurangan dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penggelapan aset, atau tindakan lain yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tertentu. Melalui prosedur audit yang dirancang secara sistematis, auditor berupaya mengidentifikasi indikasi adanya salah saji material sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih akurat terhadap laporan keuangan yang diperiksa.

Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan

laporan keuangan, perusahaan wajib mengikuti berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh standar akuntansi, regulator, dan otoritas terkait. Auditor melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan telah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan tersebut. Apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, auditor akan mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan dan menyampaikan temuan tersebut kepada manajemen serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Audit laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui identifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Selama proses audit, auditor tidak hanya memeriksa laporan keuangan tetapi juga mempelajari sistem pengendalian internal yang digunakan perusahaan untuk mengelola transaksi dan menjaga aset organisasi. Hasil evaluasi tersebut dapat membantu manajemen memahami area-area yang memerlukan perbaikan sehingga risiko kesalahan, kecurangan, dan inefisiensi dapat diminimalkan. Meskipun tujuan utama audit bukan untuk menilai efektivitas pengendalian internal secara menyeluruh, temuan yang diperoleh selama audit sering kali menjadi sumber informasi yang berharga bagi manajemen.

Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), audit laporan keuangan bertujuan mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas organisasi. Transparansi mengharuskan perusahaan menyajikan informasi yang jujur, lengkap, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Sementara itu, akuntabilitas

mengharuskan manajemen mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Audit membantu memastikan bahwa kedua prinsip tersebut diterapkan secara efektif melalui pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, audit sering dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam sistem tata kelola perusahaan yang sehat.

Tujuan audit laporan keuangan juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan investor dan pemegang saham. Dalam pasar modal, keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Jika laporan keuangan mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan, investor dapat mengalami kerugian yang signifikan. Dengan adanya audit independen, risiko penggunaan informasi yang tidak andal dapat dikurangi sehingga investor memperoleh perlindungan yang lebih baik dalam melakukan investasi. Kondisi ini pada akhirnya mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih efisien dan terpercaya.

Bagi kreditur dan lembaga keuangan, audit laporan keuangan bertujuan menyediakan dasar yang lebih kuat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Bank dan lembaga pembiayaan sering kali mensyaratkan laporan keuangan yang telah diaudit sebelum memberikan pinjaman atau fasilitas kredit. Melalui laporan audit, kreditur memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan, tingkat likuiditas, profitabilitas, dan kemampuan membayar utang. Informasi tersebut menjadi faktor penting dalam proses analisis risiko

kredit.

Dalam sektor publik, audit laporan keuangan bertujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara atau daerah dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, audit atas laporan keuangan pemerintah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Hasil audit dapat digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan negara sekaligus mendorong peningkatan kinerja organisasi sektor publik.

Seiring perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi, tujuan audit laporan keuangan juga mengalami perluasan. Auditor kini diharapkan mampu memberikan keyakinan mengenai kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berbasis teknologi, menilai risiko-risiko yang muncul akibat transformasi digital, serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Audit tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pemeriksaan historis, tetapi juga sebagai sarana yang membantu organisasi meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengelola risiko secara lebih efektif.

6.4 Karakteristik Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari bentuk pemeriksaan atau evaluasi lainnya. Karakteristik tersebut menjadi landasan yang memastikan bahwa proses audit dapat menghasilkan

kesimpulan yang objektif, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Pemahaman mengenai karakteristik audit laporan keuangan sangat penting karena memberikan gambaran tentang bagaimana audit dilaksanakan, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta nilai yang dihasilkan bagi organisasi dan para pengguna laporan keuangan. Melalui karakteristik-karakteristik tersebut, audit laporan keuangan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan.

Salah satu karakteristik utama audit laporan keuangan adalah sifatnya yang independen. Independensi merupakan kondisi di mana auditor tidak memiliki kepentingan pribadi maupun hubungan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor harus mampu menjaga sikap netral dan bebas dari tekanan pihak mana pun, termasuk manajemen perusahaan yang menjadi objek audit. Independensi tidak hanya berkaitan dengan kondisi nyata (*independence in fact*), tetapi juga dengan persepsi publik terhadap auditor (*independence in appearance*). Apabila independensi auditor diragukan, maka hasil audit akan kehilangan kredibilitas dan kepercayaan dari para pengguna laporan keuangan.

Karakteristik berikutnya adalah objektivitas. Audit laporan keuangan dilakukan berdasarkan fakta, bukti, dan data yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Auditor tidak boleh mendasarkan kesimpulan pada asumsi pribadi, preferensi individu, atau tekanan dari pihak tertentu. Setiap penilaian yang diberikan harus didukung oleh bukti audit yang

memadai dan relevan. Objektivitas menjadi salah satu prinsip etika profesi yang harus dijaga agar hasil audit dapat diterima dan dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan.

Audit laporan keuangan juga memiliki karakteristik sebagai proses yang sistematis dan terstruktur. Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam standar audit, mulai dari perencanaan, identifikasi risiko, pengumpulan bukti, evaluasi hasil pemeriksaan, hingga penyusunan laporan audit. Pendekatan yang sistematis memungkinkan auditor bekerja secara terarah dan konsisten dalam mencapai tujuan audit. Dengan adanya prosedur yang terstruktur, risiko terjadinya kesalahan dalam proses pemeriksaan dapat diminimalkan sehingga kualitas audit dapat terjaga.

Karakteristik penting lainnya adalah penggunaan bukti audit sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Dalam audit laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan opini hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan pribadi. Setiap kesimpulan harus didukung oleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti audit dapat berupa dokumen transaksi, laporan keuangan, konfirmasi dari pihak ketiga, hasil observasi, wawancara, maupun data elektronik yang relevan. Kualitas opini auditor sangat dipengaruhi oleh kualitas bukti yang diperoleh selama proses audit. Oleh karena itu, auditor harus mampu mengumpulkan, mengevaluasi, dan mendokumentasikan bukti audit secara profesional.

Karakteristik lain yang melekat pada audit laporan keuangan adalah penggunaan pertimbangan profesional (*professional judgment*). Dalam pelaksanaan audit, auditor

sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan penilaian dan keputusan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta kompetensi profesional. Misalnya, auditor harus menentukan tingkat materialitas, menilai risiko audit, memilih prosedur pemeriksaan yang tepat, dan mengevaluasi dampak temuan audit terhadap laporan keuangan. Pertimbangan profesional menjadi faktor penting karena tidak semua kondisi yang dihadapi auditor dapat diatur secara rinci dalam standar audit.

Audit laporan keuangan juga memiliki karakteristik yang berorientasi pada materialitas. Auditor tidak memeriksa seluruh transaksi secara detail karena hal tersebut tidak praktis dan memerlukan biaya yang sangat besar. Sebaliknya, auditor memusatkan perhatian pada akun, transaksi, atau informasi yang memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Konsep materialitas membantu auditor menentukan area-area yang memerlukan perhatian lebih besar sehingga sumber daya audit dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, audit difokuskan pada hal-hal yang benar-benar penting bagi pengguna laporan keuangan.

Karakteristik berikutnya adalah pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Dalam praktik audit modern, auditor tidak lagi memeriksa seluruh aspek laporan keuangan dengan tingkat intensitas yang sama. Auditor terlebih dahulu mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material yang mungkin terjadi pada setiap area laporan keuangan. Area yang memiliki risiko tinggi akan mendapatkan perhatian dan pengujian yang lebih mendalam dibandingkan area dengan risiko rendah. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan

auditor meningkatkan efektivitas pemeriksaan sekaligus mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya yang tersedia.

Audit laporan keuangan juga memiliki karakteristik sebagai proses yang memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance), bukan keyakinan absolut. Auditor berupaya memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, tetapi tidak dapat menjamin bahwa seluruh kesalahan atau kecurangan pasti terdeteksi. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penggunaan teknik sampling, keterbatasan waktu pemeriksaan, kemungkinan adanya kolusi, serta penggunaan pertimbangan profesional dalam proses audit. Oleh karena itu, hasil audit harus dipahami sebagai bentuk keyakinan profesional yang memadai, bukan jaminan mutlak atas kebenaran seluruh informasi dalam laporan keuangan.

Karakteristik audit laporan keuangan lainnya adalah kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku. Auditor wajib melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi maupun regulator. Standar tersebut mengatur berbagai aspek pelaksanaan audit, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti, dokumentasi, pengendalian mutu, dan pelaporan hasil audit. Kepatuhan terhadap standar audit bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara konsisten, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Audit laporan keuangan juga memiliki karakteristik sebagai aktivitas yang berorientasi pada pelaporan. Hasil akhir

dari proses audit adalah laporan auditor independen yang berisi opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Laporan audit menjadi sarana komunikasi formal antara auditor dengan para pengguna laporan keuangan. Melalui laporan tersebut, auditor menyampaikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan bukti audit yang telah dikumpulkan dan dievaluasi. Oleh karena itu, kualitas pelaporan audit menjadi faktor penting dalam menyampaikan hasil pemeriksaan secara jelas, transparan, dan mudah dipahami.

Dalam era digital, karakteristik audit laporan keuangan semakin berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi informasi. Auditor kini tidak hanya memeriksa dokumen fisik, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap sistem informasi akuntansi, pengendalian teknologi informasi, dan keamanan data digital. Penggunaan perangkat lunak audit, analisis data berbasis komputer, serta teknologi kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari praktik audit modern. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar audit seperti independensi, objektivitas, profesionalisme, dan penggunaan bukti audit tetap menjadi fondasi utama yang tidak berubah.

Karakteristik audit laporan keuangan juga mencerminkan fungsi audit sebagai instrumen tata kelola organisasi. Audit tidak hanya memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas organisasi. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama proses audit dapat membantu manajemen memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, serta

mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan di masa mendatang.

6.5 Tahapan Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk memperoleh bukti audit yang memadai dalam rangka memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Agar tujuan audit dapat tercapai secara efektif dan efisien, auditor harus mengikuti tahapan-tahapan audit yang telah ditetapkan dalam standar profesi. Setiap tahapan memiliki tujuan, prosedur, dan aktivitas yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Pelaksanaan tahapan audit yang tepat akan membantu auditor mengidentifikasi risiko, memperoleh bukti yang relevan, serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Tahapan pertama dalam audit laporan keuangan adalah penerimaan dan perencanaan penugasan audit. Pada tahap ini auditor melakukan berbagai pertimbangan awal sebelum menerima atau melanjutkan hubungan kerja dengan klien. Auditor akan menilai integritas manajemen, independensi tim audit, risiko penugasan, serta kemampuan kantor akuntan publik dalam melaksanakan audit tersebut. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, auditor dan klien akan menyepakati ruang lingkup audit yang dituangkan dalam surat perikatan audit (engagement letter). Dokumen ini berfungsi sebagai dasar formal yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta tujuan audit yang akan dilakukan.

Setelah penugasan diterima, auditor memasuki tahap perencanaan audit. Tahap ini merupakan fondasi penting yang menentukan efektivitas seluruh proses audit. Dalam tahap perencanaan, auditor berupaya memahami karakteristik bisnis klien, struktur organisasi, lingkungan industri, model operasional, kebijakan akuntansi, serta faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi laporan keuangan. Pemahaman yang memadai mengenai entitas akan membantu auditor mengidentifikasi area-area yang memiliki risiko tinggi sehingga prosedur audit dapat dirancang secara lebih tepat sasaran.

Pada tahap perencanaan, auditor juga melakukan penilaian risiko audit. Risiko audit adalah kemungkinan auditor memberikan opini yang tidak tepat terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Untuk mengurangi risiko tersebut, auditor melakukan analisis terhadap berbagai sumber risiko yang berasal dari lingkungan bisnis, sistem pengendalian internal, maupun karakteristik transaksi perusahaan. Penilaian risiko ini menjadi dasar dalam menentukan strategi audit, alokasi sumber daya, serta jenis dan luasnya prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan.

Selain menilai risiko, auditor juga menetapkan tingkat materialitas. Materialitas merupakan batas atau ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kesalahan atau salah saji cukup signifikan sehingga dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Penetapan materialitas membantu auditor dalam menentukan fokus pemeriksaan dan mengevaluasi dampak temuan audit terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan materialitas, auditor dapat mengarahkan perhatian pada area yang paling penting dan relevan.

Tahapan berikutnya adalah memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk menjaga aset perusahaan, memastikan keandalan pelaporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Auditor mempelajari struktur pengendalian internal untuk menilai apakah sistem tersebut mampu mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan secara efektif. Evaluasi ini dilakukan melalui wawancara, observasi, inspeksi dokumen, dan pengujian terhadap prosedur pengendalian yang diterapkan perusahaan.

Hasil evaluasi pengendalian internal akan menentukan pendekatan audit yang digunakan. Jika auditor menilai bahwa pengendalian internal perusahaan berjalan efektif, maka auditor dapat mengurangi tingkat pengujian substantif yang dilakukan. Sebaliknya, apabila ditemukan kelemahan yang signifikan dalam pengendalian internal, auditor harus memperluas prosedur audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, tahap evaluasi pengendalian internal memiliki peran penting dalam menentukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit.

Setelah memahami sistem pengendalian internal, auditor melaksanakan pengujian pengendalian (test of controls).

Tujuan pengujian ini adalah untuk memperoleh bukti mengenai efektivitas operasional pengendalian internal yang telah dirancang oleh perusahaan. Auditor melakukan pengujian terhadap berbagai aktivitas pengendalian, seperti otorisasi transaksi, pemisahan tugas, rekonsiliasi, dan pengawasan manajemen. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian berjalan dengan baik, auditor dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap sistem yang digunakan perusahaan.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan prosedur substantif. Tahap ini merupakan inti dari proses audit laporan keuangan karena auditor secara langsung memeriksa akun-akun dan transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengujian substantif bertujuan untuk mendeteksi salah saji material yang mungkin tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh sistem pengendalian internal perusahaan. Auditor melakukan berbagai prosedur pemeriksaan, seperti pemeriksaan dokumen pendukung, konfirmasi kepada pihak ketiga, observasi fisik aset, rekonsiliasi, analisis rasio keuangan, serta pengujian rinci terhadap transaksi dan saldo akun.

Dalam pelaksanaan prosedur substantif, auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan audit. Bukti audit dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Misalnya, auditor dapat meminta konfirmasi saldo piutang kepada pelanggan, memperoleh konfirmasi saldo kas dari bank, melakukan pengamatan langsung terhadap persediaan, atau memeriksa kontrak dan dokumen hukum yang berkaitan dengan transaksi perusahaan. Semakin tinggi kualitas dan

relevansi bukti yang diperoleh, semakin kuat dasar bagi auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan.

Setelah seluruh prosedur audit selesai dilaksanakan, auditor memasuki tahap evaluasi hasil audit. Pada tahap ini auditor menelaah seluruh bukti yang telah dikumpulkan dan menilai apakah bukti tersebut telah memadai untuk mendukung kesimpulan audit. Auditor juga mengevaluasi seluruh salah saji yang ditemukan selama pemeriksaan dan menentukan apakah salah saji tersebut bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, auditor mempertimbangkan berbagai peristiwa setelah tanggal neraca (subsequent events) yang mungkin memiliki dampak terhadap laporan keuangan.

Tahap evaluasi juga mencakup komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti dewan komisaris atau komite audit. Auditor menyampaikan berbagai temuan penting, kelemahan pengendalian internal, serta isu-isu signifikan yang ditemukan selama proses audit. Komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta memberikan kesempatan kepada manajemen untuk memberikan klarifikasi atau melakukan perbaikan yang diperlukan sebelum laporan audit diterbitkan.

Tahapan terakhir dalam audit laporan keuangan adalah penyusunan dan penerbitan laporan auditor independen. Laporan audit merupakan produk akhir dari seluruh proses pemeriksaan yang berisi opini auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, auditor dapat memberikan opini wajar tanpa

pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau pernyataan tidak memberikan opini. Jenis opini yang diberikan bergantung pada kondisi laporan keuangan dan kecukupan bukti audit yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

6.6 Bukti Audit dalam Audit Laporan Keuangan

Bukti audit merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Seluruh opini yang diberikan auditor pada akhirnya harus didasarkan pada bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Tanpa adanya bukti yang memadai dan relevan, auditor tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, pengumpulan dan evaluasi bukti audit menjadi salah satu aktivitas utama dalam setiap penugasan audit laporan keuangan. Kualitas hasil audit sangat dipengaruhi oleh kualitas bukti yang berhasil diperoleh auditor selama proses pemeriksaan.

Secara umum, bukti audit dapat diartikan sebagai seluruh informasi yang digunakan auditor untuk mendukung kesimpulan dan opini audit. Informasi tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik yang diperoleh secara langsung oleh auditor maupun yang disediakan oleh pihak yang diaudit. Bukti audit mencakup dokumen transaksi, catatan akuntansi, laporan keuangan, konfirmasi dari pihak ketiga, hasil observasi, wawancara, perhitungan ulang, hingga data elektronik yang tersimpan dalam sistem informasi perusahaan. Auditor harus melakukan penilaian terhadap keandalan,

relevansi, dan kecukupan bukti sebelum menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan audit.

Dalam standar audit, terdapat dua karakteristik utama yang harus dipenuhi oleh bukti audit, yaitu kecukupan (sufficiency) dan ketepatan (appropriateness). Kecukupan berkaitan dengan jumlah bukti yang dikumpulkan oleh auditor. Semakin tinggi risiko salah saji material yang dihadapi, semakin banyak bukti yang perlu diperoleh untuk mendukung kesimpulan audit. Sementara itu, ketepatan berkaitan dengan kualitas bukti audit, termasuk relevansi dan keandalannya. Bukti yang berkualitas tinggi akan memberikan tingkat keyakinan yang lebih besar dibandingkan bukti yang kualitasnya rendah. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara seimbang dalam proses pengumpulan bukti audit.

Keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan cara perolehannya. Secara umum, bukti yang diperoleh dari pihak eksternal dianggap lebih andal dibandingkan bukti yang berasal dari dalam organisasi. Sebagai contoh, konfirmasi saldo bank yang diperoleh langsung dari pihak bank memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dibandingkan catatan saldo kas yang disusun oleh perusahaan. Demikian pula, dokumen asli lebih dapat dipercaya dibandingkan salinan dokumen. Bukti yang diperoleh secara langsung melalui observasi atau pemeriksaan oleh auditor juga cenderung lebih andal dibandingkan informasi yang hanya disampaikan secara lisan oleh pihak manajemen.

Bukti audit dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan sumber dan bentuknya. Salah satu jenis bukti

yang paling umum adalah bukti dokumenter. Bukti ini berupa dokumen fisik maupun elektronik yang mendukung terjadinya suatu transaksi atau peristiwa ekonomi. Contohnya adalah faktur penjualan, bukti pembayaran, kontrak kerja sama, laporan bank, kuitansi, dan dokumen perpajakan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan auditor untuk memverifikasi apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi dan telah dicatat secara tepat.

Jenis bukti audit lainnya adalah bukti fisik. Bukti fisik diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap aset yang dimiliki perusahaan. Auditor dapat melakukan inspeksi fisik terhadap persediaan barang, aset tetap, kas, atau aset lainnya untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset tersebut. Misalnya, auditor dapat menghadiri proses stock opname persediaan untuk memverifikasi jumlah barang yang tercatat dalam laporan keuangan. Bukti fisik sering kali digunakan untuk menguji asersi keberadaan (existence) dan kondisi aset perusahaan.

Selain bukti dokumenter dan fisik, auditor juga menggunakan bukti konfirmasi. Konfirmasi merupakan proses memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang independen. Konfirmasi sering digunakan untuk memverifikasi saldo piutang usaha, saldo kas di bank, investasi, maupun kewajiban perusahaan. Auditor mengirimkan permintaan konfirmasi kepada pihak terkait dan menerima tanggapan secara langsung tanpa melalui manajemen perusahaan. Karena berasal dari sumber eksternal yang independen, bukti konfirmasi umumnya dianggap memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

Bukti audit juga dapat diperoleh melalui prosedur observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan suatu aktivitas atau prosedur yang diterapkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, auditor dapat mengamati proses penerimaan kas, pelaksanaan stock opname, atau prosedur pengendalian internal tertentu. Melalui observasi, auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Namun, bukti observasi memiliki keterbatasan karena hanya mencerminkan kondisi pada saat pengamatan dilakukan.

Jenis bukti lainnya adalah hasil wawancara atau permintaan keterangan (inquiry). Auditor sering melakukan diskusi dengan manajemen, karyawan, maupun pihak lain yang terkait untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan. Meskipun wawancara dapat memberikan informasi yang berguna, bukti yang diperoleh melalui metode ini umumnya tidak cukup kuat jika berdiri sendiri. Oleh karena itu, auditor biasanya menggabungkan hasil wawancara dengan jenis bukti lain untuk meningkatkan tingkat keyakinan terhadap informasi yang diperoleh.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, auditor juga menggunakan prosedur perhitungan ulang (recalculation). Melalui prosedur ini, auditor memeriksa kembali ketepatan perhitungan matematis yang dilakukan perusahaan. Misalnya, auditor dapat menghitung ulang penyusutan aset tetap, perhitungan pajak, bunga pinjaman, atau total saldo akun tertentu. Tujuan dari prosedur ini adalah memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan perhitungan yang dapat

menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan.

Selain itu, auditor sering menggunakan prosedur analitis sebagai sumber bukti audit. Prosedur analitis dilakukan dengan membandingkan data keuangan antarperiode, menganalisis hubungan antar akun, serta membandingkan data perusahaan dengan standar industri atau anggaran yang telah ditetapkan. Melalui analisis tersebut, auditor dapat mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa atau hubungan yang tidak konsisten sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Prosedur analitis menjadi semakin penting dalam audit modern karena memungkinkan auditor mengevaluasi data dalam jumlah besar secara lebih efisien.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap bentuk dan sumber bukti audit. Saat ini sebagian besar transaksi bisnis diproses dan disimpan dalam bentuk digital. Oleh karena itu, auditor harus mampu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti elektronik yang berasal dari sistem informasi perusahaan. Bukti digital dapat berupa data transaksi elektronik, log aktivitas sistem, dokumen elektronik, basis data, maupun laporan yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem komputer. Penggunaan teknologi audit berbantuan komputer (Computer Assisted Audit Techniques/CAATs) memungkinkan auditor melakukan analisis data secara lebih cepat dan akurat.

Meskipun bukti audit memiliki peran yang sangat penting, auditor juga harus menyadari adanya keterbatasan dalam proses pengumpulan bukti. Tidak semua bukti dapat diperoleh dengan mudah, dan tidak semua informasi yang tersedia memiliki tingkat keandalan yang sama. Selain itu,

keterbatasan waktu, biaya, serta kompleksitas transaksi dapat memengaruhi kemampuan auditor dalam memperoleh bukti yang ideal. Oleh karena itu, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan jenis, jumlah, dan kualitas bukti yang diperlukan untuk mendukung opini audit.

Pada akhirnya, bukti audit merupakan fondasi utama dalam audit laporan keuangan. Seluruh kesimpulan dan opini auditor harus didukung oleh bukti yang cukup, tepat, relevan, dan andal. Melalui pengumpulan dan evaluasi bukti audit yang dilakukan secara sistematis, auditor dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian, bukti audit tidak hanya menjadi alat untuk mendukung proses pemeriksaan, tetapi juga menjadi faktor penentu kualitas dan kredibilitas hasil audit yang dihasilkan.

6.7 Opini Auditor atas Laporan Keuangan

Opini auditor merupakan hasil akhir dari proses audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen. Setelah melalui berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari perencanaan audit, penilaian risiko, pengujian pengendalian internal, pengumpulan bukti audit, hingga evaluasi hasil pemeriksaan, auditor menyampaikan kesimpulannya dalam bentuk opini yang tercantum dalam laporan auditor independen. Opini tersebut menjadi sarana komunikasi utama antara auditor dengan para pengguna laporan keuangan mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, opini auditor memiliki nilai yang

sangat penting karena sering dijadikan dasar oleh investor, kreditor, regulator, dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi.

Secara umum, opini auditor merupakan pernyataan profesional yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini auditor tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa laporan keuangan sepenuhnya bebas dari kesalahan, melainkan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dalam memberikan opini, auditor harus berpedoman pada bukti audit yang cukup dan tepat serta menerapkan pertimbangan profesional secara objektif dan independen.

Pentingnya opini auditor tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan para pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang andal. Investor menggunakan opini auditor untuk menilai tingkat kredibilitas laporan keuangan sebelum melakukan investasi. Kreditor memanfaatkan opini tersebut dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Sementara itu, pemerintah dan regulator menggunakan hasil audit sebagai salah satu indikator kepatuhan perusahaan terhadap standar pelaporan keuangan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, opini auditor berfungsi sebagai instrumen yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh organisasi.

Dalam praktik audit, terdapat empat jenis opini utama yang dapat diberikan auditor, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adverse opinion), dan pernyataan tidak memberikan opini (disclaimer of opinion). Masing-masing opini memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda terhadap persepsi pengguna laporan keuangan. Penentuan jenis opini yang diberikan auditor bergantung pada hasil evaluasi terhadap bukti audit yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

Opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion merupakan opini yang paling diharapkan oleh setiap organisasi. Opini ini menunjukkan bahwa auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat serta menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan kata lain, auditor tidak menemukan salah saji material yang dapat memengaruhi keseluruhan laporan keuangan. Opini wajar tanpa pengecualian memberikan sinyal positif kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pemberian opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti bahwa perusahaan terbebas sepenuhnya dari kesalahan atau kelemahan. Dalam praktiknya, hampir semua organisasi memiliki kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan atau kelemahan tertentu dalam sistem pengendalian internal. Namun, selama kesalahan tersebut tidak bersifat material dan tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara

keseluruhan, auditor tetap dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Oleh karena itu, opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan secara umum telah memenuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku.

Jenis opini berikutnya adalah opini wajar dengan pengecualian atau *qualified opinion*. Opini ini diberikan ketika auditor menemukan adanya salah saji material atau pembatasan ruang lingkup audit yang memengaruhi sebagian aspek laporan keuangan, tetapi dampaknya tidak begitu luas sehingga tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam kondisi ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar kecuali untuk hal tertentu yang dijelaskan dalam laporan audit. Opini wajar dengan pengecualian mengindikasikan bahwa pengguna laporan keuangan perlu memberikan perhatian khusus pada area yang menjadi pengecualian tersebut.

Sebagai contoh, auditor dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian apabila perusahaan tidak dapat menyediakan dokumen pendukung yang memadai untuk sebagian transaksi tertentu, atau ketika terdapat penyimpangan dalam penerapan kebijakan akuntansi yang berdampak material pada satu akun tertentu. Dalam situasi tersebut, auditor tetap meyakini bahwa sebagian besar laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi pengguna laporan keuangan perlu mempertimbangkan dampak dari pengecualian yang disebutkan auditor.

Opini tidak wajar atau *adverse opinion* merupakan opini yang paling serius dalam audit laporan keuangan. Opini ini diberikan apabila auditor menemukan bahwa laporan

keuangan mengandung salah saji material yang sangat signifikan dan berdampak luas sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar. Dalam keadaan seperti ini, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan berpotensi menyesatkan para pengguna informasi keuangan.

Pemberian opini tidak wajar biasanya terjadi ketika terdapat penyimpangan yang besar dalam pencatatan atau pelaporan keuangan, seperti pengakuan pendapatan yang tidak sesuai standar, kesalahan signifikan dalam penilaian aset, atau pengungkapan informasi yang tidak memadai. Opini ini dapat menimbulkan dampak yang serius bagi perusahaan karena dapat menurunkan kepercayaan investor, kreditor, dan pihak-pihak lainnya. Dalam banyak kasus, opini tidak wajar juga dapat memicu tindakan pengawasan lebih lanjut dari regulator dan otoritas terkait.

Jenis opini terakhir adalah pernyataan tidak memberikan opini atau disclaimer of opinion. Opini ini diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk membentuk suatu opini mengenai laporan keuangan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya pembatasan ruang lingkup audit yang sangat signifikan, ketidakterediaan dokumen penting, atau situasi lain yang menghambat auditor dalam melaksanakan prosedur audit yang diperlukan. Dalam kasus ini, auditor tidak menyatakan bahwa laporan keuangan benar ataupun salah, tetapi menyatakan bahwa ia tidak memiliki dasar yang memadai untuk memberikan opini.

Disclaimer of opinion sering dianggap sebagai sinyal yang perlu diwaspadai oleh para pengguna laporan keuangan karena menunjukkan adanya ketidakpastian yang signifikan dalam proses audit. Misalnya, apabila perusahaan mengalami bencana yang menyebabkan hilangnya catatan akuntansi penting atau manajemen menolak memberikan akses terhadap informasi yang diperlukan auditor, maka auditor mungkin tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung opini audit. Dalam kondisi tersebut, auditor memilih untuk tidak memberikan opini daripada memberikan opini yang tidak didukung oleh bukti yang memadai.

Dalam perkembangan praktik audit modern, laporan auditor independen juga dapat memuat paragraf penekanan suatu hal (*emphasis of matter*) atau paragraf hal lain (*other matter*). Paragraf ini digunakan untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan terhadap informasi tertentu yang dianggap penting untuk dipahami, meskipun tidak memengaruhi jenis opini yang diberikan. Contohnya adalah ketidakpastian hukum yang signifikan, perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak besar, atau kondisi ekonomi tertentu yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan.

Opini auditor memiliki dampak yang luas terhadap reputasi dan keberlangsungan organisasi. Perusahaan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian umumnya lebih mudah mendapatkan kepercayaan investor, memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan, serta meningkatkan citra positif di mata publik. Sebaliknya, opini yang mengandung pengecualian, opini tidak wajar, atau disclaimer of opinion

dapat menimbulkan keraguan terhadap kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perlu memastikan bahwa sistem akuntansi dan pengendalian internal berjalan secara efektif agar laporan keuangan yang disusun memenuhi standar yang berlaku.

6.8 Tantangan Audit Laporan Keuangan di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang akuntansi dan audit. Digitalisasi proses bisnis, penggunaan sistem informasi terintegrasi, perkembangan teknologi komputasi awan (cloud computing), kecerdasan buatan (artificial intelligence), big data, serta transaksi elektronik telah mengubah cara organisasi mengelola dan melaporkan informasi keuangannya. Perubahan tersebut memberikan berbagai manfaat berupa peningkatan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pengolahan data. Namun, di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Auditor dituntut untuk mampu menyesuaikan metode, teknik, dan kompetensi yang dimiliki agar tetap dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran laporan keuangan di lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

Salah satu tantangan utama audit laporan keuangan di era digital adalah meningkatnya kompleksitas sistem informasi akuntansi. Pada masa lalu, sebagian besar transaksi bisnis

dicatat secara manual dan didokumentasikan dalam bentuk fisik. Saat ini, hampir seluruh aktivitas keuangan perusahaan diproses melalui sistem komputer yang terintegrasi. Penggunaan Enterprise Resource Planning (ERP), aplikasi akuntansi berbasis cloud, dan sistem transaksi elektronik menyebabkan data keuangan tersimpan dalam bentuk digital yang sangat besar dan kompleks. Auditor tidak lagi hanya memeriksa dokumen fisik, tetapi juga harus memahami alur data elektronik, sistem basis data, serta berbagai aplikasi yang digunakan perusahaan. Kondisi ini menuntut auditor memiliki kemampuan teknologi informasi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Tantangan berikutnya adalah meningkatnya risiko keamanan siber (cybersecurity risk). Organisasi modern sangat bergantung pada sistem teknologi informasi dalam menjalankan operasional dan pelaporan keuangannya. Ketergantungan tersebut menyebabkan perusahaan rentan terhadap berbagai ancaman siber, seperti peretasan, pencurian data, malware, ransomware, maupun manipulasi data elektronik. Serangan siber dapat mengakibatkan hilangnya data penting, terganggunya proses bisnis, bahkan penyajian informasi keuangan yang tidak akurat. Dalam konteks audit laporan keuangan, auditor harus mampu mengevaluasi apakah perusahaan telah menerapkan pengendalian keamanan informasi yang memadai untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data keuangan.

Selain risiko keamanan siber, auditor juga menghadapi tantangan terkait keandalan bukti audit elektronik. Dalam

sistem digital, sebagian besar transaksi tidak lagi menghasilkan dokumen fisik sebagai bukti pendukung. Data transaksi tersimpan dalam server, basis data, atau platform berbasis cloud yang dapat diakses secara elektronik. Auditor harus memastikan bahwa bukti digital yang diperoleh memiliki tingkat keandalan yang memadai untuk mendukung opini audit. Proses verifikasi bukti elektronik sering kali lebih kompleks dibandingkan pemeriksaan dokumen konvensional karena auditor harus memahami sistem yang menghasilkan data tersebut, termasuk mekanisme pengendalian yang diterapkan untuk menjaga integritas informasi.

Perkembangan big data juga menjadi tantangan sekaligus peluang dalam audit laporan keuangan. Saat ini perusahaan menghasilkan volume data yang sangat besar setiap hari melalui berbagai aktivitas operasional dan transaksi digital. Jumlah data yang terus meningkat dapat menyulitkan auditor apabila masih menggunakan pendekatan audit tradisional yang mengandalkan pengujian sampel dalam jumlah terbatas. Auditor perlu mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi analitik data (data analytics) untuk mengolah, menganalisis, dan mengidentifikasi pola-pola tertentu dari kumpulan data yang sangat besar. Penggunaan analisis data memungkinkan auditor memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko dan potensi salah saji dalam laporan keuangan.

Tantangan lainnya adalah munculnya teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan otomatisasi proses bisnis. Banyak perusahaan telah memanfaatkan AI untuk mendukung pengambilan keputusan, pengolahan

transaksi, serta penyusunan laporan keuangan. Meskipun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, penggunaan AI juga menimbulkan risiko baru yang perlu dievaluasi auditor. Misalnya, kesalahan algoritma, bias dalam pemrograman sistem, atau kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan otomatis dapat memengaruhi kualitas informasi keuangan. Auditor harus memahami bagaimana teknologi tersebut bekerja serta menilai dampaknya terhadap keandalan laporan keuangan yang dihasilkan.

Transformasi digital juga meningkatkan risiko terjadinya kecurangan yang semakin canggih. Jika pada masa lalu kecurangan sering dilakukan melalui manipulasi dokumen fisik, saat ini pelaku dapat memanfaatkan teknologi untuk memodifikasi data elektronik, menyembunyikan transaksi, atau mengakses sistem secara tidak sah. Kecurangan berbasis teknologi sering kali lebih sulit dideteksi karena tidak meninggalkan jejak fisik yang jelas. Oleh karena itu, auditor perlu mengembangkan teknik audit berbasis teknologi yang mampu mengidentifikasi indikasi kecurangan dalam lingkungan digital. Penggunaan perangkat lunak audit, analisis pola transaksi, dan pengujian berbasis data menjadi semakin penting dalam mendeteksi potensi fraud.

Tantangan lain yang dihadapi auditor adalah perubahan regulasi dan standar profesi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi informasi mendorong regulator dan organisasi profesi untuk memperbarui berbagai standar yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, perlindungan data, keamanan informasi, dan audit teknologi informasi. Auditor

harus selalu mengikuti perkembangan tersebut agar dapat melaksanakan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakmampuan untuk memahami perubahan regulasi dapat menyebabkan auditor menghadapi risiko hukum maupun risiko reputasi dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.

Dalam lingkungan bisnis global, auditor juga menghadapi tantangan terkait penggunaan layanan cloud computing dan penyimpanan data lintas negara. Banyak organisasi saat ini menyimpan data keuangan pada server yang berlokasi di berbagai negara melalui penyedia layanan cloud. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait akses data, perlindungan privasi, keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berbeda di setiap yurisdiksi. Auditor harus memahami risiko-risiko tersebut dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tetap dapat diandalkan dan diaudit secara memadai.

Perubahan pola kerja akibat digitalisasi juga memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan audit. Meningkatnya penggunaan sistem kerja jarak jauh (remote working), komunikasi virtual, dan pertukaran dokumen secara elektronik menyebabkan auditor harus menyesuaikan metode pengumpulan bukti audit. Auditor tidak selalu dapat melakukan observasi langsung atau pemeriksaan fisik di lokasi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan audit yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan kolaborasi digital tanpa mengurangi kualitas serta integritas proses audit.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, auditor perlu terus meningkatkan kompetensi profesionalnya. Penguasaan prinsip-prinsip akuntansi dan audit saja tidak lagi cukup dalam era digital. Auditor juga harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai teknologi informasi, keamanan siber, analisis data, kecerdasan buatan, serta sistem informasi akuntansi. Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional menjadi sangat penting agar auditor mampu mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan teknologi yang terus berubah.

Selain peningkatan kompetensi individu, kantor akuntan publik juga perlu berinvestasi dalam teknologi audit modern. Penggunaan Computer Assisted Audit Techniques (CAATs), perangkat lunak analisis data, teknologi continuous auditing, dan berbagai alat audit digital lainnya dapat membantu auditor meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan. Teknologi tersebut memungkinkan auditor mengakses dan menganalisis data dalam jumlah besar secara lebih cepat, akurat, dan komprehensif dibandingkan metode audit konvensional.

Secara keseluruhan, era digital telah mengubah lanskap audit laporan keuangan secara fundamental. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang besar bagi auditor untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemeriksaan. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan berbagai risiko dan tantangan baru yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, serta pendekatan audit yang berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, auditor harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memahami

risiko-*risiko* digital, dan memanfaatkan inovasi secara optimal agar tetap dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran laporan keuangan. Dengan kesiapan yang baik, audit laporan keuangan akan tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Hery. (2022). Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan. Bandung: Yrama Widya.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP). (2021). Standar Audit (SA) 2021. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP). (2021). SA 200 (Revisi 2021): Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP). (2021). SA 300 (Revisi 2021): Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP). (2021). SA 315 (Revisi 2021): Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP). (2021). SA 320 (Revisi 2021): Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP). (2021). SA 330 (Revisi 2021): Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP). (2021). SA 500 (Revisi 2021): Bukti Audit. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP). (2021). SA 505 (Revisi 2021): Konfirmasi Eksternal. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP). (2021). SA 520 (Revisi 2021): Prosedur Analitis. Jakarta: IAPI.

- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). SA 570 (Revisi 2021): Kelangsungan Usaha. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). SA 700 (Revisi 2021): Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). SA 705 (Revisi 2021): Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). SA 706 (Revisi 2021): Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen. Jakarta: IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). SA 720 (Revisi 2021): Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain. Jakarta: IAPI.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Jakarta: IAI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Pedoman Tata Kelola, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Asosiasi Auditor Internal Indonesia (AAIL). (2023). Audit Berbasis Risiko dan Transformasi Digital dalam Pengawasan Keuangan. Jakarta: AAIL.

BAB 7

MANAJEMEN TEMUAN, REKOMENDASI, DAN TINDAK LANJUT AUDIT

Oleh : Karina Sukardi

7.1 Pendahuluan

Audit keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pengawasan dan pengendalian organisasi. Melalui audit, auditor melakukan pemeriksaan secara sistematis terhadap berbagai aktivitas, transaksi, dan laporan keuangan untuk menilai tingkat kepatuhan, efektivitas pengendalian internal, serta kewajaran penyajian informasi keuangan. Namun demikian, keberhasilan audit tidak hanya ditentukan oleh kemampuan auditor dalam menemukan permasalahan atau menyusun laporan audit yang berkualitas. Nilai tambah yang sesungguhnya dari proses audit terletak pada bagaimana temuan audit tersebut dikelola, ditindaklanjuti, dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Oleh karena itu, manajemen temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut audit menjadi bagian yang sangat penting dalam keseluruhan siklus audit keuangan.

Dalam praktiknya, banyak organisasi yang telah melaksanakan audit secara rutin, tetapi belum mampu mengoptimalkan manfaat dari hasil audit yang diperoleh. Tidak sedikit temuan audit yang hanya terdokumentasi dalam laporan tanpa adanya tindak lanjut yang memadai. Akibatnya,

permasalahan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun dan menyebabkan terjadinya inefisiensi, pemborosan sumber daya, serta meningkatnya risiko organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa audit yang efektif tidak hanya menghasilkan laporan yang baik, tetapi juga mendorong perubahan nyata melalui implementasi rekomendasi yang diberikan auditor. Dengan kata lain, kualitas audit harus diukur tidak hanya dari temuan yang dihasilkan, tetapi juga dari keberhasilan organisasi dalam menindaklanjuti hasil audit tersebut.

Manajemen temuan audit merupakan proses yang mencakup identifikasi, dokumentasi, analisis, pelaporan, pemantauan, dan penyelesaian berbagai temuan yang dihasilkan selama proses audit. Setiap temuan audit pada dasarnya menggambarkan adanya kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya sesuai dengan standar, kebijakan, prosedur, atau peraturan yang berlaku. Temuan tersebut dapat berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap regulasi, ketidakefisienan operasional, kesalahan pencatatan keuangan, maupun berbagai bentuk risiko lainnya yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan temuan audit secara sistematis sangat diperlukan agar organisasi dapat memahami akar permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya.

Selain temuan audit, rekomendasi audit juga merupakan komponen yang sangat penting dalam proses perbaikan organisasi. Rekomendasi audit merupakan saran atau tindakan korektif yang diberikan auditor untuk mengatasi kelemahan

atau permasalahan yang ditemukan selama pemeriksaan. Rekomendasi yang baik tidak hanya menjelaskan apa yang harus diperbaiki, tetapi juga memberikan arahan mengenai bagaimana perbaikan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam banyak kasus, rekomendasi audit menjadi dasar bagi manajemen untuk menyusun program perbaikan, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan memperbaiki proses bisnis yang kurang efektif.

Keberhasilan implementasi rekomendasi audit sangat bergantung pada komitmen manajemen. Auditor dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan dan memberikan rekomendasi yang berkualitas, tetapi pelaksanaan tindakan perbaikan sepenuhnya berada dalam tanggung jawab manajemen organisasi. Oleh karena itu, keterlibatan pimpinan organisasi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses tindak lanjut audit. Dukungan manajemen puncak akan menciptakan budaya organisasi yang lebih terbuka terhadap evaluasi, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan. Sebaliknya, apabila manajemen tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap hasil audit, maka berbagai rekomendasi yang telah disusun berpotensi tidak terlaksana secara optimal.

Tindak lanjut audit merupakan tahapan yang menghubungkan hasil audit dengan proses perbaikan organisasi. Tindak lanjut audit dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manajemen untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan auditor serta memperbaiki kelemahan yang telah diidentifikasi. Melalui tindak lanjut audit, organisasi berupaya memastikan bahwa akar

permasalahan telah ditangani secara efektif sehingga risiko yang sama tidak terulang di masa mendatang. Dengan demikian, tindak lanjut audit tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap rekomendasi auditor, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi secara keseluruhan.

Dalam perspektif tata kelola organisasi yang baik (*good governance*), tindak lanjut audit memiliki peran yang sangat strategis. Salah satu prinsip utama tata kelola yang baik adalah akuntabilitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan tugas kepada para pemangku kepentingan. Temuan audit yang tidak ditindaklanjuti dapat menunjukkan lemahnya akuntabilitas organisasi karena berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi tidak memperoleh solusi yang memadai. Sebaliknya, organisasi yang secara konsisten menindaklanjuti hasil audit menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan.

Di sektor publik, pentingnya tindak lanjut audit semakin terlihat karena organisasi pemerintah mengelola dana dan sumber daya yang berasal dari masyarakat. Berbagai lembaga pengawasan, seperti auditor internal pemerintah maupun lembaga pemeriksa eksternal, secara rutin menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah. Tingkat penyelesaian tindak lanjut audit sering digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan negara dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, banyak regulasi yang

mewajibkan instansi pemerintah untuk melaporkan perkembangan penyelesaian rekomendasi audit secara berkala kepada pihak yang berwenang.

Dalam sektor swasta, tindak lanjut audit juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan bisnis. Perusahaan yang mampu merespons temuan audit secara cepat dan efektif cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat, risiko operasional yang lebih rendah, serta tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari investor dan kreditur. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan hasil audit berpotensi menghadapi berbagai masalah, seperti meningkatnya risiko kecurangan, ketidakpatuhan terhadap regulasi, kerugian finansial, hingga menurunnya reputasi perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, tindak lanjut audit harus dipandang sebagai investasi strategis yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi.

Perkembangan teknologi informasi juga telah memengaruhi proses manajemen temuan dan tindak lanjut audit. Saat ini banyak organisasi menggunakan aplikasi atau sistem monitoring berbasis digital untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi status penyelesaian rekomendasi audit. Sistem tersebut memungkinkan manajemen memperoleh informasi secara real time mengenai progres pelaksanaan tindak lanjut, pihak yang bertanggung jawab, serta hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi. Penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pemantauan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas karena setiap tindakan dapat terdokumentasi dengan lebih baik.

Selain dukungan teknologi, keberhasilan manajemen temuan dan tindak lanjut audit juga memerlukan koordinasi yang baik antarunit kerja. Banyak temuan audit yang melibatkan lebih dari satu bagian dalam organisasi sehingga penyelesaiannya membutuhkan kerja sama lintas fungsi. Komunikasi yang efektif antara auditor, manajemen, dan unit kerja terkait menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa rekomendasi audit dipahami dengan benar dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Koordinasi yang baik juga membantu organisasi mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi tindakan korektif.

7.2 Konsep dan Karakteristik Temuan Audit

Temuan audit merupakan salah satu hasil utama dari proses audit yang memiliki peran penting dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi. Melalui temuan audit, auditor dapat mengidentifikasi berbagai kondisi yang menunjukkan adanya kelemahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, atau peluang perbaikan dalam sistem yang sedang diperiksa. Temuan audit menjadi dasar bagi auditor dalam menyusun kesimpulan, memberikan rekomendasi, dan membantu manajemen mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Oleh karena itu, kualitas temuan audit sangat menentukan efektivitas audit dalam mendukung peningkatan tata kelola, pengendalian internal, serta kinerja organisasi secara keseluruhan.

Secara umum, temuan audit dapat diartikan sebagai hasil identifikasi auditor terhadap adanya perbedaan antara kondisi

yang ditemukan di lapangan dengan kriteria atau standar yang seharusnya dipenuhi. Kriteria tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, standar akuntansi, kebijakan organisasi, prosedur operasional, kontrak, atau berbagai ketentuan lain yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Ketika auditor menemukan bahwa praktik yang terjadi tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai temuan audit. Dengan demikian, temuan audit bukan sekadar kesalahan yang ditemukan auditor, tetapi merupakan hasil analisis yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan.

Dalam audit keuangan, temuan audit dapat muncul dalam berbagai bentuk. Temuan dapat berupa kesalahan pencatatan transaksi, ketidaklengkapan dokumen pendukung, kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap regulasi, penyalahgunaan aset, hingga indikasi terjadinya kecurangan. Selain itu, auditor juga dapat menemukan praktik-praktik yang kurang efisien sehingga menyebabkan pemborosan sumber daya organisasi. Oleh karena itu, ruang lingkup temuan audit tidak terbatas pada aspek keuangan semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek manajerial dan operasional yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi.

Sebuah temuan audit yang berkualitas harus disusun berdasarkan bukti audit yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Auditor tidak diperkenankan menyusun temuan berdasarkan asumsi, dugaan, atau opini pribadi yang tidak didukung oleh fakta yang objektif. Setiap

temuan harus memiliki dasar yang jelas berupa dokumen, data, hasil observasi, wawancara, konfirmasi, maupun bukti lain yang relevan. Ketersediaan bukti yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa temuan audit dapat diterima oleh manajemen dan digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam praktik audit profesional, suatu temuan audit umumnya terdiri atas beberapa unsur utama yang saling berkaitan. Unsur pertama adalah kondisi (condition), yaitu fakta atau keadaan yang ditemukan auditor selama proses pemeriksaan. Kondisi menggambarkan situasi aktual yang terjadi dalam organisasi dan menjadi titik awal dalam penyusunan temuan audit. Misalnya, auditor menemukan bahwa sejumlah transaksi pengeluaran tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai atau terdapat perbedaan antara saldo fisik persediaan dengan catatan akuntansi perusahaan.

Unsur kedua adalah kriteria (criteria), yaitu standar atau ketentuan yang menjadi dasar penilaian auditor. Kriteria dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, standar akuntansi, kebijakan internal organisasi, maupun praktik terbaik yang berlaku dalam suatu bidang tertentu. Kriteria berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah kondisi yang ditemukan auditor sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya kriteria yang jelas, auditor akan kesulitan menjelaskan mengapa suatu kondisi dianggap sebagai temuan audit.

Unsur ketiga adalah sebab (cause), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau

permasalahan yang ditemukan auditor. Analisis sebab sangat penting karena membantu organisasi memahami akar masalah yang sesungguhnya. Dalam banyak kasus, suatu permasalahan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai kelemahan dalam sistem, prosedur, sumber daya manusia, maupun pengawasan. Oleh karena itu, auditor perlu melakukan analisis yang mendalam agar rekomendasi yang diberikan dapat mengatasi akar penyebab masalah, bukan hanya gejalanya.

Unsur keempat adalah akibat (effect), yaitu dampak yang ditimbulkan oleh kondisi yang ditemukan auditor. Dampak tersebut dapat berupa kerugian keuangan, inefisiensi operasional, meningkatnya risiko organisasi, menurunnya kualitas layanan, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penyajian akibat dalam temuan audit sangat penting karena membantu manajemen memahami tingkat signifikansi suatu permasalahan. Semakin besar dampak yang ditimbulkan, semakin tinggi pula prioritas yang perlu diberikan terhadap penyelesaian temuan tersebut.

Unsur terakhir adalah rekomendasi (recommendation), yaitu tindakan perbaikan yang disarankan auditor untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Rekomendasi harus dirumuskan secara jelas, realistis, dan dapat dilaksanakan oleh organisasi. Tujuan utama rekomendasi adalah membantu manajemen memperbaiki kelemahan yang ada sehingga risiko yang sama tidak terulang di masa mendatang. Dengan demikian, rekomendasi menjadi jembatan antara temuan audit dan proses perbaikan organisasi.

Selain memiliki unsur-unsur yang lengkap, temuan audit juga harus memenuhi beberapa karakteristik tertentu agar dapat memberikan manfaat yang optimal. Karakteristik pertama adalah objektivitas. Temuan audit harus disusun berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi auditor maupun pihak lain. Objektivitas merupakan prinsip utama dalam profesi audit karena menentukan tingkat kepercayaan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Karakteristik kedua adalah relevansi. Temuan audit harus berkaitan langsung dengan tujuan audit dan memiliki hubungan yang jelas dengan aspek yang diperiksa. Temuan yang tidak relevan cenderung sulit memberikan manfaat bagi organisasi dan dapat mengalihkan perhatian dari permasalahan yang lebih penting. Oleh karena itu, auditor perlu memastikan bahwa setiap temuan yang dilaporkan benar-benar memiliki nilai tambah bagi proses pengambilan keputusan manajemen.

Karakteristik ketiga adalah materialitas. Tidak semua penyimpangan yang ditemukan selama audit perlu dilaporkan sebagai temuan audit. Auditor harus mempertimbangkan tingkat signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap organisasi. Temuan yang material adalah temuan yang memiliki dampak cukup besar sehingga dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan audit atau menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pertimbangan materialitas membantu auditor memfokuskan perhatian pada masalah yang benar-benar penting dan memerlukan tindakan perbaikan segera.

Karakteristik berikutnya adalah kejelasan. Temuan audit harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda. Penyajian yang jelas membantu manajemen memahami permasalahan yang ditemukan serta tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Auditor perlu menghindari penggunaan istilah yang ambigu atau penjelasan yang terlalu teknis tanpa memberikan konteks yang memadai.

Karakteristik lainnya adalah konstruktif. Meskipun temuan audit sering kali mengungkap kelemahan atau kesalahan, tujuan utama audit bukanlah mencari kesalahan atau menyalahkan individu tertentu. Sebaliknya, temuan audit harus disusun dengan pendekatan yang konstruktif dan berorientasi pada perbaikan. Auditor perlu menekankan solusi dan peluang peningkatan yang dapat dilakukan organisasi sehingga hasil audit dapat diterima secara positif oleh manajemen.

Dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks, temuan audit juga berfungsi sebagai alat manajemen risiko. Melalui identifikasi berbagai kelemahan dan potensi risiko, auditor membantu organisasi mengenali area-area yang memerlukan perhatian khusus. Temuan audit dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif. Dengan demikian, temuan audit tidak hanya berfungsi sebagai laporan mengenai kondisi yang telah terjadi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya permasalahan yang lebih besar di masa depan.

7.3 Klasifikasi dan Tingkat Signifikansi Temuan Audit

Temuan audit yang dihasilkan selama proses pemeriksaan memiliki karakteristik, dampak, dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Tidak semua temuan memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap organisasi. Beberapa temuan mungkin hanya menunjukkan kelemahan administratif yang relatif kecil, sementara temuan lainnya dapat mengindikasikan masalah serius yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan, gangguan operasional, bahkan risiko hukum yang signifikan. Oleh karena itu, auditor perlu melakukan klasifikasi dan penilaian tingkat signifikansi terhadap setiap temuan audit yang diperoleh. Klasifikasi ini bertujuan untuk membantu manajemen memahami prioritas penyelesaian masalah serta mengalokasikan sumber daya secara efektif dalam proses tindak lanjut audit.

Klasifikasi temuan audit merupakan proses pengelompokan temuan berdasarkan karakteristik, jenis permasalahan, tingkat risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap organisasi. Melalui klasifikasi yang tepat, auditor dapat menyajikan informasi yang lebih sistematis dan memudahkan manajemen dalam memahami area-area yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, klasifikasi temuan juga menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi serta penentuan strategi perbaikan yang sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi organisasi.

Salah satu klasifikasi yang paling umum digunakan dalam audit adalah pengelompokan berdasarkan tingkat signifikansi atau tingkat materialitas temuan. Dalam

pendekatan ini, temuan audit biasanya dibedakan menjadi temuan kritis, temuan mayor, dan temuan minor. Pembagian tersebut membantu organisasi menentukan prioritas tindakan korektif sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mengatasi permasalahan yang paling penting terlebih dahulu.

Temuan kritis merupakan kategori temuan yang memiliki tingkat risiko tertinggi dan dapat menimbulkan dampak yang sangat serius bagi organisasi. Temuan jenis ini biasanya berkaitan dengan pelanggaran hukum yang signifikan, indikasi kecurangan dalam jumlah besar, kelemahan pengendalian internal yang dapat menyebabkan kerugian material, atau kondisi yang mengancam keberlangsungan organisasi. Karena dampaknya yang sangat besar, temuan kritis memerlukan perhatian segera dari manajemen puncak dan harus ditindaklanjuti dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kegagalan dalam menangani temuan kritis dapat menyebabkan konsekuensi finansial, operasional, maupun reputasional yang serius bagi organisasi.

Sebagai contoh, auditor dapat mengklasifikasikan suatu temuan sebagai temuan kritis apabila ditemukan penyalahgunaan dana perusahaan dalam jumlah besar, manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sistematis, atau pelanggaran regulasi yang berpotensi menimbulkan sanksi hukum yang berat. Dalam situasi seperti ini, organisasi tidak hanya perlu melakukan tindakan perbaikan, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah pengendalian yang lebih kuat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Kategori berikutnya adalah temuan mayor. Temuan mayor menunjukkan adanya kelemahan yang cukup signifikan dalam sistem, prosedur, atau pengendalian organisasi yang dapat memengaruhi efektivitas operasional maupun keandalan laporan keuangan. Meskipun dampaknya tidak sebesar temuan kritis, temuan mayor tetap memerlukan perhatian serius karena berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih besar apabila tidak segera ditangani. Temuan mayor biasanya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kebijakan organisasi, kelemahan pengawasan, kesalahan pencatatan yang material, atau ketidakefisienan yang menyebabkan pemborosan sumber daya.

Sebagai ilustrasi, auditor dapat mengategorikan keterlambatan rekonsiliasi bank yang berlangsung secara berulang, lemahnya pemisahan tugas dalam proses pengelolaan kas, atau kurangnya dokumentasi transaksi penting sebagai temuan mayor. Temuan-temuan tersebut mungkin belum menimbulkan kerugian yang signifikan pada saat audit dilakukan, tetapi dapat meningkatkan risiko kesalahan dan kecurangan apabila tidak segera diperbaiki. Oleh karena itu, manajemen perlu menyusun rencana tindak lanjut yang jelas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sementara itu, temuan minor merupakan temuan yang memiliki tingkat risiko relatif rendah dan dampaknya tidak secara langsung memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Temuan minor umumnya berkaitan dengan kelemahan administratif, ketidaksesuaian prosedur yang bersifat terbatas, atau kesalahan kecil yang tidak material terhadap laporan keuangan maupun operasional organisasi. Meskipun

demikian, temuan minor tetap perlu diperhatikan karena dapat menjadi indikasi adanya kelemahan sistem yang lebih luas apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama.

Contoh temuan minor antara lain ketidaklengkapan beberapa dokumen pendukung transaksi, keterlambatan pengarsipan dokumen, atau ketidaksesuaian format laporan internal yang tidak berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan. Temuan-temuan semacam ini biasanya dapat diselesaikan oleh unit kerja terkait tanpa memerlukan intervensi khusus dari manajemen puncak. Namun demikian, perbaikan tetap diperlukan untuk menjaga kualitas tata kelola dan kepatuhan organisasi terhadap prosedur yang berlaku.

Selain berdasarkan tingkat signifikansi, temuan audit juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis permasalahan yang ditemukan. Salah satu kategori yang paling umum adalah temuan kepatuhan (*compliance findings*). Temuan kepatuhan muncul ketika organisasi tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, standar profesi, atau ketentuan lain yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Temuan jenis ini sangat penting karena ketidakpatuhan dapat menimbulkan risiko hukum, sanksi administratif, maupun kerusakan reputasi organisasi.

Kategori berikutnya adalah temuan keuangan (*financial findings*). Temuan keuangan berkaitan dengan kesalahan atau kelemahan dalam pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Temuan ini dapat berupa salah saji laporan keuangan, kesalahan klasifikasi akun, pencatatan transaksi yang tidak lengkap, maupun

ketidaksesuaian penerapan standar akuntansi. Dalam audit laporan keuangan, temuan keuangan memiliki perhatian khusus karena secara langsung memengaruhi keandalan informasi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan.

Temuan operasional (operational findings) juga merupakan kategori yang sering ditemukan dalam audit. Temuan operasional berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi penggunaan sumber daya organisasi. Auditor dapat menemukan berbagai kelemahan operasional seperti proses kerja yang tidak efisien, penggunaan aset yang kurang optimal, duplikasi pekerjaan, atau sistem pengendalian yang tidak efektif. Temuan operasional umumnya bertujuan membantu organisasi meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan.

Selain itu, terdapat pula temuan strategis (strategic findings), yaitu temuan yang berkaitan dengan kebijakan, arah organisasi, dan pencapaian tujuan jangka panjang. Temuan strategis sering kali muncul dalam audit kinerja atau audit manajemen yang berfokus pada efektivitas program dan pencapaian sasaran organisasi. Temuan ini memiliki nilai yang sangat penting karena dapat memengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya.

Dalam menentukan tingkat signifikansi suatu temuan, auditor biasanya mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap organisasi. Semakin besar potensi kerugian atau risiko yang muncul akibat suatu permasalahan, semakin tinggi tingkat signifikansinya. Faktor kedua adalah kemungkinan terjadinya permasalahan tersebut di masa

depan. Temuan yang memiliki probabilitas tinggi untuk terulang umumnya memperoleh prioritas yang lebih besar dibandingkan temuan yang bersifat insidental.

Faktor lainnya adalah tingkat pengaruh temuan terhadap sistem pengendalian internal dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu kelemahan dapat memengaruhi berbagai proses penting dalam organisasi, maka temuan tersebut cenderung dikategorikan sebagai temuan yang signifikan. Auditor juga mempertimbangkan aspek hukum, reputasi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam menilai tingkat signifikansi suatu temuan. Dengan pendekatan tersebut, auditor dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan komprehensif terhadap berbagai risiko yang dihadapi organisasi.

Klasifikasi dan penentuan tingkat signifikansi temuan audit memiliki manfaat yang sangat besar bagi proses pengambilan keputusan. Manajemen dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan prioritas tindakan korektif, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta memantau perkembangan penyelesaian rekomendasi audit. Selain itu, klasifikasi temuan juga membantu auditor dalam menyusun laporan audit yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

7.4 Penyusunan Rekomendasi Audit yang Efektif

Rekomendasi audit merupakan salah satu hasil terpenting dari proses audit karena menjadi jembatan antara identifikasi permasalahan dan upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh organisasi. Temuan audit yang disusun secara

rinci dan didukung oleh bukti yang kuat akan memberikan manfaat yang terbatas apabila tidak disertai dengan rekomendasi yang jelas dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, penyusunan rekomendasi audit yang efektif menjadi aspek penting dalam manajemen audit keuangan. Melalui rekomendasi yang tepat, auditor tidak hanya mengidentifikasi kelemahan yang terjadi, tetapi juga memberikan arahan yang konstruktif untuk meningkatkan sistem, prosedur, dan pengendalian organisasi.

Secara umum, rekomendasi audit dapat diartikan sebagai saran atau tindakan korektif yang diberikan auditor kepada manajemen untuk mengatasi kelemahan, penyimpangan, atau risiko yang ditemukan selama proses audit. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis terhadap akar penyebab permasalahan sehingga solusi yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menghilangkan sumber utama masalah tersebut. Dengan demikian, rekomendasi audit berfungsi sebagai instrumen perbaikan yang membantu organisasi meningkatkan efektivitas operasional, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Penyusunan rekomendasi audit harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kondisi organisasi dan karakteristik permasalahan yang ditemukan. Auditor perlu memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan relevan dengan temuan audit serta sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rekomendasi yang terlalu umum sering kali sulit diterapkan karena tidak memberikan petunjuk yang jelas

mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Sebaliknya, rekomendasi yang terlalu rinci dan teknis dapat menjadi kurang fleksibel dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, auditor perlu menemukan keseimbangan antara kejelasan dan fleksibilitas dalam merumuskan rekomendasi audit.

Salah satu prinsip utama dalam penyusunan rekomendasi audit adalah berorientasi pada akar penyebab masalah (root cause). Dalam banyak kasus, suatu temuan audit merupakan gejala dari permasalahan yang lebih mendasar. Apabila rekomendasi hanya berfokus pada gejala yang tampak, maka kemungkinan besar masalah yang sama akan muncul kembali di masa mendatang. Oleh karena itu, auditor harus melakukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau kelemahan. Setelah akar penyebab diketahui, rekomendasi dapat dirancang untuk menghilangkan sumber masalah tersebut secara permanen.

Sebagai contoh, apabila auditor menemukan keterlambatan penyusunan laporan keuangan, rekomendasi yang efektif tidak cukup hanya meminta unit terkait untuk mempercepat penyusunan laporan. Auditor perlu mengidentifikasi penyebab keterlambatan, misalnya kurangnya sumber daya manusia, sistem informasi yang tidak memadai, atau lemahnya koordinasi antarbagian. Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi, atau perbaikan mekanisme koordinasi. Dengan demikian, solusi yang diberikan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam praktik audit modern, rekomendasi yang efektif umumnya disusun berdasarkan prinsip SMART, yaitu Specific (spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan), dan Time-bound (memiliki batas waktu). Prinsip ini membantu auditor menghasilkan rekomendasi yang lebih jelas dan mudah diimplementasikan oleh manajemen. Rekomendasi yang spesifik akan memudahkan pihak terkait memahami tindakan yang harus dilakukan. Rekomendasi yang terukur memungkinkan organisasi mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi. Selain itu, rekomendasi harus realistis dan sesuai dengan kapasitas organisasi sehingga dapat dilaksanakan secara efektif.

Aspek relevansi juga sangat penting dalam penyusunan rekomendasi audit. Auditor harus memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar berhubungan dengan permasalahan yang ditemukan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Rekomendasi yang tidak relevan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya karena organisasi harus melaksanakan tindakan yang tidak memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, auditor perlu memahami konteks organisasi secara menyeluruh sebelum merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan.

Selain relevansi, auditor juga perlu mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat dalam penyusunan rekomendasi. Setiap tindakan perbaikan memerlukan sumber daya tertentu, baik berupa biaya, tenaga kerja, waktu, maupun teknologi. Oleh karena itu, auditor perlu memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari implementasi rekomendasi lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan. Rekomendasi

yang membutuhkan investasi yang sangat besar tetapi hanya memberikan manfaat yang terbatas mungkin tidak akan diterima oleh manajemen. Sebaliknya, rekomendasi yang memberikan dampak signifikan dengan biaya yang relatif rendah akan lebih mudah diimplementasikan.

Penyusunan rekomendasi audit juga harus memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi organisasi. Temuan dengan tingkat risiko tinggi memerlukan rekomendasi yang lebih komprehensif dan prioritas penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan temuan dengan risiko rendah. Pendekatan berbasis risiko ini membantu organisasi mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk menangani area yang paling kritis. Dengan demikian, rekomendasi audit tidak hanya menjadi alat perbaikan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi manajemen risiko organisasi.

Komunikasi yang efektif antara auditor dan manajemen merupakan faktor penting dalam penyusunan rekomendasi audit. Sebelum laporan audit diterbitkan, auditor biasanya mendiskusikan temuan dan rekomendasi dengan pihak yang diaudit untuk memperoleh pemahaman yang sama mengenai permasalahan yang ditemukan. Proses komunikasi ini memungkinkan auditor mendapatkan masukan mengenai kondisi operasional organisasi dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasi rekomendasi. Melalui dialog yang konstruktif, auditor dapat menyusun rekomendasi yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Rekomendasi audit yang efektif juga harus bersifat konstruktif dan berorientasi pada solusi. Auditor perlu menghindari penggunaan bahasa yang menyalahkan individu

atau unit kerja tertentu. Tujuan audit bukan untuk mencari kesalahan, melainkan membantu organisasi meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerjanya. Oleh karena itu, rekomendasi harus disampaikan dengan cara yang profesional dan mendorong kerja sama antara auditor dan manajemen dalam proses perbaikan. Pendekatan yang konstruktif akan meningkatkan tingkat penerimaan rekomendasi oleh pihak yang diaudit.

Dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks, auditor sering kali menghadapi tantangan dalam menyusun rekomendasi yang tepat. Setiap organisasi memiliki karakteristik, struktur, budaya, dan sumber daya yang berbeda-beda. Rekomendasi yang efektif pada satu organisasi belum tentu sesuai untuk diterapkan pada organisasi lainnya. Oleh karena itu, auditor harus menghindari pendekatan yang bersifat seragam dan lebih mengutamakan solusi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik organisasi. Kemampuan auditor dalam memahami konteks organisasi menjadi faktor penting dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh terhadap penyusunan rekomendasi audit. Saat ini banyak organisasi memanfaatkan sistem digital untuk mengelola proses bisnis dan informasi keuangan. Auditor perlu mempertimbangkan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari solusi yang direkomendasikan. Misalnya, kelemahan dalam pengendalian internal dapat diatasi melalui implementasi sistem otomatisasi, penggunaan perangkat lunak pengawasan, atau pengembangan aplikasi berbasis digital. Dengan memanfaatkan teknologi, organisasi dapat

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rekomendasi audit.

Keberhasilan rekomendasi audit pada akhirnya dapat diukur dari tingkat implementasinya. Rekomendasi yang berkualitas tinggi akan lebih mudah dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh manajemen. Sebaliknya, rekomendasi yang tidak jelas atau sulit diterapkan cenderung tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan organisasi. Oleh karena itu, auditor perlu memastikan bahwa setiap rekomendasi yang disusun memiliki tujuan yang jelas, langkah implementasi yang realistis, serta manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi.

7.5 Tanggung Jawab Manajemen dalam Menindaklanjuti Temuan Audit

Tindak lanjut atas temuan audit merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses audit. Audit yang berhasil tidak hanya ditandai oleh kemampuan auditor dalam menemukan kelemahan dan menyusun rekomendasi yang berkualitas, tetapi juga oleh sejauh mana hasil audit tersebut ditindaklanjuti secara efektif oleh manajemen. Dalam konteks ini, manajemen memegang peran sentral karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas berbagai permasalahan yang ditemukan selama proses audit. Tanpa komitmen dan keterlibatan aktif dari manajemen, temuan audit hanya akan menjadi dokumen administratif yang tidak memberikan manfaat nyata bagi organisasi.

Secara prinsip, auditor bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan bukti, menyusun temuan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Namun, auditor tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan korektif dalam organisasi yang diaudit. Tanggung jawab tersebut sepenuhnya berada pada pihak manajemen. Oleh karena itu, setelah laporan audit diterbitkan, manajemen harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi ditangani secara tepat. Tindakan tersebut mencerminkan komitmen organisasi terhadap perbaikan berkelanjutan, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Salah satu tanggung jawab utama manajemen adalah memahami secara menyeluruh isi laporan audit yang diterima. Manajemen perlu melakukan penelaahan terhadap seluruh temuan, rekomendasi, serta analisis risiko yang disampaikan auditor. Pemahaman yang baik terhadap laporan audit akan membantu manajemen menentukan prioritas perbaikan dan merumuskan strategi tindak lanjut yang sesuai. Dalam beberapa kasus, manajemen juga perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan auditor untuk memperoleh klarifikasi mengenai temuan atau rekomendasi tertentu sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses implementasi.

Setelah memahami hasil audit, manajemen berkewajiban menyusun rencana tindak lanjut atau action plan. Rencana tindak lanjut merupakan dokumen yang menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi temuan audit. Dokumen ini biasanya mencakup uraian tindakan perbaikan, pihak yang bertanggung jawab, sumber daya yang

dibutuhkan, target waktu pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas tindakan tersebut. Penyusunan action plan sangat penting karena memberikan arah yang jelas bagi seluruh unit kerja yang terlibat dalam proses perbaikan.

Dalam menyusun rencana tindak lanjut, manajemen perlu memperhatikan prioritas berdasarkan tingkat risiko dan dampak temuan audit. Temuan yang memiliki risiko tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian besar harus memperoleh perhatian lebih dahulu dibandingkan temuan yang bersifat administratif atau memiliki dampak yang relatif kecil. Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan organisasi menggunakan sumber daya secara lebih efektif dan memastikan bahwa masalah-masalah yang paling kritis dapat segera ditangani. Dengan demikian, organisasi dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Tanggung jawab manajemen tidak berhenti pada penyusunan rencana tindak lanjut. Manajemen juga harus memastikan bahwa tindakan perbaikan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antarunit kerja, pengalokasian sumber daya yang memadai, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dalam banyak organisasi, implementasi tindak lanjut audit melibatkan berbagai departemen atau bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda. Oleh karena itu, manajemen perlu menciptakan mekanisme koordinasi yang efektif agar seluruh pihak dapat bekerja secara terintegrasi dalam menyelesaikan temuan audit.

Komitmen manajemen puncak merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan tindak lanjut audit. Dukungan dari pimpinan organisasi akan memberikan sinyal yang kuat kepada seluruh karyawan bahwa hasil audit merupakan hal yang penting dan harus ditindaklanjuti dengan serius. Sebaliknya, apabila manajemen puncak tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap hasil audit, maka kemungkinan besar proses tindak lanjut akan berjalan lambat atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Oleh karena itu, kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada perbaikan menjadi salah satu prasyarat utama dalam pengelolaan hasil audit.

Selain melaksanakan tindakan perbaikan, manajemen juga bertanggung jawab untuk mengatasi akar penyebab permasalahan yang ditemukan auditor. Dalam banyak kasus, suatu temuan audit merupakan akibat dari kelemahan sistemik yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Apabila manajemen hanya memperbaiki gejala yang tampak tanpa mengatasi penyebab utamanya, maka masalah yang sama berpotensi muncul kembali di masa mendatang. Oleh karena itu, manajemen perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya temuan audit dan merancang solusi yang bersifat permanen serta berkelanjutan.

Tanggung jawab lain yang tidak kalah penting adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut. Manajemen harus memastikan bahwa setiap unit kerja yang diberikan tanggung jawab melaksanakan tindakan korektif sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Pemantauan dapat dilakukan melalui rapat evaluasi berkala,

laporan perkembangan tindak lanjut, maupun penggunaan sistem informasi yang memungkinkan pelacakan status penyelesaian rekomendasi audit secara real time. Dengan adanya pemantauan yang efektif, organisasi dapat mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses implementasi dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Dalam organisasi modern, penggunaan teknologi informasi semakin membantu manajemen dalam mengelola tindak lanjut audit. Banyak organisasi telah mengembangkan aplikasi atau dashboard monitoring yang memungkinkan manajemen memantau progres penyelesaian rekomendasi audit secara lebih cepat dan akurat. Sistem tersebut dapat menampilkan informasi mengenai status tindak lanjut, tingkat penyelesaian rekomendasi, unit kerja yang bertanggung jawab, serta tenggat waktu yang harus dipenuhi. Penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi pemantauan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas karena setiap tindakan dapat terdokumentasi dengan baik.

Manajemen juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perkembangan tindak lanjut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam organisasi sektor publik, misalnya, hasil tindak lanjut audit sering kali harus dilaporkan kepada lembaga pengawas, auditor eksternal, atau instansi yang memiliki kewenangan tertentu. Sementara itu, di sektor swasta, laporan tindak lanjut dapat disampaikan kepada dewan komisaris, komite audit, atau pemegang saham sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan organisasi. Pelaporan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan

para pemangku kepentingan terhadap komitmen organisasi dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan melalui audit.

Selain aspek teknis, manajemen juga bertanggung jawab membangun budaya organisasi yang mendukung proses tindak lanjut audit. Dalam beberapa organisasi, audit masih dipandang sebagai kegiatan yang bertujuan mencari kesalahan sehingga hasil audit sering kali mendapat resistensi dari pihak yang diaudit. Padahal, tujuan utama audit adalah memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, manajemen perlu menanamkan pemahaman bahwa temuan audit merupakan peluang untuk belajar dan melakukan perbaikan, bukan ancaman yang harus dihindari.

Budaya organisasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan akan mendorong seluruh anggota organisasi untuk lebih terbuka terhadap evaluasi dan perubahan. Karyawan akan lebih bersedia menerima rekomendasi audit apabila mereka memahami bahwa tindakan perbaikan bertujuan meningkatkan efektivitas kerja dan mengurangi risiko organisasi. Dalam jangka panjang, budaya seperti ini akan membantu organisasi membangun sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan meningkatkan kualitas tata kelola secara keseluruhan.

Pada akhirnya, tanggung jawab manajemen dalam menindaklanjuti temuan audit merupakan faktor penentu keberhasilan audit itu sendiri. Temuan dan rekomendasi audit hanya akan memberikan manfaat apabila diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang mampu memperbaiki kelemahan dan mengurangi risiko organisasi. Oleh karena itu, manajemen

harus berperan aktif dalam memahami hasil audit, menyusun rencana tindak lanjut, melaksanakan tindakan korektif, melakukan pemantauan, serta membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Dengan menjalankan tanggung jawab tersebut secara konsisten, organisasi dapat memperoleh manfaat maksimal dari proses audit dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kinerja organisasi secara berkelanjutan.

7.6 Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Audit

Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut audit merupakan tahapan penting dalam manajemen audit yang bertujuan memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan auditor telah dilaksanakan secara efektif oleh manajemen. Audit tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila hasil pemeriksaan hanya berhenti pada penyusunan laporan tanpa adanya mekanisme untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan benar-benar dilakukan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut audit menjadi bagian integral dari proses audit yang berfungsi untuk menilai efektivitas implementasi rekomendasi serta memastikan bahwa kelemahan yang ditemukan telah diperbaiki secara memadai.

Dalam konteks manajemen audit keuangan, pemantauan tindak lanjut audit dapat diartikan sebagai proses pengawasan yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan tindakan korektif yang telah direncanakan oleh manajemen. Sementara itu, evaluasi tindak lanjut audit merupakan proses penilaian terhadap tingkat keberhasilan tindakan perbaikan tersebut dalam mengatasi permasalahan yang menjadi

temuan audit. Kedua kegiatan ini saling melengkapi karena pemantauan berfokus pada pelaksanaan tindakan, sedangkan evaluasi menilai efektivitas hasil yang dicapai. Dengan demikian, organisasi tidak hanya mengetahui apakah rekomendasi telah dilaksanakan, tetapi juga dapat menilai apakah pelaksanaan tersebut benar-benar memberikan dampak yang diharapkan.

Pemantauan tindak lanjut audit memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akuntabilitas organisasi. Ketika auditor menemukan suatu kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan, manajemen berkewajiban untuk menindaklanjutinya. Namun, tanpa adanya mekanisme pemantauan yang memadai, terdapat risiko bahwa rekomendasi tersebut tidak akan dilaksanakan secara konsisten atau bahkan diabaikan. Oleh karena itu, pemantauan berfungsi sebagai alat pengendalian yang membantu organisasi memastikan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disusun.

Salah satu tujuan utama pemantauan tindak lanjut audit adalah memastikan bahwa setiap rekomendasi memiliki status penyelesaian yang jelas. Dalam praktiknya, tidak semua rekomendasi dapat diselesaikan dalam waktu yang sama. Beberapa rekomendasi mungkin dapat dilaksanakan dalam jangka pendek, sementara rekomendasi lainnya memerlukan waktu yang lebih lama karena melibatkan perubahan sistem, pengembangan teknologi, atau restrukturisasi organisasi. Melalui pemantauan yang teratur, organisasi dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan setiap rekomendasi

dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin menghambat proses penyelesaiannya.

Proses pemantauan tindak lanjut audit biasanya dimulai dengan penyusunan daftar rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Daftar tersebut memuat informasi mengenai temuan audit, rekomendasi yang diberikan auditor, unit kerja yang bertanggung jawab, target waktu penyelesaian, serta status pelaksanaan. Informasi ini menjadi dasar bagi manajemen dan auditor untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan tindak lanjut audit. Dengan adanya dokumentasi yang terstruktur, proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan transparan.

Dalam pelaksanaannya, pemantauan tindak lanjut audit dapat dilakukan melalui berbagai metode. Salah satu metode yang paling umum adalah penelaahan laporan perkembangan yang disusun oleh unit kerja terkait. Laporan tersebut berisi informasi mengenai tindakan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta rencana penyelesaian yang akan dilaksanakan. Melalui laporan perkembangan, manajemen dapat memperoleh gambaran mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan rekomendasi tanpa harus melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.

Selain melalui laporan tertulis, pemantauan juga dapat dilakukan melalui rapat evaluasi secara berkala. Rapat ini melibatkan manajemen, auditor internal, dan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut. Dalam forum tersebut, setiap pihak dapat menyampaikan perkembangan yang telah dicapai, mendiskusikan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah

penyelesaian yang diperlukan. Rapat evaluasi menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas dan target penyelesaian tindak lanjut audit.

Metode lain yang sering digunakan adalah observasi langsung dan verifikasi lapangan. Auditor atau pihak yang ditunjuk dapat melakukan kunjungan ke unit kerja terkait untuk memastikan bahwa tindakan korektif benar-benar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Misalnya, apabila rekomendasi audit mengharuskan penerapan prosedur baru dalam pengelolaan kas, auditor dapat melakukan observasi terhadap pelaksanaan prosedur tersebut di lapangan. Pendekatan ini memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan hanya mengandalkan laporan tertulis.

Setelah proses pemantauan dilakukan, tahap berikutnya adalah evaluasi tindak lanjut audit. Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan mampu mengatasi akar permasalahan yang menjadi penyebab temuan audit. Dalam banyak kasus, pelaksanaan rekomendasi tidak selalu menjamin bahwa masalah telah terselesaikan sepenuhnya. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas tindakan yang telah dilakukan dan menentukan apakah masih diperlukan perbaikan tambahan.

Evaluasi tindak lanjut audit biasanya dilakukan dengan membandingkan kondisi setelah perbaikan dengan kondisi yang menjadi dasar temuan audit sebelumnya. Auditor akan menilai apakah risiko yang diidentifikasi telah berkurang, apakah pengendalian internal telah diperkuat, serta apakah tujuan rekomendasi telah tercapai. Jika hasil evaluasi

menunjukkan bahwa permasalahan masih terjadi atau risiko masih tinggi, maka auditor dapat merekomendasikan tindakan tambahan untuk memperkuat upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Dalam proses evaluasi, auditor umumnya mengelompokkan status tindak lanjut ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama adalah telah selesai ditindaklanjuti, yaitu kondisi ketika seluruh tindakan perbaikan telah dilaksanakan dan hasilnya dinilai efektif. Kategori kedua adalah sedang dalam proses, yaitu ketika tindakan perbaikan telah dimulai tetapi belum sepenuhnya selesai. Kategori ketiga adalah belum ditindaklanjuti, yaitu ketika rekomendasi belum memperoleh tindakan yang memadai dari pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, terdapat kategori tidak dapat ditindaklanjuti yang digunakan apabila rekomendasi tidak lagi relevan karena perubahan kondisi tertentu.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pemantauan dan evaluasi tindak lanjut audit. Banyak organisasi saat ini menggunakan aplikasi manajemen audit atau dashboard monitoring yang memungkinkan pelacakan status rekomendasi secara real time. Sistem tersebut menyediakan informasi mengenai tingkat penyelesaian tindak lanjut, tenggat waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab. Dengan dukungan teknologi, proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan dibandingkan metode manual.

Meskipun demikian, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut audit sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu

tantangan utama adalah kurangnya komitmen dari unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rekomendasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, perubahan prioritas organisasi, dan kurangnya koordinasi antarunit kerja juga dapat menghambat proses tindak lanjut. Oleh karena itu, dukungan manajemen puncak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi audit memperoleh perhatian yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut audit memberikan manfaat yang besar bagi organisasi. Melalui proses ini, organisasi dapat memastikan bahwa temuan audit tidak berulang, risiko dapat diminimalkan, dan sistem pengendalian internal terus mengalami perbaikan. Selain itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut audit yang tinggi juga mencerminkan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab.

7.7 Hambatan dalam Implementasi Rekomendasi Audit

Implementasi rekomendasi audit merupakan tahapan penting yang menentukan keberhasilan proses audit secara keseluruhan. Melalui implementasi rekomendasi, organisasi berupaya memperbaiki kelemahan yang ditemukan auditor, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta meminimalkan berbagai

risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan rekomendasi audit tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Banyak organisasi menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan tindak lanjut audit menjadi lambat, tidak efektif, atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai hambatan dalam implementasi rekomendasi audit menjadi penting agar organisasi dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasinya.

Salah satu hambatan yang paling sering ditemukan adalah kurangnya komitmen dari manajemen. Keberhasilan implementasi rekomendasi audit sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan aktif pimpinan organisasi. Ketika manajemen tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap hasil audit, rekomendasi yang telah disusun dengan baik sering kali tidak memperoleh prioritas dalam pelaksanaannya. Akibatnya, unit-unit kerja yang bertanggung jawab tidak memiliki dorongan yang cukup untuk segera menyelesaikan tindakan korektif yang diperlukan. Kurangnya komitmen manajemen juga dapat menciptakan budaya organisasi yang menganggap audit hanya sebagai formalitas administratif, bukan sebagai alat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

Selain kurangnya komitmen manajemen, hambatan lain yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya. Pelaksanaan rekomendasi audit sering kali memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, teknologi, maupun waktu. Dalam

banyak organisasi, terutama yang memiliki keterbatasan finansial, rekomendasi yang membutuhkan investasi tambahan sering mengalami penundaan karena dianggap membebani anggaran yang tersedia. Misalnya, rekomendasi untuk memperbarui sistem informasi akuntansi atau memperkuat infrastruktur teknologi informasi mungkin memerlukan biaya yang cukup besar sehingga implementasinya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan yang signifikan dalam implementasi rekomendasi audit. Banyak organisasi menghadapi kekurangan personel yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan perbaikan. Dalam beberapa kasus, pegawai yang bertanggung jawab atas tindak lanjut audit sudah memiliki beban kerja yang tinggi sehingga pelaksanaan rekomendasi menjadi tertunda. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap substansi rekomendasi audit dapat menyebabkan tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan tindak lanjut audit.

Hambatan berikutnya adalah resistensi terhadap perubahan. Implementasi rekomendasi audit sering kali menuntut perubahan dalam prosedur kerja, sistem pengendalian, atau pola perilaku pegawai. Perubahan tersebut tidak selalu diterima dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Sebagian individu mungkin merasa bahwa perubahan akan menambah beban kerja, mengurangi kenyamanan, atau mengancam posisi mereka dalam

organisasi. Akibatnya, muncul penolakan baik secara terbuka maupun terselubung yang dapat menghambat pelaksanaan rekomendasi audit. Resistensi terhadap perubahan merupakan tantangan yang umum dalam manajemen organisasi dan memerlukan pendekatan komunikasi serta kepemimpinan yang efektif untuk mengatasinya.

Kurangnya koordinasi antarunit kerja juga sering menjadi penghambat dalam implementasi rekomendasi audit. Banyak temuan audit melibatkan lebih dari satu unit kerja sehingga penyelesaiannya membutuhkan kerja sama lintas fungsi. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, pelaksanaan tindakan korektif dapat mengalami keterlambatan atau bahkan tidak terlaksana secara optimal. Misalnya, rekomendasi yang berkaitan dengan penguatan pengendalian internal mungkin memerlukan keterlibatan bagian keuangan, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan unit operasional secara bersamaan. Tanpa koordinasi yang efektif, setiap unit dapat memiliki persepsi dan prioritas yang berbeda sehingga proses tindak lanjut menjadi tidak sinkron.

Hambatan lain yang sering dihadapi adalah kurang jelasnya tanggung jawab dalam pelaksanaan tindak lanjut. Dalam beberapa organisasi, rekomendasi audit tidak disertai dengan penetapan pihak yang secara spesifik bertanggung jawab atas implementasinya. Akibatnya, terjadi kebingungan mengenai siapa yang harus mengambil tindakan dan bagaimana langkah perbaikan harus dilakukan. Ketidakjelasan tanggung jawab ini dapat menyebabkan rekomendasi audit terabaikan atau saling dilemparkan antarunit kerja. Oleh karena itu, setiap rekomendasi audit perlu disertai dengan

penugasan yang jelas kepada individu atau unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Faktor komunikasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan implementasi rekomendasi audit. Dalam beberapa kasus, rekomendasi audit tidak dipahami dengan baik oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan bahasa yang terlalu teknis, kurangnya penjelasan mengenai tujuan rekomendasi, atau minimnya komunikasi antara auditor dan manajemen. Ketika rekomendasi tidak dipahami secara tepat, tindakan yang dilakukan mungkin tidak sesuai dengan harapan auditor sehingga efektivitas tindak lanjut menjadi rendah. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan konstruktif sangat diperlukan dalam setiap tahap implementasi rekomendasi audit.

Perubahan lingkungan organisasi juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut audit. Organisasi beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan sering mengalami perubahan regulasi, kebijakan, struktur organisasi, maupun kondisi ekonomi. Perubahan tersebut dapat memengaruhi prioritas organisasi dan menyebabkan pelaksanaan rekomendasi audit tertunda. Sebagai contoh, ketika organisasi menghadapi kondisi krisis atau perubahan kebijakan yang mendesak, perhatian manajemen mungkin lebih difokuskan pada penanganan masalah tersebut sehingga tindak lanjut audit menjadi kurang diperhatikan. Dalam situasi seperti ini, organisasi perlu menyesuaikan strategi implementasi agar tetap dapat melaksanakan rekomendasi audit tanpa mengabaikan kebutuhan operasional lainnya.

Kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi juga menjadi faktor yang menghambat implementasi rekomendasi audit. Tanpa adanya mekanisme pemantauan yang terstruktur, organisasi akan kesulitan mengetahui perkembangan pelaksanaan tindak lanjut serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses implementasi. Akibatnya, berbagai rekomendasi audit dapat tertunda dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya tindakan yang memadai. Sistem pemantauan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi memperoleh perhatian yang cukup dan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam era digital, tantangan implementasi rekomendasi audit juga semakin kompleks karena banyak organisasi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Rekomendasi yang berkaitan dengan transformasi digital, keamanan siber, atau modernisasi sistem informasi sering kali memerlukan investasi besar dan keahlian khusus yang tidak selalu tersedia dalam organisasi. Selain itu, perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat dapat menyebabkan rekomendasi yang telah direncanakan menjadi kurang relevan apabila implementasinya terlalu lama. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi tantangan ini.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan dukungan yang kuat dari manajemen puncak. Pimpinan organisasi harus menunjukkan komitmen yang nyata terhadap pelaksanaan rekomendasi audit dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan, menetapkan

prioritas yang jelas, serta melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Selain itu, organisasi perlu membangun budaya yang mendukung perbaikan berkelanjutan sehingga hasil audit dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja, bukan sebagai ancaman atau bentuk kritik terhadap individu tertentu.

Peningkatan komunikasi dan koordinasi antarunit kerja juga menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan implementasi rekomendasi audit. Auditor, manajemen, dan unit kerja terkait perlu menjalin kerja sama yang baik untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dipahami dengan benar dan dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk memantau perkembangan tindak lanjut audit dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses implementasi.

7.8 Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Audit

Tindak lanjut audit merupakan tahapan yang menentukan sejauh mana hasil audit dapat memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Temuan dan rekomendasi audit yang disusun secara profesional tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut audit sehingga setiap rekomendasi yang diberikan dapat diterapkan secara optimal dan memberikan dampak positif terhadap perbaikan tata kelola,

pengendalian internal, serta kinerja organisasi. Strategi peningkatan efektivitas tindak lanjut audit menjadi semakin penting dalam lingkungan organisasi yang kompleks dan penuh dengan berbagai tantangan serta risiko.

Salah satu strategi utama dalam meningkatkan efektivitas tindak lanjut audit adalah membangun komitmen yang kuat dari manajemen puncak. Dukungan pimpinan organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan implementasi rekomendasi audit. Ketika manajemen menunjukkan perhatian yang serius terhadap hasil audit, seluruh unit kerja akan memahami bahwa tindak lanjut audit merupakan prioritas organisasi yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, apabila manajemen kurang memberikan perhatian terhadap rekomendasi auditor, maka proses tindak lanjut cenderung berjalan lambat atau bahkan terabaikan. Oleh karena itu, manajemen puncak harus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan rekomendasi, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selain komitmen manajemen, strategi penting lainnya adalah mengintegrasikan tindak lanjut audit ke dalam sistem perencanaan dan pengelolaan organisasi. Banyak organisasi gagal melaksanakan rekomendasi audit karena tindak lanjut dianggap sebagai kegiatan tambahan yang terpisah dari aktivitas utama organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, rekomendasi audit perlu dimasukkan ke dalam rencana kerja, program kegiatan, dan target kinerja unit kerja yang bersangkutan. Dengan cara ini, pelaksanaan rekomendasi

audit menjadi bagian dari tanggung jawab operasional yang harus dicapai oleh setiap unit kerja. Integrasi tersebut juga membantu memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan tindak lanjut telah diperhitungkan sejak awal dalam proses perencanaan organisasi.

Penyusunan rencana aksi atau action plan yang jelas dan terukur juga merupakan strategi yang sangat penting. Setiap rekomendasi audit harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret yang menjelaskan apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan harus diselesaikan, dan bagaimana keberhasilannya akan diukur. Rencana aksi yang terstruktur membantu organisasi menghindari kebingungan dalam pelaksanaan tindak lanjut serta memudahkan proses pemantauan dan evaluasi. Selain itu, penetapan target waktu yang realistis akan mendorong penyelesaian rekomendasi secara lebih disiplin dan terarah.

Peningkatan kualitas komunikasi antara auditor dan manajemen juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas tindak lanjut audit. Dalam banyak kasus, kegagalan implementasi rekomendasi disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap maksud dan tujuan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, auditor perlu menjelaskan temuan dan rekomendasi secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab. Diskusi yang konstruktif antara auditor dan manajemen dapat membantu menyamakan persepsi mengenai permasalahan yang ditemukan serta solusi yang perlu diterapkan. Komunikasi yang baik juga memungkinkan organisasi mengidentifikasi hambatan implementasi sejak dini sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan.

Strategi berikutnya adalah memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi tindak lanjut audit. Organisasi perlu memiliki mekanisme yang memungkinkan pemantauan perkembangan pelaksanaan rekomendasi secara berkala dan sistematis. Pemantauan dapat dilakukan melalui laporan kemajuan, rapat evaluasi rutin, maupun pemeriksaan lanjutan oleh auditor internal. Dengan adanya pemantauan yang berkelanjutan, manajemen dapat mengetahui status setiap rekomendasi, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempercepat penyelesaiannya. Sistem pemantauan yang efektif juga meningkatkan akuntabilitas karena setiap unit kerja harus mempertanggungjawabkan progres pelaksanaan tindak lanjut yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan strategi yang semakin penting dalam meningkatkan efektivitas tindak lanjut audit. Saat ini banyak organisasi menggunakan aplikasi manajemen audit atau sistem monitoring berbasis digital untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi audit. Sistem tersebut memungkinkan manajemen memperoleh informasi secara real time mengenai status tindak lanjut, tingkat penyelesaian rekomendasi, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Selain meningkatkan efisiensi, penggunaan teknologi juga membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena seluruh aktivitas tindak lanjut terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan tindak lanjut audit.

Banyak rekomendasi audit yang memerlukan pemahaman teknis tertentu untuk dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, organisasi perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut. Pelatihan dapat mencakup aspek pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan regulasi, penggunaan teknologi informasi, maupun keterampilan manajerial lainnya. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, organisasi akan lebih mampu melaksanakan rekomendasi audit secara tepat dan berkelanjutan.

Strategi lain yang perlu diterapkan adalah pendekatan berbasis risiko dalam pelaksanaan tindak lanjut audit. Tidak semua temuan audit memiliki tingkat risiko dan dampak yang sama terhadap organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memprioritaskan penyelesaian rekomendasi yang berkaitan dengan risiko tinggi terlebih dahulu. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan memastikan bahwa permasalahan yang paling kritis dapat segera ditangani. Dengan demikian, organisasi dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara lebih cepat.

Pemberian insentif dan penguatan akuntabilitas juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendorong pelaksanaan tindak lanjut audit. Organisasi dapat memasukkan penyelesaian rekomendasi audit sebagai salah satu indikator kinerja bagi unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab. Dengan adanya keterkaitan antara tindak lanjut audit dan penilaian kinerja, motivasi untuk

melaksanakan rekomendasi akan meningkat. Sebaliknya, apabila terdapat keterlambatan atau kegagalan dalam menindaklanjuti rekomendasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, organisasi dapat menerapkan mekanisme evaluasi dan pembinaan yang sesuai.

Budaya organisasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas tindak lanjut audit. Organisasi perlu membangun pemahaman bahwa audit bukanlah alat untuk mencari kesalahan, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja. Ketika seluruh anggota organisasi memandang temuan audit sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, resistensi terhadap rekomendasi akan berkurang. Budaya yang terbuka terhadap evaluasi dan perubahan akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi implementasi tindakan perbaikan.

Selain itu, organisasi perlu memperkuat koordinasi antarunit kerja dalam pelaksanaan rekomendasi audit. Banyak temuan audit yang memerlukan kerja sama lintas fungsi sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh satu unit kerja saja. Koordinasi yang baik memungkinkan berbagai pihak yang terlibat untuk berbagi informasi, menyelaraskan langkah-langkah perbaikan, dan mengatasi hambatan yang muncul selama proses implementasi. Dengan adanya koordinasi yang efektif, pelaksanaan tindak lanjut audit dapat berlangsung lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih optimal.

Peran auditor internal juga sangat penting dalam mendukung efektivitas tindak lanjut audit. Selain melakukan

pemantauan, auditor internal dapat berfungsi sebagai konsultan yang membantu manajemen memahami rekomendasi dan merancang strategi implementasi yang sesuai. Auditor internal juga dapat memberikan masukan mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan organisasi untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ditemukan. Dengan pendekatan yang kolaboratif, hubungan antara auditor dan manajemen akan menjadi lebih produktif dalam mendorong proses perbaikan organisasi.

Pada akhirnya, efektivitas tindak lanjut audit sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk mengelola perubahan secara sistematis dan berkelanjutan. Tindak lanjut audit bukan hanya tentang menyelesaikan rekomendasi dalam jangka pendek, tetapi juga tentang menciptakan perbaikan yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi peningkatan efektivitas tindak lanjut audit harus menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2022. Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. 2023. Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi (Terjemahan Indonesia). Jakarta: Erlangga.
- Hery. 2021. Auditing dan Asurans: Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional. Jakarta: Grasindo.
- Mulyadi. 2022. Auditing. Edisi Terbaru. Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2021. Internal Audit dan Tata Kelola Organisasi. Jakarta: Harvarindo.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2021. Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing). Jakarta: Salemba Empat.
- Effendi, Muh. Arief. 2022. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Karyono. 2022. Forensic Fraud. Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, Abdul. 2023. Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahmatika, Dwi Nuraini. 2023. Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal Organisasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Sitompul, Megawati, Deliana, dan Cris Kuntadi. 2023. "Efektivitas Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud: Perencanaan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut." Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik (JUMATI), 1(1),

86–98.

- Middin, Muslianti, Antong, dan Halim Usman. 2023. "Pengaruh Pengendalian Internal dan Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Pencegahan Fraud dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai Variabel Mediasi." *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 4(2), 402–420.
- Nusa, Nabella Duta, dan Siti Muslihah. 2021. "Pengaruh Serapan Anggaran, Kepemimpinan Etis, Tindak Lanjut Temuan BPK, dan Keefektifan Audit Internal pada Hasil Audit LKPD." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10(2), 202–219.
- Kuswara, Zakaria, Marsel Pasaribu, Fitriana, dan Rachmat Agus Santoso. 2024. "Menggali Tren Audit Internal Terkini: Studi Bibliometrik Berdasarkan Data Scopus 2020–2023." *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(6).
- Chosidah, Orin Aririn Nur, dan Ahmad Zakie Mubarak. 2025. "Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021–2023." *Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi*, 7(4).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2024. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2022. *Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Berbasis Risiko*.

Jakarta: BPKP.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2024.
Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pemerintah.
Jakarta: BPKP.

Alamsyah, Richad, dkk. 2023. Audit Internal: Pengendalian dan
Kepatuhan. Padang: Get Press Indonesia.

BIODATA PENULIS



Dr. Endraria, SE., MM., M.Akt., CRA., CRP.

Dosen Program Magister Akuntansi
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang

Dr. Endraria, S.E., M.M., M.Akt. merupakan akademisi dan praktisi di bidang akuntansi yang saat ini berafiliasi sebagai dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Muhammadiyah Cikokol Tangerang, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Tangerang serta Magister Akuntansi di Universitas Budi Luhur Jakarta. Gelar Doktor Ilmu Akuntansi diraih dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2017, yang semakin memperkuat kompetensinya dalam bidang akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan tata kelola organisasi. Dalam perjalanan karier akademiknya, Dr. Endraria telah mengemban berbagai posisi strategis di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan, Kepala Biro Keuangan, serta Wakil Direktur II

Bidang Keuangan, Kepegawaian, dan Umum pada Program Pascasarjana. Saat ini, beliau dipercaya sebagai Direktur Lembaga Pembelajaran Bauran (LAPEMBA), yang berperan dalam pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan sistem pendidikan terintegrasi. Dalam jabatan akademik, beliau telah mencapai posisi Lektor dan terus berproses dalam pengembangan karier menuju jenjang akademik yang lebih tinggi.

Sebagai seorang akademisi, Dr. Endraria memiliki rekam jejak penelitian dan publikasi yang konsisten pada bidang akuntansi, sistem informasi akuntansi, manajemen keuangan, auditing, serta tata kelola sektor publik. Karya-karyanya telah dipublikasikan pada berbagai jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. Beberapa publikasinya terindeks Scopus serta Google Scholar, yang mencerminkan kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur akuntansi, khususnya terkait kualitas sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, implementasi teknologi informasi, serta pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Selain artikel jurnal, beliau juga aktif menulis buku ajar dan book chapter dalam bidang akuntansi biaya, sistem informasi akuntansi, auditing, dan akuntansi sektor publik yang diterbitkan oleh penerbit nasional. Di samping aktivitas penelitian dan pengajaran, Dr. Endraria juga aktif dalam pengembangan profesional melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi, antara lain Certified Professional Human Capital Management (CPHCM), Certified Risk Associate (CRA), dan Certified Risk Professional (CRP). Sertifikasi tersebut memperkuat kompetensinya dalam manajemen risiko, pengelolaan sumber daya

manusia, serta tata kelola keuangan organisasi. Beliau juga telah mengikuti pelatihan pengembangan instruksional (PEKERTI) sebagai bagian dari peningkatan kualitas pedagogik dosen. Kombinasi antara latar belakang akademik, pengalaman manajerial, dan sertifikasi profesional menjadikan beliau memiliki perspektif komprehensif dalam memadukan teori dan praktik.

Pengalaman profesional Dr. Endraria tidak hanya terbatas pada dunia akademik, tetapi juga mencakup pengalaman di sektor korporasi pada bidang akuntansi dan keuangan. Pengalaman tersebut memberikan landasan praktis yang kuat dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan organisasi, sistem pengendalian internal, serta penerapan sistem informasi akuntansi dalam lingkungan bisnis dan institusi pendidikan tinggi. Integrasi antara pengalaman praktis dan pendekatan ilmiah menjadi ciri khas kontribusinya dalam pengajaran dan penelitian.

Selain aktif dalam kegiatan akademik, beliau juga terlibat dalam organisasi kemasyarakatan dan pendidikan, khususnya dalam lingkungan Muhammadiyah. Keterlibatan tersebut mencerminkan komitmen terhadap penguatan tata kelola organisasi dan pengembangan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai etika dan profesionalisme. Prinsip tersebut juga tercermin dalam filosofi hidup yang dipegangnya, yakni bahwa ilmu dan jabatan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Secara keseluruhan, Dr. Endraria merupakan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang manajemen audit, sistem informasi akuntansi, dan tata kelola keuangan, dengan pendekatan integratif antara penelitian, pengajaran, dan praktik profesional. Kontribusinya

dalam penulisan book chapter ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik serta memberikan perspektif yang relevan dalam pengembangan manajemen audit keuangan di era transformasi digital dan tata kelola modern. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: endraria@umt.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Wa Ode Harliyanti Unga, S.Sos., M.Si.

Penulis lahir di Kota Kendari. Pendidikan Strata Satu (S1) diselesaikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Halu Oleo. Pendidikan Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) ditempuh pada Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Program Studi Manajemen Keuangan.

Saat ini penulis merupakan dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, khususnya pada Program Studi Administrasi Bisnis. Sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang manajemen, keuangan, dan tata kelola organisasi. Selain menjalankan peran sebagai pengajar, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi profesional dan sosial. Saat ini penulis tercatat sebagai Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan Kota Kendari (SP Kendari) serta Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Jasa Keamanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Email: waodeharliyantunga@uho.ac.id

BIODATA PENULIS



Richad Alamsyah

SE.,M.Ak.,CSA[®],CRMO[®],CFP[®],CRMP[®],QLP[®] AAAIK, AEPP

Penulis lahir di Bogor pada tanggal 03 Desember 1991. Penulis merupakan dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Akuntansi Universitas Pancasila. Penulis juga telah menyelesaikan beberapa sertifikasi profesi antara lain: sertifikasi profesi pasar modal, manajemen risiko, perencana keuangan, asuransi kerugian

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Markonah, ASAI, M.M.

Dosen Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika
Perbanas

Markonah adalah dosen tetap Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Perbanas sejak tahun 2015 sampai saat ini, Namun sebelumnya adalah dosen tetap STIE Tri Bhakti Bekasi, dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan pernah mendapatkan Hibah Dikti yaitu Hibah Disertasi Doktor Tahun 2017 dan Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) Tahun 2022 sebagai pengusul utama. Mendapatkan tahun 2024 dan tahun 2025 mendapatkan hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari Dikti melalui platform BIMA.

Buku yang pernah ditulis berjudul Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) Jilid 1 sampai 6, Menulis buku Matematika Keuangan, Matematika Ekonomi dan Bisnis 1 dan 2, Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan, Ekonomi Hijau dan Pengurangan Kemiskinan, Manajemen Risiko Usaha, Socio Technopreneurship: Teori dan Aplikasi. Serta beberapa monograf dan *book chapter*.

Markonah dilahirkan di Kediri tanggal 15 November 1963. Pada tahun 1987 meraih gelar Sarjana di Universitas Brawijaya Malang. Pada tahun 1997 mendapatkan gelar profesi Ajun Aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia dengan sebutan Associate of Actuaries of Indonesia (ASAI). Pada tahun 2001 meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Budi Luhur Jakarta, mendapatkan gelar S3 di Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) Universitas Brawijaya tahun 2018.

Adapun jabatan yang pernah diemban sebagai Kaprodi S1 dan D3 Manajemen STIE Tri Bhakti dan Kepala LPPM STIE Tri Bhakti Bekasi. Saat ini menjabat sebagai Kasubdit Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Perbanas Jakarta.

BIODATA PENULIS



Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Penulis lahir di Palembang 1 Januari 1971. Telah menyelesaikan strata satu di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2000), Lulus strata dua di Program Studi Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung (2007), dan strata tiga di Program Studi Ilmu Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan Universitas Bengkulu (2024). Karir dimulai sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Bengkulu sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang. Penulis aktif dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : ahmadjunaidi@umb.ac.id

BIODATA PENULIS



Sepbeariska Manurung, S.E., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung
Pematangsiantar

Sepbeariska Manurung, S.E., M.Si. lahir di Kota Batam pada tanggal 26 September 1985. Menyelesaikan program studi sarjana akuntansi di Sekolah Tinggi Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar pada tahun 2013. Dan kemudian menyelesaikan pendidikan Magister Akuntansinya (S-2) di Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi pasar modal pada tahun 2016. Pada tahun 2017 hingga saat ini penulis diangkat sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung Pematangsiantar dengan mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah dan Auditing. Sampai saat ini penulis juga aktif menulis beberapa judul *bookchapter*.

BIODATA PENULIS



Karina Sukardi, S.T.,M.M

Institut Teknologi Bisnis Dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa
Indonesia

Karina Sukardi, S.T.,M.M lahir di Purworejo 19 Oktober 1987, menyelesaikan studi S1 dan mendapatkan gelar S.T pada Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna di tahun 2017, dan melanjutkan studi S2 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha selesai di tahun 2020 dan mendapatkan gelar M.M. Bekerja pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan sampai dengan tahun 2023 sebagai Dosen Tetap ber NIDN di Prodi Ekonomi Pembangunan, kemudian pada tahun 2025 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Dosen Tetap ber NIDN di pada Institut Teknologi Bisnis Dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia dan menjabat sebagai Kaprodi Bisnis Digital, email : karinasoe87@gmail.com